

# **PERAN IDEOLOGI DALAM PERANSERTA POLITIK HIZBUT TAHRIR INDONESIA**

**(Studi Kasus Peranserta Politik Hizbut Tahrir Indonesia Pada Pemilu Legislatif  
dan Pemilu Presiden 2014)**



**Abdurrahman Mujahid Rabbani**

**4825122505**

**Skripsi ini ditulis untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
2017**

## LEMBAR ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Abdurrahman Mujahid Rabbani

No registrasi : 4825122505

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Peran Ideologi dalam Peranserta Politik Hizbut Tahrir Indonesia (Studi Kasus Peranserta Politik Hizbut Tahrir Indonesia pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014)**” ini sepenuhnya karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Jakarta, Februari 2017

Abdurrahman Mujahid Rabbani

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab/Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Jakarta

Dr. Muhammad Zid, M.Si  
NIP. 19630412 199403 1 002

| No | Nama  | TTD   | Tanggal |
|----|---|-------|---------|
| 1  | <u>Abdul Rahman Hamid, SH., MH</u><br>NIP. 19740504 200501 1 002<br>Ketua Sidang  | ..... | .....   |
| 2  | <u>Achmad Siswanto, M.Si</u><br>NIDK. 8846100016<br>Sekretaris Sidang             | ..... | .....   |
| 3  | <u>Dr. Robertus Robet, MA</u><br>NIP. 19710516 200604 1 001<br>Penguji Ahli       | ..... | .....   |
| 4  | <u>Abdi Rahmat, M.Si</u><br>NIP. 19730216 200604 1 001<br>Dosen Pembimbing I      | ..... | .....   |
| 5  | <u>Ubedilah Badrun, M.Si</u><br>NIP. 19720315 200912 1 001<br>Dosen Pembimbing II | ..... | .....   |

**Tanggal Lulus: 2 Februari 2017**

## ABSTRAK

**Abdurrahman Mujahid Rabbani.** Peran Ideologi Dalam Peranserta Politik Hizbut Tahrir Indonesia. Studi Kasus: Peranserta Politik Hizbut Tahrir Indonesia Pada Pemilu Legislatif Dan Pemilu Presiden 2014. *Skripsi*. Jakarta: Program Studi Sosiologi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. 2017.

Skripsi ini terdapat dua tujuan utama penelitian. Pada tujuan pertama penelitian ini ialah untuk mengetahui peranserta politik Hizbut Tahrir Indonesia pada Pileg dan Pilpres tahun 2014. Pada tujuan kedua penelitian ini kemudian ialah untuk mengetahui peran ideologi terhadap peranserta politik Hizbut Tahrir Indonesia.

Metodologi penelitian yang digunakan ialah dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian skripsi kemudian menggunakan tipe penelitian studi kasus. Studi kasus dilakukan pada peranserta politik Hizbut Tahrir Indonesia dalam Pileg dan Pilpres 2014. Dalam metode pengumpulan data kemudian dilakukan dengan dua metode. *Interview* dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pengurus DPP Hizbut Tahrir Indonesia dan anggota DPD Hizbut Tahrir Indonesia kota Bekasi. *Library research* dilakukan dengan cara menelusuri sumber buku primer dan sekunder terkait Hizbut Tahrir Indonesia untuk mengetahui ide-ide atau pemikirannya. Konsep dan teori yang digunakan sebagai alat analisis skripsi, terdiri dari 4 konsep dan 1 teori. Pada konsep yang digunakan, yaitu konsep gerakan sosial, konsep gerakan sosial keagamaan, konsep ideologi, dan konsep peranserta politik (partisipasi politik dan mobilisasi politik). Pada teori yang digunakan yaitu teori konstruksi sosial.

Hasil temuan penelitian menunjukkan Hizbut Tahrir Indonesia merupakan sebuah gerakan sosial karena memenuhi aspek pengorganisasian (*organized*); pertimbangan (*deliberate*); dan daya tahan (*enduring*). Hizbut Tahrir Indonesia sebagai gerakan sosial kemudian dikategorikan menjadi tipe gerakan revolusi, karena berusaha untuk merubah atau menggantikan nilai-nilai yang saat ini dijalankan di Indonesia menjadi nilai-nilai Islam dan sistem *syariah* serta *khilafah Islamiyah*. Dalam temuan penelitian lainnya terkait Pileg dan Pilpres tahun 2014 dimana peranserta politik yang dilakukannya kecenderungan hanya aktif pada mobilisasi politik sedangkan pada partisipasi politik kurang terlihat. Mobilisasi politik dilakukan dengan berbagai macam pembinaan dan diskusi-diskusi. Pada temuan penelitian terakhir yaitu terkait peran ideologi Islam Hizbut Tahrir Indonesia dilakukan dengan penjelasan tiga momentum dialektis. Eksternalisasi berupa sosialisasi ideologi Islam Hizbut Tahrir Indonesia melalui peranserta politik. Obyektivasi berupa penginstitutionalisasi ideologi Islam pada Hizbut Tahrir Indonesia. Internalisasi berupa pembiasaan atau mendarah dagingkan ideologi Islam menjadi identitas diri. Ketiga momentum tersebut yang kemudian berimplikasi menjadi peranserta politik yang berisi nilai dakwah serta perjuangan *syariah* dan *khilafah Islam*.

**Kata Kunci:** Hizbut Tahrir Indonesia, Gerakan Sosial Keagamaan, Islam, Ideologi, Peranserta politik, Partisipasi politik, Mobilisasi Politik, Ideologi, Konstruksi Sosial.

## **MOTTO & LEMBAR PERSEMBAHAN**

Sebaik Baik Manusia adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi  
Orang Lain

Nabi Muhammad SAW

What we know is a drop, what we don't know is an ocean

Issac Newton

Kebenaran suatu hal tidaklah ditentukan oleh berapa banyaknya  
orang yang mempercayainya

K.H. Ahmad Dahlan

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, Skripsi ini penulis  
persembahkan, kepada:

- Abi dan Umi penulis; Asep Didi Kurnia dan Rosmala Septina.
- Kakak dan adik penulis; Mutia Rahma, Nur Asy Syifa Daiyah  
Fillah, Muhammad Muhyiddin Rabbani, dan Hasan Alauddin  
Rabbani.
- Nenek penulis; Uka.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbi'l'alamin. Pertama-tama penulis memanjatkan puji dan syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT karena atas nikmatnya penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Yang juga salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa petunjuk yang diberikan-Nya agar kita selalu menelaah dan mencari ilmu pengetahuan di muka bumi ini.

Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial Strata 1 (S. Sos). Kemudian judul yang diangkat dalam penulisan Skripsi ini "Peran Ideologi Dalam Peranserta Politik Hizbut Tahrir Indonesia." Skripsi kemudian menyajikan mengenai fenomena politik Hizbut Tahrir Indonesia dalam aktivitas politiknya terkait peranserta politik (partisipasi politik dan mobilisasi politik) dalam konteks Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) tahun 2014. Serta peran ideologi islam yang dianutnya dalam peranserta politiknya.

Dalam penyusunan Skripsi ini tidak akan mungkin selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuannya baik secara langsung maupun tidak langsung baik materil maupun moril. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak akan terselesaikan hanya dengan kemampuan dan kekuatan penulis seorang diri. Dan penulis menyadari Skripsi ini bisa diselesaikan dengan adanya bantuan semua pihak yang membantu dari awal pengerjaan sampai Skripsi ini selesai.

Terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang membantu memudahkan penyusunan Skripsi ini, yaitu;

1. Bapak Dr. Muhammad Zid, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta.
2. Bapak Dr. Robertus Robet, M.A selaku Koordinator Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta dan sebagai Penguji Ahli pada sidang Skripsi penulis. Walau dalam kesibukannya, turut hadir dan juga memberikan bimbingan pada sidang Skripsi dengan masukan-masukan terkait perbaikan Skripsi. Sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan semaksimal mungkin.
3. Bapak Abdi Rahmat, M.Si selaku Dosen Pembimbing satu (I) Skripsi ini yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan motivasi agar Skripsi ini dapat diselesaikan. Walaupun dalam kesibukannya mengajar dan aktivitas lainnya, dapat membimbing penulis menyusun Skripsi ini. Sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan semaksimal mungkin.
4. Bapak Ubedilah Badrun, M.Si selaku Dosen Pembimbing dua (II) Skripsi ini. Walau dalam kesibukannya, memberikan bimbingan pada penulisan Skripsi dengan masukan terkait pengarahan konsep dan pengarahan

penulisan pada bab empat (IV) Skripsi ini. Sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan semaksimal mungkin.

5. Bapak Abdul Rahman Hamid, SH., MH selaku Ketua Sidang Skripsi penulis. Ditengah kesibukannya yang padat, turut hadir dan memberikan masukan terkait perbaikan Skripsi. Ucapan terima kasih pula karena telah memberikan keputusan lulus dalam sidang Skripsi penulis.
6. Bapak Achmad Siswanto, M.Si selaku Sekretaris Sidang Skripsi penulis yang memberikan masukan terkait teknis penulisan dalam rangka penyempurnaan Skripsi agar menjadi karya ilmiah yang layak sesuai dengan ketentuan penulisan karya ilmiah.
7. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen-dosen sosiologi, Bu Evy, Bu Dian, Bu Yanti, Bu Ika, Bu Rosita, Bu dini, Bu Titi, Bu Ajeng, Bu Devi, Prof. Suryani, Pak Eman, Pak Mugis, Pak Rahmat, Pak Syaifudin, Pak Tarmiji, Pak Komar, dan Dosen-Dosen yang lain. Selain itu juga kepada Staff Jurusan Sosiologi Mbak Mega dan Mbak Tika serta seluruh Staff Fakultas Ilmu Sosial.
8. Untuk para Pustakawan dan Pustakawati Perpustakaan UPT UNJ, PERPUSDA DKI Jakarta, Laboratorium Sosiologi UNJ, dan Perpustakaan Pusat UI yang telah banyak menyediakan dan melayani dalam pencarian bahan bacaan referensi terkait konseptual maupun tinjauan pustaka.
9. Kepada kedua orang tua, Umi dan Abi yang selalu memberikan dukungan motivasi materill maupun moril dalam proses penyusunan Skripsi ini. Yang tidak pernah lelahnya dalam mendukung penulis dalam penyusunan Skripsi hingga dapat diselesaikan dengan maksimal. Serta kepada 2 Kakak penulis dan 2 Adik penulis.
10. Penulis tidak lupa berterima kasih untuk teman-teman seangkatan Sosiologi Pembangunan Reguler 2012 Universitas Negeri Jakarta yang saling memberi motivasi dalam proses penyusunan dan pengerjaan. Penulis kemudian juga berterima kasih khusus ditunjukkan kepada Darisman, Dhani Pratama, Nur Ali Hidayatullah, Muhammad Fadli, dan Afdhal yang memberikan motivasi dan masukan besar dalam penulisan Skripsi ini sehingga bisa lebih maksimal.

Untuk penutup pengantar ini, penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan serta kesalahan dari materi ataupun cara penyajiannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca.

Jakarta, Februari 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

|  | Halaman    |
|--|------------|
| <b>LEMBAR ORISINALITAS .....</b>                               | <b>i</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>                          | <b>ii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>iii</b> |
| <b>MOTTO &amp; LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>                    | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                    | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                     | <b>x</b>   |
| <b>DAFTAR SKEMA .....</b>                                      | <b>xi</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                      | <b>xii</b> |
| <br>   |            |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                       |            |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....                               | 1          |
| 1.2 Permasalahan Penelitian .....                              | 10         |
| 1.3 Tujuan dan Signifikasi Penelitian .....                    | 11         |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian .....                                  | 11         |
| 1.3.2 Signifikasi Penelitian .....                             | 11         |
| 1.4 Tinjauan Pustaka .....                                     | 12         |
| 1.5 Kerangka Konsep/Kerangka Teori .....                       | 29         |
| 1.5.1 Konsep Gerakan Sosial .....                              | 29         |
| 1.5.2 Konsep Gerakan Sosial Keagamaan .....                    | 36         |
| 1.5.2.1 Gerakan Sosial Keagamaan .....                         | 36         |
| 1.5.2.1.1 Organisasi Agama dan Aktivitas<br>Gerakan .....      | 36         |
| 1.5.2.1.2 Organisasi dan Ideologi .....                        | 37         |
| 1.5.3 Konsep Ideologi .....                                    | 39         |
| 1.5.4 Konsep Peranserta Politik .....                          | 47         |
| 1.5.4.1 Partisipasi Politik .....                              | 48         |
| 1.5.4.2 Mobilisasi Politik .....                               | 54         |
| 1.5.5 Teori Konstruksi Sosial .....                            | 55         |
| 1.6 Metodologi Penelitian .....                                | 61         |
| 1.6.1 Subjek Penelitian .....                                  | 62         |
| 1.6.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....                        | 64         |
| 1.6.3 Peran Peneliti .....                                     | 64         |
| 1.6.4 Teknik Pengumpulan Data .....                            | 65         |
| 1.7 Sistematika Penulisan .....                                | 71         |
| <br>   |            |
| <b>BAB II GERAKAN SOSIAL KEAGAMAAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA</b> |            |
| 2.1 Pengantar .....  | 73         |
| 2.2 Gerakan Sosial Keagamaan Hizbut Tahrir Indonesia .....     | 74         |

|  |     |
|--|-----|
| 2.2.1 Sejarah Hizbut Tahrir .....                            | 74  |
| 2.2.2 Hizbut Tahrir Indonesia .....                          | 76  |
| 2.3 Formulasi Nilai Islam Hizbut Tahrir Indonesia .....      | 80  |
| 2.3.1 Mabda Islam .....                                      | 80  |
| 2.3.2 Islam sebagai Landasan Gerakan .....                   | 87  |
| 2.3.2.1 Memenuhi Seruan Allah SWT .....                      | 87  |
| 2.3.2.2 Realitas Umat Islam .....                            | 89  |
| 2.3.2.3 Aktivitas Mendirikan Negara Khilafah .....           | 90  |
| 2.3.3 Aktivitas Islam Politik .....                          | 92  |
| 2.3.3.1 Pembinaan Tsaqafah Murakazzah .....                  | 92  |
| 2.3.3.2 Pembinaan Tsaqafah Jamaiah .....                     | 95  |
| 2.3.3.3 Perang Pemikiran .....                               | 96  |
| 2.3.3.4 Perjuangan Politik .....                             | 97  |
| 2.3.3.5 Mengangkat dan Menetapkan Kemaslahatan<br>Umat ..... | 99  |
| 2.4 Penutup .....  | 100 |

### **BAB III PERANSERTA HIZBUT TAHRIR INDONESIA DALAM ARENA POLITIK**

|  |     |
|--|-----|
| 3.1 Pengantar .....  | 101 |
| 3.2 Peranserta Politik Hizbut Tahrir Indonesia pada Pileg<br>dan Pilpres 2014 .....                      | 102 |
| 3.2.1 Partisipasi Politik Hizbut Tahrir Indonesia .....  | 102 |
| 3.2.2 Mobilisasi Politik Hizbut Tahrir Indonesia .....   | 110 |
| 3.3 Pandangan Aktivistis Hizbut Tahrir Indonesia terhadap Peranserta politik<br>dan Ideologi Islam ..... | 113 |
| 3.3.1 Dakwah Politik Hizbut Tahrir Indonesia sebagai<br>Peranserta Politik .....                         | 113 |
| 3.3.2 Penerapan Ideologi Islam dalam Gerakan Dakwah<br>Politik .....                                     | 122 |
| 3.3.2.1 Ideologi Islam sebagai Ideologi yang sesuai Akal<br>dan Fitrah Manusia .....                     | 122 |
| 3.3.2.2 Ideologi dan Khilafah Islamiyah .....  | 125 |
| 3.4 Penutup .....  | 130 |

### **BAB IV KONSTRUKSI IDEOLOGI ISLAM DALAM PERANSERTA POLITIK DAN KRITIK TERHADAP PERANSERTA POLITIK HIZBUT TAHRIR INDONESIA**

|  |     |
|--|-----|
| 4.1 Pengantar .....  | 131 |
| 4.2 Konstruksi Ideologi Islam dalam Peranserta Politik Hizbut Tahrir<br>Indonesia .....                      | 132 |
| 4.2.1 Eksternalisasi: Peranserta Politik sebagai Sosialisasi Ideologi Islam<br>Hizbut Tahrir Indonesia ..... | 132 |

|  |            |
|--|------------|
| 4.2.2 Obyektivasi: Hizbut Tahrir Indonesia sebagai Institusionalisasi Ideologi Islam .....             | 136        |
| 4.2.3 Internalisasi: Ideologi Islam Hizbut Tahrir Indonesia sebagai Identitas Diri .....               | 138        |
| 4.3 Ideologi Islam dalam Tipe Gerakan Sosial Hizbut Tahrir Indonesia ...                               | 142        |
| 4.4 Kritik Peranserta Politik Hizbut Tahrir Indonesia .....  | 146        |
| 4.4.1 Politik Kritik Hizbut Tahrir Indonesia .....   | 146        |
| 4.4.2 Sistem Demokrasi vs Sistem Khilafah Islamiyah: Ketidak Konsistenan Hizbut Tahrir Indonesia ..... | 149        |
| 4.5 Penutup .....  | 153        |
| <br>   |            |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>  |            |
| 5.1 Kesimpulan .....   | 155        |
| 5.2 Saran .....  | 157        |
| <br>   |            |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>158</b> |
| <b>GLOSARIUM .....</b>   | <b>161</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>  | <b>162</b> |
| <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>   | <b>174</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|  | Halaman |
|--|---------|
| Gambar II.1 Legalitas Hizbut Tahrir Indonesia .....  | 77      |
| Gambar II.2 DPP Hizbut Tahrir Indonesia .....  | 78      |
| Gambar III.1 Pemilihan Menurut HTI pada Sindonews.com .....  | 104     |
| Gambar III.2 Cover Majalah Al Waie Februari 2014 .....   | 112     |
| Gambar III.3 Cover Majalah Al Waie April 2014 .....  | 112     |
| Gambar III.4 Artikel Persatuan Umat dan Penerapan Kaffah Tidak Bisa<br>Diwujudkan Tanpa Khilafah ..... | 118     |
| Gambar III.5 Artikel Perubahan Secara Besar Tak Melalui Jalan<br>Demokrasi .....                       | 118     |
| Gambar III.6 Artikel Demokrasi Memecah Belah Umat .....  | 119     |
| Gambar III.7 Artikel Jokowi dan Prabowo Satu Perahu .....  | 119     |
| Gambar III.8 Artikel Islam Bakal Menang Atas Semua Agama .....   | 120     |
| Gambar III.9 Artikel Demokrasi Tak Sejahterakan Masyarakat .....                                       | 120     |
| Gambar III.10 Artikel Jalan Umat .....   | 120     |

## DAFTAR SKEMA

|  | Halaman |
|--|---------|
| Skema I.1 Kerangka Berfikir Skripsi .....                                    | 9       |
| Skema I.2 Peta Studi Penelitian Hizbut Tahrir .....                          | 27      |
| Skema II.1 Kerangka Berfikir Mabda Islam Hizbut Tahrir .....                 | 86      |
| Skema IV.1 Konstruksi Sosial Ideologi Islam Hizbut Tahrir<br>Indonesia ..... | 141     |

## DAFTAR TABEL

|            | Halaman   |
|------------|---|
| Tabel I.1  | Tinjauan Pustaka ..... 25                             |
| Tabel I.2  | Data Informan ..... 63                                |
| Tabel IV.1 | Tipe Gerakan Sosial Hizbut Tahrir Indonesia ..... 145 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Bagi pemeluk agama Islam, Islam bukanlah sekedar agama yang menghubungkan individu dan Tuhannya saja (Allah SWT). Lebih dari pada itu, Islam dianggap sebagai pedoman hidup atau Ideologi bagi pemeluknya yang meliputi segala aspek kehidupan. Namun dalam kenyataannya, Islam sebagai pedoman hidup banyak ditinggalkan atau diabaikan. Hal ini kemudian juga terlihat pada Indonesia dimana aspek-aspek kehidupan seperti aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek politik, nilai Islam tidak diterapkan. Nilai Islam atau paham Islam tergantikan oleh nilai-nilai atau paham-paham sekulerisme, kapitalisme, maupun neo-imperialisme.

Agama Islam, sebagaimana agama dalam pengertian Barat, hanya ditempatkan dalam urusan individu dengan tuhannya saja. Agama hanya berperan pada saat shalat, puasa, zakat, haji, kelahiran, pernikahan dan kematian. Sementara dalam urusan sosial-kemasyarakatan, ekonomi, politik, dan kenegaraan, agama (Islam) ditinggalkan. Hal ini kemudian menjauhkan para pemeluk agama islam terhadap nilai-nilai islam yang seharusnya berada pada segala segi kehidupan pemeluk agama Islam.

Realitas pemeluk islam yang mengalami degradasi nilai Islam kemudian menghasilkan tanggapan-tanggapan dalam berbagai aspek, mulai dari aspek sosial-budaya, ekonomi, maupun politik. Respon tersebut berasal dari berbagai bentuk baik

dari tanggapan melalui individu maupun melalui organisasi masyarakat atau gerakan sosial. Pada salah satu tanggapannya ialah dengan bentuk gerakan sosial yang bergerak pada aspek politik

Dalam sebuah karya ilmiah *Gerakan Politik Islam Hizbut Tahrir di Indonesia Pada Era Pasca Reformasi*, Agung Wijaksono menjelaskan bahwa muncul sebuah gerakan sosial yang berbeda dari gerakan sosial yang telah ada. Agung mengatakan:<sup>1</sup>

Gerakan sosial ini berbeda dari arus besar gerakan sosial islam yang tidak formalistik sebagaimana ditampilkan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang selama ini yang berada di ranah sosial-budaya. Gerakan Sosial Keagamaan ini memiliki basis ideologi, pemikiran, dan strategi gerakan yang berbeda dengan ormas-ormas Islam atau gerakan sosial keagamaan yang telah ada sebelumnya. Karena gerakan ini bergerak pada urusan atau ranah politik, dengan memperjuangkan penerapan syari'at Islam secara formal dalam kehidupan negara atau pemerintah.

Pada salah satu contoh gerakan sosial keagamaan yang bergerak pada aspek politik tersebut ialah Hizbut Tahrir atau Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir Indonesia sebagai gerakan sosial atau organisasi masyarakat memiliki suatu hal yang berbeda dan menarik dari gerakan sosial atau organisasi masyarakat lainnya di Indonesia.

Agung Wijaksono kemudian juga mengatakan dalam karya *Gerakan Politik Islam Hizbut Tahrir di Indonesia Pada Era Pasca Reformasi*, bahwa:<sup>2</sup>

Hizbut Tahrir Indonesia memiliki karakter yang lebih militan, radikal, skripturalis, konservatif, dan eksklusif. Serta mereka berusaha dengan gigih untuk memperjuangkan formalisasi syari'at Islam dalam institusi negara (pemerintahan).

---

<sup>1</sup> Agung Wijaksono, "Gerakan Politik Islam Hizbut Tahrir Di Indonesia Pada Era Pasca Reformasi" dalam *Jurnal Jom FISIP*, Vol 1, No 2, 2014, hlm 2, diakses melalui <http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/issue/view/297/showToc> pada tanggal 15/Oktober/2016.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Pada Hizbut Tahrir Indonesia dalam deklarasinya menyatakan diri mereka adalah sebuah partai politik, namun secara resmi di Indonesia ia merupakan organisasi masyarakat (organisasi kemasyarakatan) bukan sebagai partai politik. Hizbut Tahrir Indonesia tidak menjalankan aktivitas politik praktis dalam parlemen maupun pemerintah.<sup>3</sup> Dalam legalitasnya terdaftar di Kementrian Dalam Negeri dengan Nomor 44/D.III.2/VI/2006.<sup>4</sup>

Pada aktivitas yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia ialah aktivitas politik yang mengacu pada ideologi (*mabda*) Islam. Hal ini terlihat pada aktivitas politiknya yang berupa pemikiran-pemikiran Islam, hukum-hukum islam, solusi-solusi islam untuk diamalkan, dan diwujudkan dalam realitas kehidupan, negara dan masyarakat. Pemikiran Islam sendiri ialah setiap pemikiran yang digali dari Islam. Pemikiran Islam mencakup pemikiran tentang akidah dan pemikiran tentang *syariat* (sistem hukum).

Hizbut Tahrir Indonesia dalam aktivitas politiknya kemudian cenderung hanya dengan berupa sumbangan pemikiran-pemikiran yang bersifat situasional. Hal ini terlihat dimana hanya fenomena-fenomena tertentu saja mereka melakukan aktivitas politiknya atau pemikiran politiknya, seperti: diskusi pemikiran khilafah, diskusi pemikiran hukum syara, masukan pemikiran perancangan UU Ormas, masukan

---

<sup>3</sup> Zainal Abidin, "Gerakan Politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sebagai Organisasi Islam Ekstra Parlementer Di Indonesia Pasca Reformasi", dalam *Skripsi Jurusan Jinayah Siyarah, Fakultas Syari'ah*, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2010), hlm 78, diakses melalui <http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-zainalabid-4570> pada tanggal 24/Oktober/2016.

<sup>4</sup> Agung Wijaksono, *Loc. Cit.*

pemikiran perancangan UU Anti-Terrorisme, masukan pemikiran perancangan UU Miras, dan lain sebagainya.

Aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia tersebut bergerak didasarkan dengan formulasi ide dasar (*fikrah*) dan metode gerakan (*thariqah*) yang mengacu pada ideologi Islam (*mabda* Islam).<sup>5</sup> Para anggota Hizbut Tahrir menyatakan satu-satunya ideologi (*mabda*) yang benar ialah *mabda* Islam. *Mabda* yang muncul dalam benak manusia melalui wahyu Allah (Al Qur'an) adalah *mabda* yang benar. Karena bersumber dari *Al-Khaliq*, yaitu Pencipta alam, manusia, dan hidup, yakni Allah SWT.<sup>6</sup>

Taqiyuddin An-Nabhani dalam bukunya *Peraturan Hidup Dalam Islam* menjelaskan:<sup>7</sup>

Dalam *mabda* Islam, maka tujuan-tujuan utama untuk menjaga masyarakat bukan ditentukan oleh manusia, akan tetapi berasal dari perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya. Aturan ini selalu tetap keadaannya, tidak akan pernah berubah dan berkembang. Karena itu, melestarikan eksistensi manusia, menjaga akal, kehormatan, jiwa, kepemilikan individu, agama, keamanan dan negara, merupakan tujuan-tujuan utama yang sudah baku, tidak akan pernah berubah atau berkembang.

Fenomena Hizbut Tahrir sebagai sebuah gerakan sosial keagamaan menjadi sebuah studi ilmiah yang telah banyak diteliti baik di mancanegara maupun di Indonesia. Namun dalam penelitian-penelitian yang telah dilakukan, pada aspek sosio politik kecenderungan hanya dikaji dengan analisis/konsep-konsep seperti: gerakan sosial; mobilisasi politik; maupun konsep perilaku politik. Hal ini terlihat

---

<sup>5</sup> Taqiyuddin An-nabhani, *Peraturan Hidup Dalam Islam*, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2013), hlm 47.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

dari tinjauan pustaka yang dilakukan penulis dimana konsep-konsep tersebutlah yang digunakan dalam penelitian Hizbut Tahrir sebelumnya. Pada salah satu konsep yang jarang digunakan pada studi Hizbut Tahrir ialah terkait partisipasi politik yang dilakukan para aktivis dan kadernya.

Pada partisipasi politik hal ini sangatlah penting bagi sebuah organisasi masyarakat politik atau dalam konteks ini ialah Hizbut Tahrir atau Hizbut Tahrir Indonesia. Partisipasi politik sebagai suatu hal yang sangat penting ini dapat dilihat dari definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Beberapa ahli yang mendefinisikan partisipasi politik ialah Herbert McClosky, Samuel P. Huntington, dan Joan Nelson.

Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi, dalam bukunya *Political Participation: International Encyclopedia of the Social Sciences* (1972), berpendapat:<sup>8</sup>

Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam prose pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Pada tokoh lainnya, Samul P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam buku *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* (1977), memberi tafsiran:<sup>9</sup>

Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

---

<sup>8</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm 367.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 368.

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, dalam partisipasi politik hal ini kemudian dapat dimaknai bersama dengan konsep mobilisasi politik.<sup>10</sup> Konsep mobilisasi politik sendiri diartikan suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak (individu/kelompok) kepada pihak lainnya (individu/kelompok) dalam rangka pengikutsertaan partisipasi dalam proses politik yang memiliki tujuan tertentu (tujuan politik). Pemaknaan bersama partisipasi politik dan mobilisasi politik kemudian menjadi peranserta politik. Peranserta politik mengandung arti terlibat tanpa perlu memperhatikan motivasi dari keterlibatan tersebut.<sup>11</sup> Peranserta politik yang merupakan gabungan aktivitas partisipasi politik dan mobilisasi politik.

Pada salah satu bentuk yang umum dalam menyalurkan peranserta politik ialah dalam proses pemilihan penguasa maupun pemberian suara dalam pemilihan umum. Pemilihan umum menjadi ajang politik praktis yang kemudian dapat terlihat jelas bentuk-bentuk peranserta politik (partisipasi politik dan mobilisasi politik) yang dilakukan para individu maupun sebuah organisasi. Dalam konteks Indonesia, salah satu bentuk tersebut yang paling besar dan belum lama dilakukan ialah Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) tahun 2014. Pada ajang Pileg dan Pilpres tahun 2014, memiliki kontribusi atau dampak yang besar pada masalah orang banyak. Hal ini dikarenakan Pileg dan Pilpres tahun 2014 dilakukan dalam rangka memilih anggota legislatif (DPR) dan Presiden serta Wakil Presiden Indonesia sampai masa jabatan 2019.

---

<sup>10</sup> Arbi Sanit, *Swadaya Politik Masyarakat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hlm 93.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 94.

Pada sebuah peranserta politik tentulah kemudian terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktornya ialah ideologi. Pada Hizbut Tahrir Indonesia hal ini kemudian dapat dijumpai pada ideologi (*mabda*) islam yang dianutnya. Pada peranserta politik dan ideologi ini kemudian dapat dikaji dengan konsep konstruksi sosial (Peter L. Berger). Konsep konstruksi sosial berasal dari pemahaman dialektis dimana masyarakat adalah suatu produk manusia, lain tidak, yang akan selalu memberi tindak-balik kepada prosedurnya.<sup>12</sup> Masyarakat tidak mempunyai bentuk lain kecuali bentuk yang telah diberikan kepadanya oleh aktivitas kesadaran manusia. Jadi, dapat dikatakan masyarakat adalah produk manusia dan manusia adalah produk masyarakat, tidaklah berlawanan.<sup>13</sup>

Proses dialektik fundamental dari masyarakat kemudian terdiri dari tiga momentum, atau langkah yaitu *eksternalisasi*, *obyektivasi*, dan *internalisasi*.<sup>14</sup> *Eksternalisasi* adalah suatu pencurahan kedirian manusia secara terus-menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas dffisis maupun mentalnya. *Obyektivasi* adalah disandangnya produk-produk aktivitas itu (baik fisis maupun mental), suatu realitas yang berhadapan dengan produsernya semula, dalam bentuk suatu kefaktaan (*faktisistas*) yang eksternal terhadap, dan lain dari, para produser itu sendiri. *Internalisasi* adalah peresapan kembali realitas tersebut oleh manusia, dan

---

<sup>12</sup> Peter L Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1991), hlm 3.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 4.

<sup>14</sup> *Ibid*.

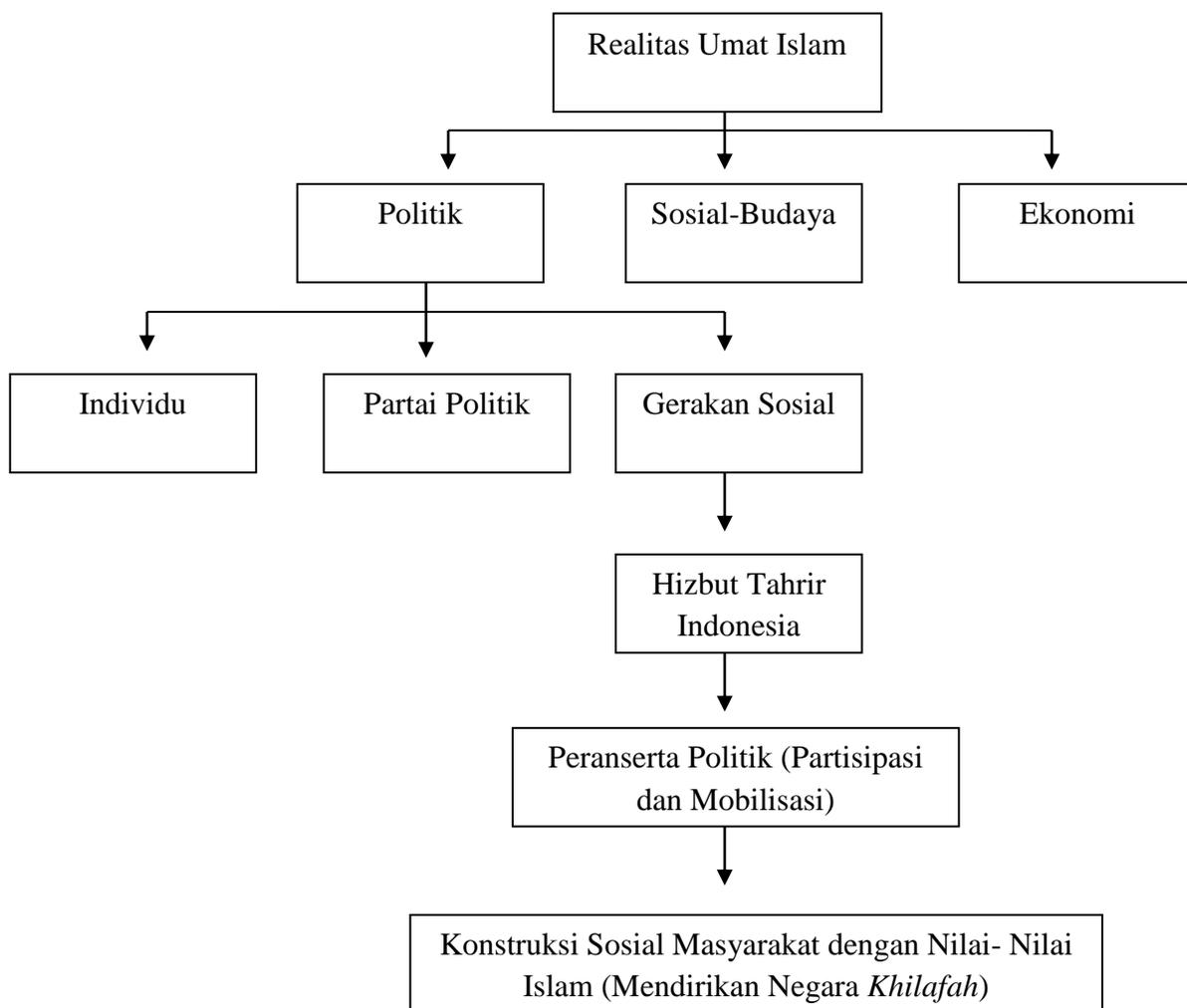
mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-struktur dunia *obyektif* ke dalam struktur-struktur kesadaran *subyektif*.<sup>15</sup>

Skripsi ini kemudian mengkaji lebih dalam aktivitas politiknya terkait peranserta (partisipasi dan mobilisasi) Hizbut Tahrir Indonesia dalam konteks Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) tahun 2014. Apakah peranserta (partisipasi dan mobilisasi) mereka hanya pada pemikiran politik atau terdapat bentuk lainnya. Dalam hal lainnya penulis juga mengkaji peran ideologi yang dianutnya dalam peranserta politiknya.

Pada penelitian peran ideologi dalam peranserta politik Hizbut Tahrir Indonesia merupakan penelitian yang penting karena mengkaji hal baru terkait peran ideologi dan bentuk-bentuk peranserta politik yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Pada penelitian ini, para aktivis dan anggota Hizbut Tahrir Indonesia juga dimaknai sebagai pribadi yang rasional, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang kurang memperhatikan peranserta aktivis dan anggota sebagai pribadi yang rasional. Hal lainnya yang menjadikan penelitian ini penting juga karena bermanfaat untuk mengetahui landasan apa yang mendasari peranserta politik yang dilakukan. Pada studi kasus yang dipilih kemudian juga menjadi suatu hal yang penting karena Pemilu sebagai bentuk partisipasi konvensional dan memiliki kebermanfaatan yang besar bagi kemaslahatan masyarakat.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

**Skema I.1: Kerangka Berfikir**

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2016)

## 1.2 Permasalahan Penelitian

Hizbut Tahrir Indonesia dalam deklarasinya selalu menyebutkan bahwa mereka merupakan sebuah partai politik, yang islam adalah ideologinya dan politik adalah aktivitasnya. Namun dalam kenyataannya Hizbut Tahrir Indonesia tidak menjalankan aktivitas politik praktis dalam parlemen maupun pemerintah. Hizbut Tahrir Indonesia melakukan aktivitas politik cenderung hanya dengan berupa sumbangan pemikiran politik yang bersifat situasional. Hal ini terlihat dimana hanya fenomena-fenomena tertentu saja mereka melakukan aktivitas politiknya atau pemikiran politiknya, seperti: diskusi pemikiran khilafah, diskusi pemikiran hukum syara, masukan pemikiran perancangan UU Ormas, masukan pemikiran perancangan UU Anti-Terrorisme, masukan pemikiran perancangan UU Miras, dan lain sebagainya.

Melihat fenomena politik Hizbut Tahrir Indonesia tersebut, penulis kemudian tertarik mengkaji lebih dalam aktivitas politiknya terkait peranserta (partisipasi dan mobilisasi) Hizbut Tahrir Indonesia dalam konteks Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) tahun 2014. Apakah peranserta (partisipasi dan mobilisasi) mereka hanya pada pemikiran politik atau terdapat bentuk lainnya. Dari hal tersebut, maka didapat rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini;

1. Bagaimana Hizbut Tahrir Indonesia sebagai Gerakan Sosial ?
2. Bagaimana Peranserta Politik Hizbut Tahrir Indonesia pada Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) tahun 2014 ?
3. Bagaimana Peran Ideologi dalam Peranserta Politik Hizbut Tahrir Indonesia pada Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) tahun 2014 ?

### **1.3 Tujuan dan Signifikasi Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan**

Mengacu pada permasalahan penelitian yang diteliti, skripsi ini kemudian terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh penulis. Pada tujuan pertama penelitian ini ialah untuk mengetahui peranserta politik Hizbut Tahrir Indonesia pada Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) tahun 2014. Penulis ingin mengetahui bentuk-bentuk aktivitas peranserta politik (partisipasi politik dan mobilisasi politik) baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh para aktivis dan anggota Hizbut Tahrir Indonesia pada sebelum dan saat Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) tahun 2014. Pada tujuan kedua penelitian ini kemudian ialah untuk mengetahui peran ideologi terhadap peranserta politik Hizbut Tahrir Indonesia. Penulis ingin mengetahui bagaimana ideologi yang mereka anut dimaknai oleh aktivis dan anggota Hizbut Tahrir Indonesia kedalam aktivitas politik atau peranserta politik yang dilakukannya terkhusus pada saat Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) tahun 2014.

#### **1.3.2 Signifikasi Penelitian**

Signifikasi dari penelitian ini adalah memberikan penjelasan mengenai realita nyata mengenai Hizbut Tahrir Indonesia sebagai gerakan sosial keagamaan dan peranserta politik yang dilakukannya terkhusus oleh para Informan. Hal pertama yang akan dikaji ialah mengenai Hizbut Tahrir Indonesia sebagai sebuah organisasi masyarakat keagamaan ataupun gerakan sosial keagamaan. Hal ini kemudian akan

dikaji lebih lanjut mengenai ideologi Hizbut Tahrir Indonesia dalam melakukan kegiatan serta aktivitas politik yang dilakukan. Peranserta politik Hizbut Tahrir Indonesia kemudian akan menjadi topik utama yang diteliti. Hal tersebut kemudian dapat diketahui bagaimana ideologi Hizbut Tahrir Indonesia dengan peranserta politik yang dilakukannya. Dalam penelitian ini juga akan diidentifikasi aspek-aspek sosiologis dalam ideologi dengan peranserta politik yang dilakukannya. Hal-hal tersebut dikaji lebih dalam dengan konsep konstruksi sosial terkait eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan wacana dan dapat dijadikan kajian ilmiah dan dasar bagi penelitian selanjutnya.

#### **1.4 Tinjauan Pustaka**

Seperti yang sudah dijelaskan pada pokok permasalahan, penelitian ini akan memusatkan perhatian pada ideologi Hizbut Tahrir Indonesia dan peranseta politik yang dilakukannya. Dalam kaitannya penelitian dan kajian terhadap Hizbut Tahrir maupun Hizbut Tahrir Indonesia telah banyak dilakukan. Dalam penelitian mengenai Hizbut Tahrir atau Hizbut Tahrir Indonesia tersebut terdapat beberapa fokus penelitian atau pokok permasalahan yang sering diangkat dalam pengkajiannya seperti; model gerakan atau mobilisasi politik pada Hizbut Tahrir; perilaku politik atau sikap politik; dan juga pandangan *khilafah islamiyah* Hizbut Tahrir.

Tinjauan pustaka ini kemudian terdapat delapan literatur yang digunakan dalam tinjauan. Pertama, *Gerakan Hizbut Tahrir dan Realitas Politik Islam Kontemporer di*

*Indonesia* oleh Jonkennedi. Kedua, *Gerakan Islam Politik Fundamentalis: Kasus Hizbut Tahrir Indonesia di Surabaya* oleh Rakhmat Nur Hakim. Ketiga, *Gerakan Politik Islam Hizbut Tahrir Di Indonesia Pada Era Pasca Reformasi* oleh Agung Wijaksono. Keempat, *Gerakan Politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sebagai Organisasi Islam Ekstra Parlementer di Indonesia Pasca Reformasi* oleh Zainal Abidin. Kelima, *Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia* oleh Sudarno Shobron. Keenam, *Model Sikap terhadap Penegakan Khilafah-Syariah di Indonesia* oleh Tutut Chusniyah. Ketujuh, *Analisis Terhadap Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir* oleh Dedit Slametriyadi. Dan terakhir, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir Dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah* oleh Muhammad Muhsin Rodhi.

Pada penelitian “*Gerakan Hizbut Tahrir dan Realitas Politik Islam Kontemporer di Indonesia*”<sup>16</sup>, Jonkennedi menguraikan Hizbut Tahrir adalah sebuah gerakan Islam baru dalam percaturan politik nasional, organisasi ini menganggap politik sebagai aktivitasnya dan Islam sebagai mazhabnya. Politik merupakan kegiatannya, dan Islam adalah ideologinya. Hizbut Tahrir merupakan kelompok politik yang hingga kini di Indonesia belum menyebut dirinya sebagai gerakan politik (partai).

Analisis penelitian kemudian diketahui, Gerakan Hizbut Tahrir yang berorientasi pada perwujudan Islam dalam pengertian yang formalistik berpotensi

---

<sup>16</sup> Jonkennedi, “Gerakan Hizbut Tahrir Dan Realitas Politik Islam Kontemporer Di Indonesia” dalam *Jurnal Komunika*, Vol 6, No 1, 2012, hlm 3, diakses melalui <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/komunika/article/view/348> pada tanggal 16/Oktober/2016.

menimbulkan persoalan serius. Salah satu strategi utama perwujudan cita-cita politik adalah melalui pengambil alihan (*Istilamil Hukmi*) kekuasaan yang menekankan pada aksi-aksi progresif menguasai kekuasaan politik suatu negara. Bagi Hizbut Tahrir, Islam tidak akan tegak dalam suatu negara tanpa ada dukungan secara formal dari negara tersebut.

Hasil analisis selanjutnya, diketahui bahwa kelompok afiliasi islam di Indonesia terbelah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang secara eksplisit meniscayakan hubungan formal antara Islam dan negara. Bagi kelompok ini, Islam harus diformalisasi melalui kekuasaan negara. Dengan pola ini, negara memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan bahkan memaksakan pelaksanaan *syari'at* Islam kepada warganya. Kelompok kedua adalah mereka yang lebih menekankan pada substansi ajaran Islam dalam penyelenggaraan negara. Bagi kelompok ini, formalisasi Islam tidak terlalu penting bahkan tidak perlu. Hal yang diperjuangkan adalah akomodasi prinsip-prinsip *syari'at* Islam dalam undang-undang dan praktik kenegaraan.

Penelitian lainnya, Rakhmat Nur Hakim "*Gerakan Islam Politik Fundamentalis: Kasus Hizbut Tahrir Indonesia di Surabaya*"<sup>17</sup> juga menjelaskan mengenai model gerakan atau mobilisasi politik yang dilakukan HTI. Dalam Penelitian ini, Rakhmat Nur Hakim bertujuan untuk mendeskripsikan secara kualitatif

---

<sup>17</sup> Rakhmat Nur Hakim, "Gerakan Islam Politik Fundamentalis: Kasus Hizbut Tahrir Indonesia Di Surabaya" dalam *Jurnal Review Politik*, Vol 4, No 2, 2014, hlm 224, diakses melalui <http://jurnalpolitik.uinsby.ac.id/index.php/jurnalpolitik/article/download/44/43> pada tanggal 10/Oktober/2016.

tentang kondisi politik yang mendasari pengembangan gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Surabaya, mulai dari mobilisasi sampai *framing*, yang dilakukan untuk menjaga kelangsungan gerakan.

Penjelasan gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Surabaya, Rakhmat Nur Hakim menjelaskan kemunculan dan perkembangan gerakan tersebut dengan menggunakan teori gerakan sosial. Teori gerakan sosial ini khususnya yang dikemukakan oleh Doug McAdam. McAdam menyatakan bahwa gerakan sosial dapat berlangsung dengan mempertimbangkan *Political Opportunity Structure* (POS) yang ada.<sup>18</sup> Selanjutnya gerakan yang telah muncul akan mengorganisir sumber dayanya untuk memobilisasi sumber dayanya dalam melakukan serangkaian aksi kolektif. Berikutnya gerakan akan terus bertahan dengan adanya proses *cultural framing* dari aktor gerakan kepada seluruh anggotanya untuk terus memperjuangkan cita-cita bersama melalui gerakan sosial tersebut. kerangka ini kemudian dikenal dengan teori *Political Opportunity Structure* (POS), *Resources Mobilization Theory* (RMT), dan *cultural framing*.

Pada hal lainnya terkait konsep Gerakan Islam Politik, Rakhmat Nur Hakim mengadopsi hal ini dari istilah yang dikemukakan oleh Masdar Hilmy, gerakan Islam politik atau gerakan Islamis secara terang-terangan menjadikan Islam sebagai ideologi. Artinya, mereka memandang Islam bukanlah semata-mata agama ritual. Bagi mereka, Islam adalah sebuah tatanan nilai yang mengatur jalannya seluruh aspek

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

kehidupan manusia. Mulai dari hubungan antara manusia dengan Tuhannya sehingga ke aspek sosial seperti ekonomi, politik, hukum, dan lain sebagainya.

Tinjauan pustaka selanjutnya, Zainal Abidin dalam skripsinya berjudul “*Gerakan Politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sebagai Organisasi Islam Ekstra Parleментар di Indonesia Pasca Reformasi*”<sup>19</sup> juga berfokus pada model gerakan yang dilakukan. Skripsi ini menggunakan perspektif empiris dalam melihat HTI sebagai organisasi ekstra parleментар. Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana sebuah kelompok yang mengidentifikasi dirinya sebagai partai politik berideologi Islam namun bergerak diluar sistem politik yang berlaku merupakan fenomena menarik untuk dieksplorasi. Orientasi politiknya yang lebih menekankan kesadaran masyarakat alih-alih kemenangan parlemen, pemikiran politiknya yang antidemokrasi, serta cita-citanya untuk menegakkan negara khilafah dan memberlakukan hukum Islam secara menyeluruh dan serentak sudah pasti menimbulkan keunikan tersendiri berkaitan dengan struktur dan kepemimpinan, fungsi politik, basis pendukung, Ideologi, dan cara-cara dalam melakukan perubahan.

Zainal Abidin juga menjelaskan HTI sebagai gerakan politik Islam modern yang memiliki paradigma integralistik dalam memandang hubungan antara agama dan politik. Kecenderungan integralistik ini memandang Islam sebagai suatu agama yang lengkap dengan aturan-aturan, petunjuk, bimbingan yang mengatur segala aspek kehidupan tiap hari, termasuk kehidupan bermasyarakat dan berpolitik, artinya bahwa korelasi antara agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

---

<sup>19</sup> Zainal Abidin, *Loc. Cit.*

dipisahkan. HTI memandang negara sebagai institusi operasional dalam menjalankan konstitusi, satu-satunya yang secara *syar'i* dijadikan alat untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam secara menyeluruh. Implementasinya syari'at sangat penting bagi pemulihan cara hidup Islami dan negara merupakan syarat penting untuk mencapai tujuan ini.

Berbeda dengan tinjauan pustaka sebelumnya yang hanya berfokus pada model gerakan saja, fokus penelitian pada karya Agung Wijaksono ini ialah perilaku politik dan model gerakan. Agung Wijaksono dalam "*Gerakan Politik Islam Hizbut Tahrir di Indonesia Pada Era Pasca Reformasi*"<sup>20</sup> menguraikan gerakan politik Islam Hizbut Tahrir di Indonesia pada era pasca reformasi. Dalam kajian ini Agung menjelaskan dengan perspektif empiris. Fokus penelitian ini berada pada aktivitas politik Islam yang dilakukan gerakan Islam baru Hizbut Tahrir Indonesia dalam era pasca reformasi. Politik Islam sendiri merupakan hasil penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku politik (*political behaviour*) serta budaya politik (*political culture*) yang berorientasi pada nilai-nilai Islam.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini, Agung Wijaksono menjelaskan politik sebagai aktifitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Kelompok ini dalam aktivitasnya kental akan aktivitas keislaman dan disebut sebagai kelompok pendukung cita-cita Islam. Pada kelompok

---

<sup>20</sup>Agung Wijaksono, *Loc. Cit.*

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 2.

politik Islam juga menekankan simbolisme keagamaan dalam berpolitik, seperti menggunakan lambang Islam dan istilah-istilah keislaman dalam peraturan dasar organisasi, khittah perjuangan, serta wacana politik.

Agung Wijaksono juga menjelaskan bagaimana HTI melaksanakan ide-ide dan gagasannya menggunakan gerakan perebutan kekuasaan. HTI berupaya menggiring opini masyarakat melalui media yang dibuatnya berupa media elektronik dan cetak. Dalam hal lainnya, HTI berusaha melakukan infiltrasi ke tengah-tengah masyarakat dengan cara menguasai arena-arena strategis dengan cara menguasai sumber daya strategis, diantaranya adalah masjid, kampus, instansi pemerintah dan swasta dan lain-lain. Hal tersebut dikarenakan HTI beranggapan bahwa setiap permasalahan yang terjadi adalah karena sistem negara Indonesia yang sekuler dan penegakkan syariat Islam dan khilafah merupakan solusinya.

Sudarno Shobron dalam penelitian “*Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia*”<sup>22</sup> menjelaskan orientasi gerakan organisasi Islam di Indonesia sangat beragam. Hal tersebut sesuai dengan corak pemikiran para pendiri atau penggeraknya dalam memahami ajaran Islam, sehingga dapat dipilah menjadi tiga orientasi gerakan; pertama, orientasi murni (dakwah); kedua, orientasi politik; ketiga, orientasi dakwah dan politik (dua sayap).

Sudarno Shobron kemudian mengkategorikan Hizbut Tahrir Indonesia dalam orientasi dakwah dan politik. Hal ini disebut dua sayap, yakni sayap dakwah dan

---

<sup>22</sup>Sudarno Shobron, “Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia” dalam *Jurnal Profetika*, Vol 15, No 1, 2014, hlm 48, diakses melalui <http://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/1966> pada tanggal 13/Oktober/2016.

sayap politik. Ini dapat dimaknai bahwa dakwah untuk kepentingan politik, dan politik dijadikan payung untuk berdakwah. Makna yang pertama bahwa semua aktivitas dakwahnya memiliki kepentingan politik yang pada akhirnya dijadikan pijakan untuk meraih kekuasaan. Makna yang kedua, politik dijadikan payung untuk berdakwah, artinya kalau kekuasaan telah berada dalam genggamannya, maka dijadikan sebagai alat untuk berdakwah melalui jalur instruksi dan pembuatan undang-undang, peraturan daerah, untuk berislam dengan baik.

Orientasi dua sayap ini memang memiliki nilai positif dan negatifnya. Nilai positifnya sebagai bentuk perwujudan dari kesempurnaan Islam, yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai negatifnya, dua sayap tersebut dapat mengurangi nilai luhur agama Islam itu sendiri, seolah-olah orientasinya hanya kekuasaan belaka.

Model dakwah, HTI mengikuti metode dakwah Rasulullah SAW, karena beliau adalah contoh teladan yang baik. HTI menerapkan operasionalisasi dakwah yang dibagi dalam tiga; pertama, tahap *tatsqif* (pembinaan dan pengkaderan); kedua, tahap *tafa'ul* (berinteraksi) dengan umat; dan ketiga, tahap *istilamu al-hukmi* (penerimaan kekuasaan). Tiga tahap model dakwah tersebut juga dijadikan sebagai strategi juga untuk meraih kekuasaan di Indonesia.

Berdasarkan strategi tersebut yang digunakan oleh HTI, maka ada dua strategi besar yang dimainkan oleh HTI yakni kultural dan struktural atau politik. Pada strategi kultural, ini dilakukan HTI melalui dakwah dan jihad. Dua hal ini dilakukan untuk mempengaruhi dan melakukan transformasi pemahaman umat akan pentingnya

tegaknya *khilafah islamiyah*. Sedangkan, strategi politik yang diusahakan oleh HTI untuk menegakkan *khilafah islamiyah* adalah dengan demonstrasi, sebagai media untuk membentuk opini publik, dengan tujuan mempengaruhi kebijakan pemerintah, atau memberikan masukan kepada pemerintah dalam membuat kebijakan politik, ekonomi, dan kebijakan yang menyangkut hidup orang banyak.

Penelitian lainnya “*Model Sikap terhadap Penegakan Khilafah-Syariah di Indonesia*”<sup>23</sup> karya Tutut Chasniyah, berbeda dengan tinjauan-tinjauan sebelumnya, ia berfokus pada sikap politik dan juga pandangan mengenai *khilafah islamiyah*. Dalam penelitian ini, Tutut tidak hanya melakukan penelitian kepada HTI saja, namun lebih luasnya kepada tiga kelompok Islam. Tiga kelompok Islamis tersebut yaitu JAT (Jamaah Anshoru Tauhid), MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia).

Tutut Chasniyah menjelaskan mengenai model sikap menggunakan teori motivasi kognisi sebagai pisau analisis. Teori motivasi kognisi-sosial/*motivation social-cognition theory*, sikap dan ideologi individu atau kelompok Islam politik dalam menegakkan khilafah-syariah disebabkan oleh tingginya kebutuhan untuk menolak ketidakpastian (*need of uncertainty avoidance*) dan kebutuhan untuk mengelola ancaman (*need of threat management*). Kedua kebutuhan psikologis ini merupakan kekuatan psikologis yang mendasari atau ada di belakang ideologi, sikap dan perilaku politik masyarakat.

---

<sup>23</sup>Tutut Chusniyah, “Model Sikap Terhadap Penegakan Khilafah-Syariah Di Indonesia” dalam *Jurnal Insan*, Vol 14, No 2, 2012, hlm 73, diakses melalui <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-artikel%201-14-2.pdf> pada tanggal 10/Oktober/2016.

Tutut Chasniyah menjelaskan bagaimana ideologi dapat menjawab kebutuhan untuk menolak ketidakpastian dan kebutuhan untuk mengelola ancaman. Dalam hal ini, ideologi yang dimaksud adalah ideologi salafi dan ideologi daulah Islam. Dengan memegang ideologi salafi ini, maka kebutuhan individu untuk menolak ketidakpastian akan terpuaskan. Karena ideologi salafi tidak saja memberi kepastian tentang bagaimana hidup dan berperilaku pada saat ini di bahkan ideologi salafi memberikan kepastian pada muslim akan kehidupan sesudah kematian. Sedangkan ideologi daulah islam merupakan ideologi yang memprotes dan melawan demokrasi Barat yang sekuler, yang bersifat imperialis-kolonialis dalam tradisi kristen-yahudi. Hal ini kemudian, Ideologi daulah Islam yang dimiliki oleh individu dapat membantu mengurangi perasaan ancaman bagi cara hidup islam oleh sistem politik sekuler.

Tinjauan pustaka selanjutnya, Dedy Slametriyadi dengan karyanya “*Analisis Terhadap Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir*”<sup>24</sup> menjelaskan dengan fokus pandangan Hizbut Tahrir tentang konsep khilafah. Hizbut Tahrir merupakan gerakan Islam yang sangat gencar menawarkan agar sistem *khilafah* dihidupkan lagi. Hizbut Tahrir berpandangan Islam telah membatasi sistem pemerintahannya dengan sistem khilafah. Sekiranya konsep yang ditawarkan Hizbut Tahrir sebagai antitesis terhadap pemikiran politik Barat yang berkembang dan berpengaruh luas khususnya di dunia Islam.

---

<sup>24</sup> Dedy Slametriyadi, “Analisis Terhadap Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir”, dalam *Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syari’ah*, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2008), diakses melalui <http://library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=19234> pada tanggal 25/Oktober/2016.

Pada hasil analisisnya, terdapat tiga pandangan utama mengenai konsep *khilafah* menurut Hizbut Tahrir. Pertama, sistem *khilafah* menurut Hizbut Tahrir adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum *syara'*. Islam telah menetapkan sekaligus membatasi bentuk pemerintahan dengan sistem *khilafah* ini. Artinya, sistem *khilafah* ini satu-satunya sistem pemerintahan bagi daulah Islam. *Khilafah* merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam, dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Kedua, konsep *khilafah* yang ditawarkan Hizbut Tahrir dalam konteks politik Indonesia merupakan tawaran dalam tataran idealistik, yaitu upaya melakukan idealisasi terhadap sistem pemerintahan dengan menawarkan formula sistem pemerintahan Islam ideal yang pernah terwujud dalam romantisme sejarah. Ketiga, Hizbut Tahrir merupakan gerakan politik Islam modern yang memiliki paradigma integralistik dalam memandang hubungan agama dan politik. Kecenderungan integralistik memandang Islam adalah suatu agama yang lengkap dengan petunjuk, mengatur segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan bermasyarakat dan berpolitik.

Tinjauan terakhir kemudian berasal dari karya Muhammad Muhsin Rodhi. Dalam buku ini merupakan hasil dan terjemahan dari karya Tesis dengan judul "*Hizb at-Tahrir Tsaqafatuhu wa Manhajuhu fi Iqamah daulah al-Khilafah al-Islamiyah*"<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah Dan Metode Hizbut Tahrir Dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah*, (Baghdad: Departemen Pendidikan Tinggi dan Kajian Keilmuan Universitas Islam Baghdad, 2008), diakses melalui <https://www.scribd.com/document/287960512/tesis-komplit-pdf> pada tanggal 24/Oktober/2016.

(Hizbut Tahrir Tsaqafah dan Metodenya Dalam Menegakkan Negara *Khilafah Islamiyyah*). Tesis (penelitian) universitas tersebut merupakan bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar master (S2) di bidang Ushuluddin konsentrasi Pemikiran Islam yang diajukan oleh peneliti, Muhammad Muhsin Radhi kepada Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Baghdad.

Muhammad Muhsin Rodhi dalam metodologi yang digunakannya, memulai dengan memberikan gambaran umum tentang Hizbut Tahrir: sebab-sebab berdirinya, idenya, tujuannya, aktivitasnya, keanggotaannya, struktur administratifnya dan sumber-sumber pendanaannya. Selanjutnya, mengkaji tentang empat tokoh utama Hizbut Tahrir: Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhaniy (pendiri Hizbut Tahrir), Asy-Syeikh Ahmad ad- Da'ur, dan Asy-Syeikh Abdul Qadim Zallum, yang menggantikan Asy- Syeikh Taqiyuddin dalam memimpin Hizbut Tahrir, lalu Asy-Syeikh 'Atho' Kholil pemimpin Hizbut Tahrir yang sekarang.

Pada penjelasan selanjutnya yaitu tentang tahapan-tahapan terbentuknya Hizbut Tahrir: lahirnya, berdirinya, hubungannya dengan partai-partai yang lain serta sikapnya terhadap mereka, penyebarannya, kelesuan yang proporsional yang menyelimuti Hizbut Tahrir. Lalu, diikuti dengan mengkaji kegiatan-kegiatan Hizbut Tahrir setelah tahun 1990 hingga tahun 2006. Dan secara khusus, Muhammad Muhsin Rodhi menekankan pada pengkajian kegiatan Hizbut Tahrir di Irak, sebab merupakan tempat Ia berasal.

Pada kajiannya, Ia juga mengkaji *tsaqofah* Hizbut Tahrir dalam beberapa aspeknya: pandangannya terhadap manusia, naluri-nalurinya dan kebutuhan-kebutuhan

jasmaninya, serta makna akal dan bagaimana menghasilkan aktifitas berfikir. Pada kajian ini ia juga menjelaskan sikap Hizbut Tahrir terhadap beberapa pemikiran dan konsep, seperti Komunisme, Kapitalisme, Demokrasi dan Kebebasan, konsep *al-Hadhoroh* (peradaban) dan *al-Madaniyah* (ilmu pengetahuan dan teknologi), utamanya *tsaqofah* Hizbut Tahrir di bidang *fiqih* dan *ushulnya*, serta bidang politik.

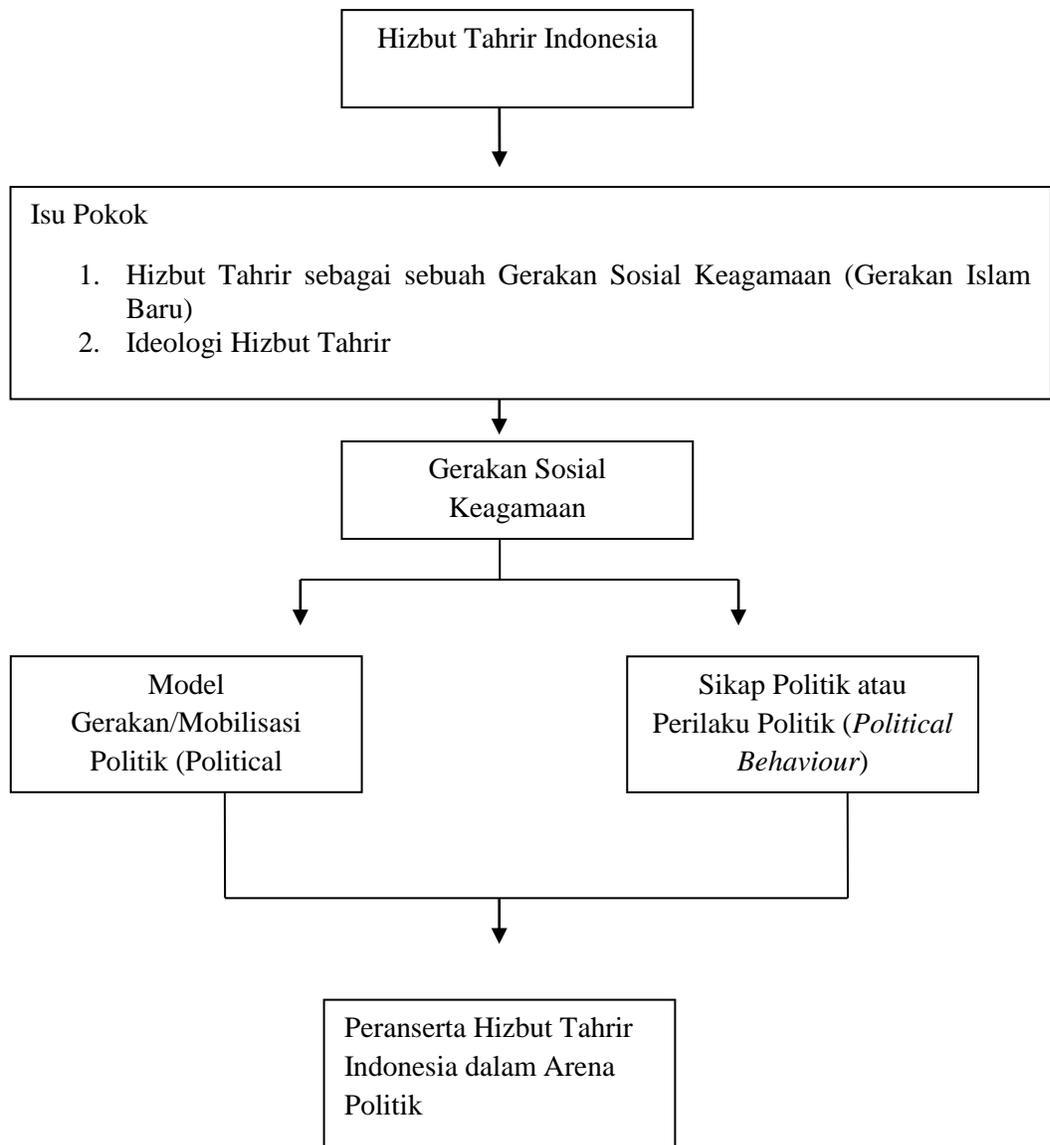
Selanjutnya, Ia menjelaskan dasar-dasar terpenting yang dibuat Hizbut Tahrir tentang sistem negara *khilafah*: sistem pemerintahan, sistem pergaulan laki-laki dan perempuan, sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem persanksian, sistem politik dalam dan luar negeri. Hal tersebut, Ia lebih terpusat pada pengangkatan khalifah, sehingga pada pengkajinya dilakukan dengan terperinci dan menyeluruh mengingat pentingnya persoalan tersebut baginya.

**Tabel I.1: Tinjauan Pustaka**

| No | Judul Sumber Referensi   | Konsep/Teori  | Kebermanfaatan Bagi Skripsi  | Perbedaan tinjauan pustaka dan Skripsi  |
|----|--|---|--|---|
| 1  | Jonkennedi, Gerakan Hizbut Tahrir dan Realitas Politik Islam Kontemporer di Indonesia, dalam <i>Jurnal Komunika</i> , Vol 6, No 1, 2012  | Gerakan Sosial, Mobilisasi Politik  | Memberikan kebermanfaatan mengenai gerakan Hizbut Tahrir Indonesia pada masa kini dan pandangan Hizbut Tahrir terkait gagasan dan upaya dalam politik, negara, pembangunan masyarakat                                | Skripsi akan lebih berfokus pada bentuk peranserta politik, bukan pengklasifikasian tipe mobilisasi   |
| 2  | Rakhmat Nur Hakim, Gerakan Islam Politik Fundamentalis: Kasus Hizbut Tahrir Indonesia di Surabaya, dalam <i>Jurnal Review Politik</i> , Vol 4, No 2, 2014  | Gerakan Sosial, <i>Political Opportunity Structure</i> , Mobilisasi, <i>Framing</i> | Melihat Hizbut Tahrir dalam perspektif empiris terkait latar belakang dan faktor-faktor pembentuk dalam gerakan islam fundamentalis  | Skripsi akan lebih berfokus pada partisipasi politik, bukan pengklasifikasian tipe mobilisasi   |
| 3  | Zainal Abidin, "Gerakan Politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sebagai Organisasi Islam Ekstra Parlemerter Di Indonesia Pasca Reformasi", dalam <i>Skripsi Jurusan Jinayah Siyarah, Fakultas Syari'ah</i> , (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2010) | Mobilisasi politik  | Menjelaskan Hizbut Tahrir Indonesia dalam modelnya sebagai gerakan ekstra parlemerter/berada diluar parlemen dengan gerakan dan pemikiran politiknya yang antidemokrasi, serta cita-cita pembentukan Negara Khilafah | Skripsi akan lebih berfokus pada peranserta politik, bukan pengklasifikasian tipe mobilisasi serta tidak berfokus pada konsep negara khilafah |
| 4  | Agung Wijaksono, Gerakan Politik Islam Hizbut Tahrir Di Indonesia Pada Era Pasca Reformasi, dalam <i>Jom FISIP</i> , Vol 1, No 2, 2014   | Perilaku politik, Budaya Politik, Mobilisasi Politik                                | Menjelaskan bagaimana aktifitas-aktifitas politik Hizbut Tahrir dalam gerakan perebutan kekuasaan dan juga menjelaskan Hizbut Tahrir sebagai gerakan yang  | Skripsi akan lebih berfokus pada aktivitas peransertai politik, bukan pada mobilisasi politik dan perilaku politiknya saja                    |

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
|   |  |   | menjadikan Islam sebagai acuan nilai pada segala aspeknya   |   |
| 5 | Sudarno Shobron, Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia, dalam <i>Jurnal Profetika</i> , Vol 15, No 1, 2014  | Mobilisasi politik, Pendekatan Historis, Interaksionisme Simbolik | Menjelaskan bagaimana model dakwah/gerakan 2 sayap yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir terkait agama dan politik  | Skripsi akan lebih berfokus pada peranserta politik, bukan pengklasifikasian tipe mobilisasi, skripsi juga akan menjelaskan dengan konsep realitas sosial |
| 6 | Tutut Chusniyah, Model Sikap Terhadap Penegakan Khilafah-Syariah Di Indonesia, dalam <i>Jurnal Insan</i> , Vol 14, No 2, 2012  | Teori motivasi kognisi-sosial                                     | Menjelaskan gerakan pengusung ideologi daulah islam/khilafah dalam ranah psikologi  | Skripsi akan menjelaskan Hizbut Tahrir dalam kajian ilmu sosiologi terkait organisasi dan peransertai politik   |
| 7 | Dedy Slametriyadi, “Analisis Terhadap Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir”, dalam <i>Skripsi Jurusan Jinayah Siyash, Fakultas Syari’ah</i> , (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2008),                | Konsep Negara, Konsep Khilafah Islamiyah                          | Memberikan penjelasan mengenai pandangan Hizbut Tahrir tentang konsep khilafah dan terkait konteks di Indonesia   | Skripsi akan lebih berfokus pada aktivitas-aktivitas peranserta politik, bukan pada pandangan konsep khilafah   |
| 8 | Muhammad Muhsin Rodhi, <i>Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir Dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah</i> , (Baghdad: Departemen Pendidikan Tinggi dan Kajian Keilmuan Universitas Islam Baghdad, 2008) | Mobilisasi Politik, Konsep Khilafah Islamiyah                     | Memberikan penjelasan secara historis terkait konsep-konsep dan metode-metode yang dilakukan Hizbut Tahrir dalam dunia Internasional di berbagai negara | Skripsi akan lebih berfokus pada aktivitas-aktivitas peranserta politik, bukan pada pandangan konsep khilafah   |

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2016)

**Skema I.2: Peta Studi Penelitian Hizbut Tahrir Indonesia**

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2016)

Berdasarkan Skema I.2 diatas, menurut analisis penulis, penelitian-penelitian Hizbut Tahrir sebelumnya hanya memaparkan model gerakan yang dilakukan Hizbut Tahrir, perilaku politik Hizbut Tahrir, serta pandangan Hizbut Tahrir dalam memaknai ideologi dan *khilafah islamiyah*. Penelitian-penelitian sebelumnya tidak atau kurang memaparkan bentuk nyata aktivitas politik atau peranserta politik Hizbut Tahrir. Padahal menurut penulis, bentuk nyata dari aktivitas politik atau peranserta politik harus dijelaskan lebih terperinci, karena dengan begitu dapat lebih mengetahui secara mendalam mengenai Hizbut Tahrir sebagai gerakan sosial keagamaan yang bergerak pada urusan atau ranah politik.

Perbedaan selanjutnya penulisan sebelum-sebelumnya dengan skripsi ini kemudian adalah penggunaan tipe penelitian studi kasus pada skripsi ini dalam memahami aktivitas politik atau peranserta politik yang dilakukan Hizbut Tahrir. Pada penelitian-penelitian sebelumnya, penjelasan terkait model gerakan yang dilakukan Hizbut Tahrir dijelaskan dengan cakupan yang luas sehingga kurang fokus. Hal ini berbeda dengan skripsi ini yang mengambil studi kasus dengan maksud agar lebih fokus mengetahui aktivitas politik dan peranserta politik pada satu waktu atau periode saja agar lebih fokus.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya menjelaskan mengenai ideologi Hizbut Tahrir, aktivitas politik Hizbut Tahrir, serta pemikiran politik Hizbut Tahrir hanya dijelaskan secara pemaknaan organisasi, dimana mengesampingkan pemaknaan secara individu-individu didalamnya. Menurut penulis, pemaknaan terkait ideologi Hizbut Tahrir, aktivitas politik Hizbut Tahrir, serta pemikiran politik Hizbut Tahrir

harus dijelaskan juga dari sudut pandang para aktivis dan anggota Hizbut Tahrir. Hal ini dikarenakan para aktivis dan anggota Hizbut Tahrir merupakan subjek yang rasional dimana memiliki pandangan masing-masing.

Penelitian ini berbeda dari studi-studi sebelumnya dimana skripsi ini akan menjelaskan lebih rinci mengenai bentuk nyata dari aktivitas politik atau peranserta politik yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia yang dilakukannya pada Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilu presiden (Pilpres) tahun 2014. Selanjutnya juga karena skripsi ini akan menjelaskan bagaimana pandangan para aktivis Hizbut Tahrir Indonesia terkait ideologi Hizbut Tahrir, aktivitas politik Hizbut Tahrir, serta pemikiran politik Hizbut Tahrir.

## **1.5 Kerangka Konseptual**

Pada hal pertama yang dilakukan sebelum menganalisis tema penelitian, terlebih dahulu dijelaskan mengenai pengertian dari konsep-konsep dan teori yang digunakan oleh penulis. Konsep-konsep dan teori digunakan untuk menganalisis tema penelitian yang diangkat. Terdapat empat konsep utama dan satu teori utama yang digunakan oleh penulis sebagai pisau analisis, yaitu:

### **1.5.1 Konsep Gerakan Sosial**

Konsep gerakan sosial, hal ini perlu dimulai dengan kejelasan konsep sehingga dapat diperoleh batasan dan koridor yang dimaksud dari konsep gerakan sosial ini.

Pada konsep gerakan sosial hal ini harus terlebih dahulu memahami antara gerakan sosial (*social movement*) dan perilaku kolektif (*collective behaviour*).<sup>26</sup>

Para sosiolog menyebut gerakan sosial lebih sebagai bentuk tindakan kolektif (*collective action*) daripada sebagai bentuk perilaku kolektif (*collective behaviour*).<sup>27</sup> Mereka berpendapat gerakan sosial (*social movement*) berbeda dengan bentuk-bentuk perilaku kolektif (*collective behaviour*). Walaupun terdapat beberapa sosiolog yang mengelompokkan gerakan sosial sebagai bentuk dari perilaku kolektif (*collective behaviour*).

Locher pada bukunya yang berjudul “*Collective Behaviour*” menjelaskan bahwa perbedaan gerakan sosial dari bentuk perilaku kolektif lainnya dapat dilihat dari tiga aspek, yakni: pengorganisasian (*organized*); pertimbangan (*deliberate*); dan daya tahan (*enduring*).<sup>28</sup> Pada aspek pengorganisasian, gerakan sosial adalah suatu aktivitas yang terorganisir, sementara perilaku kolektif pada umumnya muncul atau terjadi tidak terorganisir. Pada aspek pertimbangan, gerakan sosial terjadi karena adanya pertimbangan sedangkan perilaku kolektif terjadi tanpa adanya perencanaan apapun dari mereka menyangkut waktunya. Pada aspek daya tahan, gerakan sosial cenderung bertahan dalam waktu yang cukup lama atau memiliki daya tahan. Sementara, perilaku kolektif cenderung terjadi dalam waktu yang singkat.

---

<sup>26</sup> Oman Sukmana, *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*, (Malang: Intrans Publishing, 2016), hlm 1.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 2.

Terdapat beberapa definisi gerakan sosial oleh para ahli.

Kamanto Sunarto pada bukunya *Pengantar Sosiologi* (2004) menjelaskan:

Gerakan sosial adalah aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal yang berbetuk organisasi, berjumlah besar atau individu yang secara spesifik berfokus pada suatu isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan, menolak, atau mengkampanyekan sebuah perubahan sosial.<sup>29</sup>

Ahli lainnya, Macionis di dalam bukunya "*Sociology*" (1999) menyatakan:

Gerakan sosial adalah aktivitas yang diorganisasikan yang ditujukan untuk mendorong atau menghambat suatu perubahan sosial (*encourages and discourages change*).<sup>30</sup>

Sama halnya dengan Macionis, Herbert Spencer dalam buku *The Man Versus The States* (1982), menyatakan:

Gerakan sosial adalah upaya kolektif yang ditujukan untuk perubahan suatu tatanan kehidupan yang baru.<sup>31</sup>

Pada ahli lainnya, kemudian juga berpendapat mengenai definisi gerakan sosial.

Locher, *Collective Behaviour* (2002):

Ketika sekelompok orang mengatur diri dalam upaya untuk mendorong atau menolak beberapa jenis perubahan sosial, maka mereka sedang menciptakan sebuah gerakan sosial. Orang-orang dengan sedikit atau banyak kekuatan politik yang dimilikinya, kemudian mereka bergabung secara bersama-sama untuk mendapatkan atau memperjuangkan beberapa hal, yakni suatu perubahan sosial, maka mereka sedang melakukan gerakan sosial.<sup>32</sup>

Selanjutnya, Stolley dalam buku *The Basics of Sociology* (2005) menjelaskan definisi terkiat gerakan sosial, yaitu:

Gerakan sosial adalah upaya untuk mencapai tujuan tertentu melalui tindakan yang menentang *status quo*, wewenang dan budaya yang sudah mapan. Orang-orang yang

---

<sup>29</sup> Prof. Dr. Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hlm. 194-195.

<sup>30</sup> Oman Sukmana, *Op. Cit.*, hlm 4.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

melakukan suatu gerakan membangun perasaan identitas kolektif, yakni membagi perasaan bersama tentang penyebab dan membantu usaha-usaha mereka dengan mempertahankan suatu gerakan.<sup>33</sup>

Pada definisi lainnya, dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, Gerakan sosial dijelaskan sebagai tindakan atau agitasi terencana yang dilakukan sekelompok masyarakat yang disertai program terencana dan ditujukan pada suatu perubahan atau sebagai gerakan perlawanan untuk melestarikan pola-pola dan lembaga masyarakat yang ada.<sup>34</sup>

Konsep gerakan sosial kemudian dapat dibedakan kedalam beberapa tipe menurut para ahli. Dalam penjelasan mengenai tipe gerakan sosial, terdapat empat ahli yang menjelaskannya, yaitu: Macionis; Locher; Zanden; dan Spencer. Dalam tipe menurut Macionis dan Locher, mereka menjelaskan berdasarkan dimensi sasaran perubahan dan dimensi jumlah besarnya perubahan. Pada Zanden, ia mengelompokkan tipe gerakan sosial berdasar tujuan ideologi. Sedangkan Spencer mengelompokkan berdasar tujuan gerakan sosial. Adapun tipe-tipe menurut empat ahli tersebut, ialah:

#### 1. Macionis dan Locher<sup>35</sup>

- a. *Alternative Sosial Movement* (Gerakan Sosial Alternatif), gerakan sosial yang tingkat ancaman kepada status quo sangat kecil karena hanya terbatas pada sebagian populasi.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 5.

<sup>34</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses <http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&Gerakan%20Sosial&id=17622-arti-maksud-definisi-pengertian-Gerakan%20Sosial.html> pada 14/Oktober/2016.

<sup>35</sup> Oman Sukmana, *Op. Cit*, hlm 16.

- b. *Redemptive Social Movement* (Gerakan Sosial Pembebasan), gerakan sosial yang selektif tetapi ditujukan terhadap perubahan radikal pada individu.
- c. *Reformative Social Movement* (Gerakan Sosial Reformasi), gerakan sosial yang ditujukan hanya untuk suatu perubahan sosial yang terbatas terhadap setiap orang
- d. *Revolutionary Social Movement* (Gerakan Sosial Revolusi) gerakan sosial ekstrim yang bertujuan untuk sebuah transformasi dasar dari seluruh masyarakat

Tipe menurut Macionis dan Locher tersebut, seperti yang telah dijelaskan, mereka menjelaskan berdasarkan dimensi sasaran perubahan dan dimensi jumlah besarnya perubahan. Dimensi sasaran perubahan tersebut terkait fokus perubahan yang terbatas atau tidak terbatasnya terkait target perubahan. Sedangkan dimensi jumlah terkait jumlah masyarakat atau individu yang terdampak perubahan tersebut.

## 2. Zanden<sup>36</sup>

- a. *Revolutionary Movements* (Gerakan Revolusi), menggantikan nilai-nilai yang sudah ada.
- b. *Reform Movements* (Gerakan Reformasi), mengadakan perubahan agar nilai-nilai yang ada bisa diterapkan lebih kuat lagi.
- c. *Resistance Movements* (Gerakan Perlawanan), mencegah atau menolak suatu perubahan atau mengeliminasi perubahan sebelum dilembagakan.
- d. *Expressive Movements* (Gerakan Ekspresif), gerakan perubahan dari dalam dengan cara melakukan pembaharuan atau renovasi.

Pada Zanden, ia mengelompokkan tipe gerakan sosial berdasar basis tujuan ideologi. Zanden berfokus dalam tujuan nilai-nilai atau ideologi dalam proses pemimplementasikan oleh gerakan sosial. Nilai-nilai atau ideologi yang dijelaskan

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 17.

Pengklasifikasian nilai-nilai oleh Zanden tersebut berdasarkan kekuatan perbaikan, perubahan, atau pembaharuan dari nilai-nilai yang telah ada.

### 3. Spencer<sup>37</sup>

- a. *Revolutionary Movements* (Gerakan Revolusi), gerakan yang bertujuan menggulingkan otoritas yang sudah mapan.
- b. *Reform Movements* (Gerakan Reformasi), mengoreksi atau memperbaiki atau memperbaiki persoalan-persoalan yang muncul.
- c. *Reactionary Movement* (Gerakan Reaksi), gerakan yang menginginkan situasi kehidupan dikembalikan kepada tatanan masa lalu.
- d. *Conservative Movement* (Gerakan Konservatif) gerakan yang ditujukan untuk mempertahankan nilai-nilai tata cara kehidupan.
- e. *Utopian Movement* (Gerakan Utopia), gerakan jangka panjang, menginginkan suatu tipe baru dari suatu masyarakat yang berbeda dengan saat ini.
- f. *Religious Movement*, Gerakan yang mempunyai tujuan religius
- g. *Ethnic or Nationalistic Movement* (Gerakan Etnis/Nasionalis), gerakan berdasarkan etnis atau kebangsaan.

Spencer mengelompokkan berdasar tujuan perubahan gerakan sosial. Pada tujuan-tujuan tersebut seperti; menjaga nilai-nilai cara hidup; kembali ke tatanan nilai masa lalu; memperbaiki problem yang terjadi; menggulingkan kekuasaan yang ada; membentuk masyarakat yang baru; membentuk masyarakat religius; dan membangun kesadaran etnis. Dari Spencer tersebut dapat terlihat semua tujuan dimaksudkan untuk terjadinya perbaikan dan perubahan nilai-nilai yang ada.

Pada konteks Indonesia, gerakan sosial hal ini dapat dimaknai sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan. Hal ini kemudian telah dijelaskan dan diatur sesuai yang tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 18.

Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.<sup>38</sup>

Pada kerangka konsep gerakan sosial, hal ini kemudian digunakan penulis dalam menjelaskan Hizbut Tahrir Indonesia yang merupakan sebuah gerakan sosial. Penjelasan Hizbut Tahrir Indonesia yang merupakan gerakan sosial dijelaskan bagaimana definisi gerakan sosial oleh para ahli sama dengan gerakan Hizbut Tahrir Indonesia. Dimana definisi gerakan sosial oleh para ahli tersebut tidak bertentangan dengan gerakan atau aktivitas yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia.

Kerangka konsep gerakan sosial juga digunakan dalam menjelaskan tipe dan tujuan dari Hizbut Tahrir Indonesia sebagai gerakan sosial dalam melakukan segala aktivitas politiknya maupun peranserta politiknya. Penjelasan tipe gerakan sosial yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia kemudian lebih lanjut dapat mengetahui tujuan yang ingin dicapainya. Tipe gerakan sosial ini kemudian berhubungan dengan peranserta politik, hal ini dikarenakan tipe gerakan sosial dilihat dari aktivitas maupun peranserta yang dilakukan.

---

<sup>38</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

## **1.5.2 Konsep Gerakan Sosial Keagamaan**

### **1.5.2.1 Gerakan Sosial Keagamaan (Rhys H William)**

Organisasi keagamaan atau gerakan sosial keagamaan berperan penting dalam mengerakkan dan mengupayakan pembangunan yang berkelanjutan. Organisasi keagamaan atau gerakan sosial keagamaan berasal dari organisasi-organisasi yang kebanyakan jemaat agama. Organisasi agama atau gerakan sosial keagamaan selain sebagai sebuah lembaga agama yang mengajarkan nilai-nilai agama, tetapi juga sebagai alat oleh elit (penguasa) untuk mencapai tujuan-tujuannya, khususnya politik.

#### **1.5.2.1.1 Organisasi Agama dan Aktivitas Gerakan**

Beberapa ahli (misalnya, Hart, McRoberts, Pena, Wood), telah mempelajari apa yang dikenal sebagai "pengorganisasian berbasis agama." Kelompok seperti *the Industrial Areas Foundation* (IAF) atau *the Pacific Institute for Community Organization* (PICO) adalah koalisi dari organisasi-organisasi yang kebanyakan dari mereka merupakan jemaat agama.<sup>39</sup> Mereka mengumpulkan sumber daya, keahlian, dan personil untuk terlibat dalam aktifitas-aktifitas (biasanya menyangkut isu-isu ekonomi atau keadilan sosial) dan sengaja menggunakan status mereka sebagai kelompok agama untuk memobilisasi partisipasi dan untuk mencoba membujuk pejabat setempat. Pengorganisasian berbasis agama adalah sesuatu yang signifikan dan juga merupakan fenomena yang sedang berkembang.

---

<sup>39</sup> Michele Dillon, *Handbook Of The Sociology Of Religion*, (New York: Cambridge University Press, 2003), hlm 318.

Organisasi gerakan sosial keagamaan dalam beberapa kasus, seperti gereja yang menyatakan diri sebagai "tempat suci," jemaat mengorganisasikan gerakan seperti itu untuk menentang kebijakan pemerintah. Namun, walaupun jemaat sering memainkan peran penting dalam merekrut, mengiklankan, dan membantu untuk memulai upaya tindakan kolektif, sebagian besar mereka tidak menjadi anggota organisasi gerakan sosial (*social movement organization*) itu sendiri. Hal ini berlaku pada setidaknya sebagian orang karena jemaat adalah organisasi serbaguna yang melayani berbagai kebutuhan sosial dan spiritual bagi anggotanya.

Agama dapat menjadi sumber penting bagi sumber daya budaya dan organisasi dalam gerakan sosial. Agama membawa orang bersama-sama, memotivasi mereka melalui identitas dan keyakinan yang sangat mereka anut, dan menawarkan kelangsungan usaha dan perhatian yang bisa bertahan lebih lama dari banyaknya kampanye tunggal. Sementara itu, tentu saja akan selalu ada beberapa hambatan dalam pencampuran agama dengan politik dan pentingnya agama sebagai sumber pelihara, kenyamanan, dan rekonsiliasi dapat meredakan gejolak aktivisme.<sup>40</sup>

#### **1.5.2.1.2 Organisasi dan Ideologi**

Agama merupakan *provider* penting dalam retorika/kemampuan berpidato serta simbol yang dibutuhkan oleh gerakan sosial, baik untuk menarik anggota dan membujuk publik.<sup>41</sup> Bagaimanapun penting untuk diketahui, bahwa bahasa agama yang sama, tidak selalu dapat digunakan untuk memenuhi kedua tugas di atas secara

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 320.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 326.

bersamaan. Ironisnya, bahasa terbaik agama yang dapat memobilisasi anggota gereja lebih sering adalah bahasa yang paling mungkin untuk meningkatkan kecurigaan di masyarakat luas, sementara bahasa yang paling akomodatif bagi akal sehat masyarakat adalah bahasa yang paling tidak mungkin untuk memobilisasi umat beragama.<sup>42</sup> Tercatat bahwa agama menawarkan bahasa moral dari kebaikan dan kejahatan yang sangat jelas membagisetiap sisi masalah yang diberikan ke dalam mereka yang berada di sisi cahaya berbanding dengan mereka yang tidak di sisi cahaya— hal ini dapat menghasilkan semangat dan ketekunan dalam aksi yang kolektif.

Semua organisasi masyarakat sosial (*social movement organization*) membutuhkan media untuk mendapatkan pesan keluar, tapi kurang formal terorganisir kelompok membutuhkan media yang lebih.<sup>43</sup> Mereka memiliki simbol yang lebih sedikit dan ritual yang dapat digunakan untuk mengembangkan identitas kolektif, jaringan yang lebih sedikit untuk merekrut anggota, dan material yang lebih sedikit insentif untuk menawarkan potensi yang direkrut. Kurang regulasi organisasi dan politik rutinitas, mereka harus memberikan guncangan moral dan tindakan masyarakat yang dramatis untuk mendapatkan media yang perhatian dan menggembleng para simpatisan ke dalam tindakan. Koin dari ranah politik mereka adalah paparan publik dan kemarahan moral.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 327.

<sup>43</sup> *Ibid*.

Pada analisis akhir, mereka yang menempatkan keyakinan agama mereka di pusat sangat mereka berdiam sering memiliki keraguan tentang "penemuan" dengan mereka yang tidak berbagi keyakinan mereka, apa pun kesamaan politik mereka. Sejauh keengganan ini berdampingan dengan perkembangan SMO agama aktivis, itu belum tanda lain dari pemutusan antara lembaga dan praktik sistem politik kita di satu sisi dan kehidupan pribadi dan budaya di mana warga biasa Amerika benar-benar hidup.

### 1.5.3 Konsep Ideologi

Dari asal katanya, istilah ideologi dapat dipecah menjadi kata idea dan logos yang berasal dari bahasa Yunani (*Greek*). Secara harfiah dapat diartikan sebagai aturan atau hukum tentang ide. *Idea* berasal dari kata *idein* yang berarti melihat.<sup>44</sup> *Idea* dalam buku *The Advent Learner's Dictionary* berarti *plan or schema formed in the mind* atau suatu rencana yang dibentuk/dirumuskan di dalam pemikiran.<sup>45</sup> *Idea* dalam *Websters New Collegiate Dictionary* berarti *something existing in the mind as the result of the formulation of an opinion, a plan or the like*, atau sesuatu yang ada di dalam pemikiran sebagai hasil perumusan sesuatu pemikiran atau rencana.<sup>46</sup> Pengertian tentang ide dapat dirunut asalnya ke konsep *idea* dan dunia *idea* dari Plato, seorang filsuf Yunani abad ke-3 SM. *Idea* di dunia *idea* dalam pandangan Plato

---

<sup>44</sup> Sukarna, *Ideologi Suatu Studi Ilmu Politik*, (Bandung: Penerbit Alumi, 1981), hlm 1.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

merupakan kebenaran sejati, rujukan bagi benda-benda yang ada di dunia fisik yang ditempati manusia sekarang.<sup>47</sup>

Pada kata kedua yaitu *logia* berasal dari kata *logos* yang berarti *word* dimana kata ini berasal dari kata *legein* yang berarti *to speak* yaitu berbicara.<sup>48</sup> Selanjutnya kata *logia* berarti *science* (pengetahuan) atau teori. Jadi ideologi secara menurut arti kata ialah pengucapan dari pada yang terlihat atau pengutaraan apa yang terumus di dalam pikiran sebagai hasil dari pemikiran.<sup>49</sup>

Pada pengertian ideologi, hal ini kemudian terdapat beberapa pengertian. Ideologi menurut *The Advent Learner's Dictionary* ialah *system of ideas for political or economic theory* atau suatu sistem dari pada idea-idea atau hasil pemikiran yang telah dirumuskan oleh teori politik atau ekonomi.<sup>50</sup> Pengertian lainnya ideologi menurut *Websters New Collegiate Dictionary* dijelaskan menjadi dua. Pertama, *manner or content of thinking characteristic of an individual or class*, yang berarti cara hidup (tingkah laku) atau hasil pemikiran yang menunjukkan sifat-sifat tertentu dari pada seseorang individu atau sesuatu kelas. Kedua, *the intellectual pattern of any widespread culture or movement* atau pola pemikiran mengenai pengembangan pergerakan atau kebudayaan.<sup>51</sup>

Pada *Websters New World Dictionary*, ideologi ialah *the doctrines, opinions or way of thinking of an individual class etc.* atau doktrin-doktrin, pemikiran-pemikiran,

---

<sup>47</sup> Bagus Takwin, *Akar-Akar Ideologi*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2003), hlm 8.

<sup>48</sup> Sukarna, *Op. Cit.*, hlm 1.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

atau cara berpikir seseorang atau kelas atau lainnya.<sup>52</sup> Dan pada *Websters New Student Dictionary Ideology* menjelaskan ideologi ialah *the idea characteristic of a school of thinkers, a class of society, a political party or the like* atau karakter atau watak/ciri-ciri hasil pemikiran dari pemikir sesuatu kelas di dalam masyarakat atau sesuatu partai politik atau lainnya.<sup>53</sup>

Selain pengertian ideologi yang diungkapkan oleh *Websters*, banyak para ahli yang mengungkapkan pandangannya terkait ideologi. Salah satunya ialah seorang filsuf jerman Immanuel Kant. Pada ideologi yang dijelaskannya, Immanuel Kant menjelaskannya dengan kegiatan pemikiran. Immanuel kant mengemukakan bahwa *ratio* manusia di dalam kegiatan pemikirannya terbagi dua. Pertama, *reinen vernunft* atau *pure reason* atau pikiran murni. Kedua, *practische vernunft* atau *practical reason* atau pikiran praktis.<sup>54</sup> *Pure reason* dalam kegiatannya itu bersifat *metaphysis* yaitu keluar jagat raya sehingga sampai kepada *Lex Devina* yaitu Tuhan yang menciptakan alam semesta dan manusia. Sedangkan *practical reason* dalam kegiatannya bertalian dengan *experience* atau pengalaman dimana pengalaman itu tidak terlepas dari pancaindera manusia.

Pada teori Immanuel Kant ini, ideologi sebagai hasil pemikiran manusia mengenai politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, tidak akan dapat lepas terhadap kepercayaan adanya Yang Maha Ghaib, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan terlepas dari pada pengalaman-pengalaman yang telah dialami manusia pada masa silam dan

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm 2.

<sup>53</sup> *Ibid*.

<sup>54</sup> *Ibid*.

masa sekarang. Oleh karenanya dalam mempelajari ideologi dan politik tidak bisa dilepaskan dari pada sejarah.<sup>55</sup>

Ilmu sejarah akan memberikan bantuan yang besar sekali terhadap ilmu politik dan pemecahan terhadap masalah yang dihadapi di dalam ideologi dan politik, sehingga kita akan berbuat bijaksana. Dari pengalaman sejarah kita akan melihat bahwa manusia-manusia yang tidak mempercayai akan adanya Tuhan dilenyapkan dan dibinasakan dari permukaan bumi. Hal ini menimbulkan pemikiran kepada politikus atau pemikir politik bahwa suatu ideologi tidak bisa berkembang terus dan tidak akan mendapatkan kekuatan tanpa adanya kepercayaan terhadap Tuhan.

Tokoh lainnya yang menjelaskan mengenai ideologi ialah G. W. F Hegel. Hegel menjelaskan ideologi atau idea dengan teori dialektika-logikanya. Hegel mengemukakan bahwa di dalam idea manusia itu terjadi *dealektis* yaitu pertarungan antara *these* (pernyataan pendapat) dan *anti these* (penentangan terhadap pendapat). Dan sebagai hasil kontradiksi antara *these* dan *anti these* di dalam idea itu lahirlah *sinthese*. *Sinthese* inipun kemudian di dalam proses pemikiran selanjutnya menjadi *these* baru yang mengundang *anti these* baru dan selanjutnya melahirkan *sinthese* baru dan seterusnya demikian. Teori dialektika-logika Hegel ini bertalian pula dengan kepercayaan terhadap Tuhan dengan dasar pemikiran bahwa Tuhan adalah sebab utama dari pada segalanya.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm 4.

Pada tokoh lainnya yang mengungkapkan pendapatnya tentang ideologi ialah Karl Marx. Menurutnya, ideologi merupakan suatu alat untuk mencapai sebuah kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Pemikiran Marx tentang ideologi merupakan sebuah tekanan bagi usahanya untuk mengakhiri setiap dualisme yang memisahkan kesadaran (*rasio*) dari realita. Akan tetapi, bersamaan dengan itu, ia ingin mempertahankan kemandirian kesadaran dari keadaan luar. Marx ingin mengatasi permasalahan ideologis pada Hegel. Analisis Marx terhadap pemikiran Hegel menghasilkan pengertian ideologi sebagai kesadaran palsu (*false consciousness*).<sup>57</sup>

Di dalam ideologi Marx (Marxisme-Lenisme) sebagai hasil pemikiran dialektis-materialistis tidak ada sama sekali kepercayaan terhadap Tuhan. Ideologi Marxisme-Lenisme menyatakan bahwa pemikiran manusia itu hanya ditentukan oleh keadaan masyarakat dan tidak bisa mempengaruhi keadaan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pada sesuatu kenyataan dimana Ideologi Marxisme-Lenisme berasal dari pada pengaruh masyarakat, yang pada akhirnya mempengaruhi bahkan mengubah masyarakat itu sendiri.<sup>58</sup>

Berbeda dengan teori dialektik Hegel, Karl Marx menjungkir-balikkan yaitu dengan mendasarkan sesuatu itu bukan kepada spirit tetapi kepada materi. Dalam teori dialektik Marx, yang tadinya berada di alam idealisme dibawa kedalam alam

---

<sup>57</sup> Bagus Takwin, *Op. Cit*, hlm 57.

<sup>58</sup> Sukarna, *Op. Cit*, hlm 4.

materialisme. Sehingga di dalam menganalisa segala perkembangan dan kejadian dalam masyarakat dianalisa secara dialektis-materialistis.

Pada suatu ideologi, kemudian untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu ideologi diperlukan organisasi dan manajemen. Hal ini dikarenakan dengan adanya organisasi dan manajemen yang baik maka suatu ideologi akan berhasil dengan baik. Di dalam organisasi dimana ideologi itu berhasil dengan baik dapat dilihat adanya prinsip-prinsip scientific management yang diantaranya, yaitu:<sup>59</sup>

1. *Unity of Ideology* (kesatuan ideologi) kesatuan ideologi dapat menentukan berhasil atau tidaknya tujuan yang akan dicapai.
2. *Unity of interpretation of ideology* (kesatuan penafsiran ideologi) kesatuan penafsiran di dalam suatu ideologi memegang peranan yang penting dalam rangka membina persatuan dan kesatuan organisasi.
3. *Division of work* (pembagian kerja) di dalam suatu organisasi ideologi perlu adanya pembagian kerja, yang sebaik-baiknya agar tujuan dapat tercapai.
4. *Authority and responsibility* (wewenang dan tanggung jawab) setiap orang yang mempunyai tugas berdasarkan wewenang yang ada padanya memberikan pertanggung jawaban sesuai wewenang yang diterima.
5. *Discipline* (disiplin) seluruh anggota di dalam organisasi harus mempunyai kesadaran yang tinggi bahwa ideologi yang dianutnya itu mutlak dan benar.
6. *Unity of command* (kesatuan komando) seluruh anggota dalam organisasi yang memiliki disiplin yang sama dan tinggi, maka akan memudahkan terwujudnya suatu kesatuan komando.
7. *Unity of direction* (kesatuan pergerakan) seluruh anggota di dalam organisasi harus diarahkan kepada tujuan yang akan dicapai.
8. *Subordination of individual interest to general interest* (mengabdikan kepentingan diri sendiri kepada kepentingan umum) pengabdian kepentingan diri sendiri kepada kepentingan umum.
9. *Remuneration of personnel* (penggajian karyawan)
10. *Centralization* (pemusatan) hal ini berkaitan dengan *unity of command* dan *unity of direction*, sehingga memudahkan pergerakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
11. *Scalar chain* (hirarki) hubungan di dalam organisasi harus diatur secara hirarki untuk mencegah adanya kesimpang siuran dalam garis komando.

---

<sup>59</sup> Sukarna, *Op. Cit.*, hlm 26.

12. *Order* (ketertiban) *unity of command*, *unity of direction*, dan *Subordination of individual interest to general interest* akan melahirkan ketertiban di dalam organisasi, hal ini karena terwujudnya kerja sama dan saling mengerti.
13. *Equity* (kejujuran-keadilan) setiap anggota bersikap jujur dan adil.
14. *Stability of tenure of members* (stabilitas kondisi anggota) stabilisasi keadaan anggota di dalam organisasi, akan terlahir hanya dengan adanya kejujuran dan keadilan dari pada pimpinan, serta adanya pengabdian kepentingan yang dipimpin, serta adanya disiplin dai pada keseluruhan dan ketertiban.
15. *Inisiatif* (inisiatif) inisiatif konstruktif yang datang dari bawah di dalam suatu organisasi perlu dipupuk dan dikembangkan agar betul-betul organisasi itu merupakan kepunyaan bersama untuk kepentingan bersama.
16. *Esprit de corps* (semangat kesatuan) semangat kesatuan dalam suatu kesatuan organisasi dapat terlihat dalam rasa senasib dan sepenanggungan di dalam perjuangan.

Dengan dijalankannya dan dipenuhinya prinsip-prinsip management ideologi tersebut dapat dikatakan suatu ideologi berhasil dengan baik. Selain dari pada enam belas prinsip di atas untuk berhasilnya suatu ideologi, ialah diperlukannya faktor leadership yang kuat. Dengan hal-hal tersebut ideologi dapat dikatakan berhasil dengan baik.

Selain adanya prinsip-prinsip manajemen dalam ideologi, terdapat pula cara-cara dalam Ideologi. Ideologi dalam mengemukakan cara-cara untuk melaksanakan program. Dalam beberapa hal cara-cara itu termasuk kekuatan/kekerasan, karena bertujuan untuk menggulingkan aparatur-aparatur pemerintahan yang ada. Pada cara-cara ideologi tersebut terdapat empat hal yang menjadi ciri-ciri ideologi yang sukses, yaitu:<sup>60</sup>

1. *Solution* (pemecahan)

Ideologi mengemukakan dan memberikan jalan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh group/golongan yang tertindas.

---

<sup>60</sup> Sukarna, *Op. Cit*, hlm 32.

2. *Simplicity* (sederhana)

Ideologi itu harus dikemukakan secara sederhana. Suatu ideologi akan sukar difahamkan yang mempergunakan ajaran-ajaran intelek yang panjang lebar, walaupun masalah politik, sosial, dan ekonomi itu demikian kompleksnya. Fungsi dari pada ideologi ialah menyederhanakan atau mengemukakan secara singkat persoalan-persoalan tersebut baik benar ataupun salah, sehingga hanya terdapat satu sebab utama.

3. *Morality* (moral)

Ideologi harus memiliki suatu dasar moral. Bagi manusia adanya suatu dasar moral yang akan menjadi kepercayaannya dan alasan bagi setiap tindakannya, merupakan sesuatu syarat mutlak. Walaupun setiap individu bekerja untuk kepentingan perbaikan sosial ekonominya sendiri, tetapi mereka harus merasakan bahwa perbuatan itu mengikuti pemikiran yang umum tentang baik dan buruk.

4. *Leading or Elite group* (kelompok pilihan)

Ideologi menunjukkan adanya “*group* pilihan” atau *group* pilihan dan *group* yang harus dikutuk. Suatu ideologi harus memberikan penjelasan tentang orang-orang yang memimpinnya dan menunjukkan sistem perwakilan mana yang ditentang dan harus ditumbangkan.

Pada konsep ideologi digunakan dalam menjelaskan terkait pengertian ideologi oleh para ahli dengan ideologi Islam Hizbut Tahrir Indonesia. Konsep ideologi digunakan menjadi pisau analisis penulis mengenai penjelasan ideologi yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Selain itu, konsep ideologi juga penulis gunakan menganalisis prinsip-prinsip management ideologi Islam Hizbut Tahrir Indonesia yang telah dilakukan dan dipenuhinya. Konsep ideologi kemudian juga penulis gunakan dalam menjelaskan ciri-ciri dari ideologi yang sukses. Hal ini terkait apakah ideologi Islam Hizbut Tahrir Indonesia merupakan suatu ideologi yang sukses atau tidak.

#### 1.5.4 Konsep Peranserta Politik

Terdapat kesepakatan luas mengenai peranan organisasi masyarakat untuk mewadahi kegiatan politik anggotanya sebagai suatu fungsi organisasi. Demikian pula dengan peranannya untuk melibatkan masyarakat luas secara massal di dalam kegiatan politik. Tetapi terdapat perdebatan tentang keleluasaan dan kemandirian organisasi ini sebagai wadah kegiatan politik anggota masyarakat.<sup>61</sup>

Pada hal tersebut terdapat dua pandangan dari pandangan kelompok yang berfikiran bebas dan berfikiran terpinpin.<sup>62</sup> Dalam kelompok berfikiran bebas beranggapan bahwa seperti halnya partai politik, organisasi masyarakat dapat melakukan kegiatan politik sendiri sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pendukungnya. Kelompok yang berfikiran terpinpin, melihat organisasi masyarakat hanyalah penyalur aspirasi politik anggotanya ataupun waga masyarakat lainnya. Dalam pandangan terpinpin ini, organisasi masyarakat memberikan kepercayaan kepada partai politik untuk memenuhi aspirasinya.

Kegiatan politik warga masyarakat umum sebagai anggota atau pendukung suatu organisasi masyarakat atau partai politik, dibedakan atas partisipasi politik dan mobilisasi politik berdasarkan kepada inisiatif, spontanitas, dan kesukarelaan para pelakunya.<sup>63</sup> Myron Wiener berpendapat bahwa aktivitas politik yang bertolak dari inisiatif seseorang bersifat spontan dan dilakukan secara sukarela melahirkan partisipasi politik. Dengan alasan bahwa di dalam kenyataan sehari-hari sukar

---

<sup>61</sup> Arbi Sanit, *Op. Cit*, hlm 91.

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm 93.

membedakan ke dua konsep tersebut. Samuel P. Huntington berkeberatan terhadap pembedaan yang dilakukan Wiener.

Pada pemikiran Huntington hal ini lebih diterima oleh kalangan luas masyarakat Indonesia terutama karena massa yang lebih diperlakukan sebagai objek ketimbang subjek politik.<sup>64</sup> Dengan meenyamakan kedua konsep (Partisipasi politik dan Mobilisasi politik), masyarakat tidak perlu memilai apakah keterlibatan mereka di dalam proses politik adalah memenuhi keperluan mereka sendiri atau melayani kebutuhan elit politik dan penguasa.

Untuk menghindari pandangan kritis masyarakat, maka mobilisasi tersebut diartikan pula sebagai partisipasi. Dalam bahasa Indonesia kemudian hal ini dimaknai *peranserta* yang lebih mengandung arti terlibat tanpa perlu memperhatikan motivasi dari keterlibatan tersebut.<sup>65</sup> Peranserta yang merupakan gabungan aktivitas partisipasi dan mobilisasi.

#### **1.5.4.1 Konsep Partisipasi Politik**

Di negara-negara demokrasi seperti Indonesia, konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm 94.

<sup>65</sup> *Ibid*.

pimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan pengejawantahan (perwujudan) dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.<sup>66</sup>

Pada definisi lainnya, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau (*lobbying*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya.<sup>67</sup> Hal ini sendiri dikarenakan tujuan partisipasi politik adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Oleh karena itu, kegiatan itu harus ditujukan, dan mempunyai dampak, terhadap pusat-pusat dimana keputusan diambil.

Definisi lainnya, Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi, dalam bukunya *Political Participation: International Encyclopedia of the Social Sciences* (1972), berpendapat:

Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam prose pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.<sup>68</sup>

Definisi partisipasi politik selanjutnya, Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*,

---

<sup>66</sup> Mirriam Budiardjo, *Op. Cit.*, hlm 368.

<sup>67</sup> Mirriam Budiardjo, *Op. Cit.*, hlm 367.

<sup>68</sup> *Ibid.*

Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.<sup>69</sup>

Huntington juga menjelaskan lebih rinci terkait partisipasi politik hanya sebagai kegiatan warganegara umum (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Dalam hal ini, terdapat empat aspek inti dari definisinya. Pertama, ia hanya mencakup kegiatan-kegiatan akan tetapi tidak sikap-sikap. Kedua, partisipasi politik berpusat pada kegiatan politik warganegara umum (*private citizen*). Ketiga, inti perhatian hanya kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Keempat, definisi mencakup semua kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintah, tidak peduli apa kegiatan itu benar-benar mempunyai efek.<sup>70</sup>

Pada buku lainnya *Social Economi Change and Political Participation*, Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, membedakan tiga tujuan politik massa di Indonesia<sup>71</sup>, yaitu; pertama, memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya beserta sistem politik yang disusunnya. Hal ini dilakukan dengan mengirim utusan pendukung ke pemerintah, menyatakan dukungan kepada pemerintah, dan lain sebagainya. Kedua, partisipasi sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan penguasa dengan harapan supaya penguasa mengubah atau memperbaiki kelemahan tersebut. Hal ini diwujudkan dalam demonstrasi, petisi,

---

<sup>69</sup>*Ibid*, hlm 368.

<sup>70</sup> Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm 8.

<sup>71</sup> Arbi Sanit, *Op. Cit*, hlm 95.

resolusi, mogok, protes, dan sebagainya. Ketiga, partisipasi sebagai tantangan terhadap penguasa dengan maksud menjatuhkannya sehingga terjadi perubahan pemerintah atau sistem politik. Dilakukan dengan cara pembangkangan politik, huru-hara, serta pemberontakkan senjata.

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson kemudian lebih rinci menjelaskan bentuk-bentuk dari partisipasi politik dalam tujuan memiliki efek politik, yaitu:<sup>72</sup>

- a. Kegiatan Pemilihan (*electoral activity*) yaitu mencakup kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau setiap tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil proses pemilihan;
- b. Lobi (*lobbying*) yaitu upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintahan dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka tentang suatu isu yang menyangkut sejumlah besar orang;
- c. Kegiatan Organisasi (*organizational activity*) yaitu menyangkut partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, yang tujuan yang utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah;
- d. Mencari Koneksi (*contacting*) – yaitu tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang;
- e. Tindakan Kekerasan (*violence*) – yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembunuhan politik (*assassination*), revolusi dan pemberontakan.

Berbeda dengan Huntington dan Nelson, ahli lainnya Gabriel Almond membedakan bentuk partisipasi politik menjadi dua, bentuk konvensional dan bentuk

---

<sup>72</sup> Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Op. Cit*, hlm 17.

nonkonvensional. Sebagaimana dikutip dari Anthonius Sitepu “*Teori-Teori Politik*”, yaitu;<sup>73</sup>

1. Bentuk konvensional

- a. Pemberian Suara (*voting*)
- b. Diskusi Kelompok
- c. Kegiatan Kampanye
- d. Membentuk dan Bergabung Dalam Kelompok Kepentingan
- e. Komunikasi Individual Dengan Pejabat Politik/Administratif
- f. Pengajuan Petisi

2. Bentuk non-konvensional

- a. Berdemonstrasi
- b. Konfrontasi
- c. Pemogokan
- d. Tindakan Kekerasan Politik Terhadap Harta Benda, Perusakan, Pemboman dan Pembakaran
- e. Tindak Kekerasan Politik Manusia Penculikan/Pembunuhan
- f. Perang Gerilya/Revolusi

Pada hal lainnya, dalam menganalisis partisipasi politik juga harus dilihat dari alasan atau landasan terbentuknya partisipasi politik. Huntington dan Nelson kemudian menjelaskan mengenai landasan partisipasi politik. Landasan partisipasi politik sendiri memiliki pengertian, asal-usul individu atau kelompok yang melakukan kegiatan partisipasi politik. Mereka kemudian membagi landasan partisipasi politik ini menjadi:<sup>74</sup>

- a. Kelas: individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa.
- b. Kelompok atau komunal: individu-individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa.
- c. Lingkungan: individu-individu yang jarak tempat tinggal (domisilinya) berdekatan.

<sup>73</sup> Anthonius Sitepu, *Teori-Teori Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm 101.

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm 21.

- d. Partai: individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan, dan
- e. Golongan atau faksi: individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus antara satu sama lain, yang akhirnya membentuk hubungan patron-client, yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat.

Pada kerangka konsep partisipasi politik, penulis menggunakan konsep ini dalam menganalisis peranserta politik dalam hal partisipasi politik terkait Pileg dan Pilpres 2014. Konsep partisipasi politik digunakan menjadi pisau analisis penulis mengenai bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia serta landasan partisipasi politik politik yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Pada bentuk-bentuk partisipasi politik, penulis menganalisis terkait apa saja bentuk nyata partisipasi politik Hizbut Tahrir Indonesia yang dilakukannya pada Pileg dan Pilpres 2014 berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi politik yang dijelaskan oleh Samuel P. Huntington dan Joan Nelson serta Gabriel Almond.

Kerangka konsep partisipasi politik juga digunakan dalam menganalisis landasan terbentuknya partisipasi politik yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Penganalisan landasan terbentuknya partisipasi politik ini dilakukan sehingga dapat diketahui sumber atau asal-usul individu atau kelompok dalam melakukan partisipasi politik. Pada penganalisan landasan terbentuknya partisipasi politik dalam skripsi ini kemudian dapat diketahui landasan apa yang menjadi dasar partisipasi politik yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia.

#### 1.5.4.2 Mobilisasi Politik

Mobilisasi politik dapat diartikan suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak (individu/kelompok) kepada pihak lainnya (individu/kelompok) dalam rangka pengikutsertaan partisipasi dalam proses politik yang memiliki tujuan tertentu (tujuan politik). Pada mobilisasi politik, secara umum terdapat dua instrumen mobilisasi politik, yaitu partai politik dan non partai politik (organisasi gerakan masyarakat/kemasyarakatan).<sup>75</sup> Kedua instrumen tersebut sangat berperan aktif terhadap perkembangan politik dan partisipasi politik di masyarakat terutama terkait pemilihan umum secara elektoral.

Partai politik dalam mobilisasi politik merupakan instrumen utama dan instrumen yang aktif dalam proses politik.<sup>76</sup> Partai politik sangat berperan dalam memobilisasi massa karena mempunyai sistem kekuatan keorganisasian untuk mendoktrin dan mempengaruhi massa menjadi pemilih partisan untuk kepentingan pencalonan, peran partai politik yaitu sebagai alat transfer kekuasaan dan alat instrumen penggerak dalam mencapai tujuan-tujuan kekuasaan, partai politik merupakan alat kendaraan bagi para pelaku politik untuk mencapai tujuan kekuasaan.

Instrumen mobilisasi politik lainnya yaitu instrumen mobilisasi politik yang non-partai politik (organisasi kemasyarakatan). Perspektif ini dibangun dari temuan-temuan kasus mobilisasi politik di berbagai negara yang menunjukkan adanya

---

<sup>75</sup> Nugroho Kris, *Ikhtiar Teoritik Mengkaji Peran Partai Dalam Mobilisasi Politik Elektoral*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2011), hlm 28.

<sup>76</sup> *Ibid.*

keterlibatan dan penggunaan instrumen-instrumen non partai politik untuk memobilisasi massa.

Penggunaan kerangka konsep mobilisasi politik dilakukan dalam menjelaskan dan menganalisis peranserta politik dalam hal mobilisasi politik terkait Pileg dan Pilpres 2014. Konsep mobilisasi politik digunakan untuk menjelaskan cara-cara dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia pada Pileg dan Pilpres 2014 merupakan bagian dari mobilisasi politik yang dilakukannya untuk mempengaruhi proses politik. Penggunaan konsep mobilisasi politik juga dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa Hizbut Tahrir Indonesia sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan atau gerakan sosial juga merupakan instrumen dari mobilisasi politik.

### **1.5.5 Teori Konstruksi Sosial**

Teori konstruksi sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh Berger dan Luckman. Mereka menjelaskan, agama sebagai bagian dari kebudayaan merupakan konstruksi manusia.<sup>77</sup> Hal ini berarti, bahwa terdapat proses dialektika antara masyarakat dengan agama sebagai bagian dari budaya. Proses dialektika ini kemudian terdiri dari tiga momentum, yaitu; eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi.

---

<sup>77</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm 15.

Ketiga momentum proses dialektik fundamental masyarakat tersebut akan dijelaskan lebih lanjut.<sup>78</sup> *Eksternalisasi* adalah suatu pencurahan kedirian manusia secara terus-menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas *fisis* maupun mentalnya. *Obyektivasi* adalah disandangnya produk-produk aktivitas itu (baik *fisis* maupun mental), suatu realitas yang berhadapan dengan produsernya semula, dalam bentuk suatu kefaktaan (*faktisistas*) yang eksternal terhadap, dan lain dari, para produser itu sendiri. Internalisasi adalah peresapan kembali realitas tersebut oleh manusia, dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-struktur dunia *obyektif* ke dalam struktur-struktur kesadaran *subyektif*.<sup>79</sup> Melalui *eksternalisasi*, maka masyarakat merupakan produk manusia. Melalui *obyektivasi*, maka masyarakat menjadi suatu realitas *sui generis*, unik. Melalui *internalisasi*, maka manusia merupakan produk masyarakat.<sup>80</sup>

Pada langkah *eksternalisasi* menjelaskan bagaimana kedirian manusia melakukan gerakan keluar atau pengekspresian diri dalam dunia sekelilingnya. Melihat pada pengetahuan empiris, manusia tidak bisa dibayangkan terpisah dari pencurahan dirinya terus-menerus ke dalam dunia yang ditempatinya. Kedirian manusia bagaimanapun tidak bisa dibayangkan tetap tinggal diam di dalam dirinya sendiri, dalam suatu lingkup tertutup, dan kemudian bergerak keluar untuk

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm 4.

<sup>79</sup> *Ibid*.

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm 5.

mengekspresikan diri dalam dunia sekelilingnya. Kedinginan manusia itu esensinya melakukan eksternalisasi dan ini sudah sejak permulaan.<sup>81</sup>

Pada pandangan *eksternalisasi* dunia manusia tidak terprogram dengan sempurna oleh konstruksi manusia sendiri. Dunia manusia adalah suatu dunia yang mesti dibentuk oleh aktivitas manusia sendiri.<sup>82</sup> Pada langkah eksternalisasi, Manusia tidak memiliki hubungan yang sudah terbentuk dengan dunia. Ia harus selalu membentuk hubungan dengan dunianya. Kegoyahan yang sama juga menandai hubungan manusia dengan dirinya sendiri.<sup>83</sup>

*Eksternalisasi* kemudian menjelaskannya dengan eksistensi manusia. Eksistensi manusia ialah suatu "tindak penyeimbangan" terus-menerus antara manusia dan dirinya, manusia dan dunianya. Dengan kata lain, bahwa manusia selalu berada dalam proses "mengimbangi diri". Dalam proses inilah manusia membangun suatu dunia. Hanya dalam suatu dunia yang dihasilkan oleh dirinya sendirilah, manusia bisa menempatkan diri serta merealisasikan kehidupannya.<sup>84</sup>

Pada tahap kedua dalam proses fundamental masyarakat ialah *obyektivitas*. Seperti yang sudah dijelaskan, *obyektivitas* ialah disandangnya produk-produk aktivitas itu (baik fisis maupun mental), suatu realitas yang berhadapan dengan produsernya semula, dalam bentuk suatu kefaktaan (*faktisitas*) yang eksternal

---

<sup>81</sup> *Ibid*

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm 6.

<sup>83</sup> *Ibid*.

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm 7.

terhadap, dan lain dari, para produser itu sendiri. Dalam *obyektivitas* dijelaskan seperti dalam memaknai kebudayaan dan masyarakat.

Jika kebudayaan diberi status *obyektivitas*, maka terdapat suatu makna ganda pada penerapan ini. Kebudayaan itu *obyektif* dalam hal bahwa kebudayaan menghadapi manusia sebagai suatu kelompok benda-benda dalam dunia nyata yang eksis di luar kesadarannya sendiri.<sup>85</sup> Dalam hal lainnya, *obyektivitas* kebudayaan sebagai *faktisitas* yang dimiliki bersama itu bahkan jauh lebih penting untuk dipahami berkaitan dengan menunjuk pada konstruksi-konstruksi non-materialnya.<sup>86</sup>

*Obyektivitas*, masyarakat adalah aktivitas manusia yang diobyektivikasikan, yaitu, masyarakat adalah suatu produk aktivitas manusia yang telah memperoleh status realitas *obyektif*.<sup>87</sup> Masyarakat, suatu realitas *obyektif*, memberikan sebuah dunia bagi manusia untuk ditempatinya. Dunia ini melingkupi biografi individu, yang tergelar sebagai suatu rangkaian peristiwa di dalam dunia tersebut.<sup>88</sup> Oleh karenanya, *obyektivitas* masyarakat mencakup semua unsur pembentuknya. Lembaga-lembaga, peran-peran, dan identitas-identitas itu eksis sebagai fenomena-fenomena nyata secara *obyektif* dalam dunia sosial, meskipun semua itu tidak lain adalah produksi-produksi manusia.

Pada langkah ketiga yaitu *internalisasi*. Pada pandangan *internalisasi*, individu tidak hanya belajar mengenai makna-makna terobyektivikasi tetapi juga

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm 13.

<sup>86</sup> *Ibid*.

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm 14.

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm 16.

menghubungkan diri dengan, dan dibentuk oleh, makna-makna tersebut. Dia menyerap makna-makna tersebut dan menjadikannya makna-maknanya sendiri. Dia menjadi tidak saja seorang yang memiliki makna-makna ini, tetapi juga seorang yang memiliki dna mengekspresikan makna-makna tersebut.<sup>89</sup> Dalam hal tersebut kemudian merupakan proses internalisasi.

Pada proses *internalisasi*, proses-proses yang meng*internalisasi* dunia yang *terobyektivasi* secara sosial juga merupakan proses-proses yang menginternalisasi identitas-identitas yang ditetapkan secara sosial. Individu itu disosialisasi menjadi pribadi dan menempati dunia yang ditetapkan. Identitas subyektif dan realitas *subyektif* dihasilkan dalam dialektik yang sama (dalam pengertian *literal etimologis*) antara individu dengan orang-orang lain yang signifikan baginya, yang bertanggung jawab bagi sosialisasinya.<sup>90</sup> Proses *internalisasi* harus selalu dipahami sebagai salah satu momentum dari proses dialektik yang lebih besar yang juga termasuk momentum-momentum *eksternalisasi* dan *obyektivikasi*.<sup>91</sup>

Konstruksi sosial, Berger menggunakan paradigma berpikir Durkheim mengenai objektivitas pada proses internalisasi dan paradigma Weber mengenai subjektivitas pada eksternalisasi-obyektivasi. Pada Durkheim memosisikan objektivitas di atas subjektivitas (masyarakat di atas individu), sementara Weber menempatkan subjektivitas di atas objektivitas (individu di atas masyarakat). Berger kemudian melihat keduanya sebagai entitas yang tidak terpisahkan. Masyarakat

---

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm 19.

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm 20.

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm 24.

menurut Berger merupakan realitas objektif sekaligus subjektif. Sebagai realitas objektif, masyarakat berada di luar diri manusia dan berhadapan dengannya. Sedangkan sebagai realitas subjektif, individu berada di dalam masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan. Dengan kata lain, bahwa individu adalah pembentuk masyarakat dan masyarakat juga pembentuk individu. Realitas sosial bersifat ganda (plural) dan bukan tunggal, yaitu realitas objektif dan subjektif. Realitas objektif adalah realitas yang berada di luar diri manusia, sedangkan realitas subjektif adalah realitas yang berada dalam diri manusia.

Pada ketiga momentum proses dialektik fundamental tersebut, dalam skripsi ini penulis menggunakannya untuk menganalisis peranserta politik Hizbut Tahrir Indonesia sebagai gerakan sosial keagamaan. Dalam hal ini penulis menjelaskan bagaimana ideologi islam Hizbut Tahrir Indonesia kedalam tiga momentum proses dialektik fundamental. Pada momentum pertama *eksternalisasi*, digunakan dalam menjelaskan bagaimana peranserta politik yang dilakukan oleh para aktivis dan anggota Hizbut Tahrir Indonesia merupakan hasil dari pengekspresian dirinya pada dunia. Pada momentum *obyektivikasi*, digunakan dalam menjelaskan Hizbut Tahrir Indonesia sebagai gerakan sosial keagamaan sebagai suatu realitas obyektif yang kemudian dimaknai oleh para aktivis dan anggota Hizbut Tahrir Indonesia. Pada momentum *internalisasi*, digunakan dalam menjelaskan aktivis dan anggota Hizbut Tahrir Indonesia sebagai realitas subyektif yang bukan hanya belajar mengenai makna-makna terobyektivikasi tetapi juga menghubungkan diri dengan, dan dibentuk oleh, makna-makna tersebut.

## 1.6 Metodologi Penelitian

Pada metodologi penelitian yang digunakan ialah dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Pemilihan pendekatan penelitian kualitatif ini digunakan dalam memahami berbagai gejala yang terdidi lapangan. Hal ini karena pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial. Dalam metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.<sup>92</sup>

Penelitian Skripsi yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan metode penelitian deskriptif (penelitian deskriptif kualitatif) kemudian menggunakan tipe penelitian studi kasus. Studi kasus dilakukan pada peranserta politik Hizbut Tahrir Indonesia dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014. Dalam teknik pengumpulan data kemudian dilakukan dengan dua metode yaitu *interview* dan *library research*. *Interview* dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pengurus DPP Hizbut Tahrir Indonesia dan kader Hizbut Tahrir Indonesia. *library research* dilakukan dengan cara menelusuri sumber buku primer dan sekunder terkait Hizbut Tahrir Indonesia untuk mengetahui ide-ide atau pemikirannya.

Penelitian terhadap peran ideologi dalam peranserta politik Hizbut Tahrir Indonesia dengan studi kasus pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014 kemudian

---

<sup>92</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hlm 20

terdapat keterbatasan penelitian, dikarenakan tidak menggunakan teknik observasi atau pengamatan langsung. Keterbatasan penelitian ini dikarenakan studi kasus atau waktu yang diteliti telah terjadi yaitu pada tahun 2014. Dikarenakan hal tersebut, penulis tidak bisa melakukan observasi atau pengamatan secara langsung pada fenomena yang diteliti. Hal tersebut juga terjadi karena pada tahun 2014 penulis belum melakukan penelitian dengan tema penelitian yang penulis teliti.

### **1.6.1 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian atau informan penelitian ini ialah anggota Hizbut Tahrir Indonesia di wilayah Jabodetabek. Pada pemilihan subjek penelitian atau informan penelitian didasarkan pada kriteria yaitu warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah Jabodetabek; sudah berumur 17 tahun atau sudah terdaftar pada daftar pemilih tetap (DPT) pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2014; dan sudah menjadi anggota atau kader dari Hizbut Tahrir Indonesia sebelum/disaat pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2014. Subjek penelitian atau informan penelitian kemudian berjumlah 5 orang yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Adapun mereka ialah;

**Tabel I.2 Data Informan**

| No | Informan                                 | Usia | Pendidikan Terakhir | Jabatan/Status Kepengurusan  | Target Data  |
|----|--|------|---------------------|--|--|
| 1. | Muhammad Ismail Yusanto (Informan Kunci) | 54   | S3                  | Juru Bicara Dewan Pengurus Pusat Hizbut Tahrir Indonesia           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur Kepengurusan</li> <li>• Sejarah</li> <li>• Realitas Masyarakat</li> <li>• Ideologi Islam</li> <li>• Pandangan Khilafah dan Syariah</li> <li>• Aktivitas Politik</li> <li>• Peranserta Politik</li> </ul> |
| 2. | Muhammad Rahmat Kurnia (Informan Kunci)  | 48   | S3                  | Ketua Lajnah Faalayah Dewan Pengurus Pusat Hizbut Tahrir Indonesia | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realitas Masyarakat</li> <li>• Ideologi Islam</li> <li>• Pandangan Khilafah dan Syariah</li> <li>• Aktivitas Politik</li> <li>• Peranserta Politik</li> </ul>   |
| 3. | Miraz Syahrul                            | 25   | SMA                 | Anggota Dewan Pengurus Daerah Kota Bekasi Hizbut Tahrir Indonesia  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitas Politik</li> <li>• Peranserta Politik</li> </ul>  |
| 4. | Suryono Puta                             | 39   | S2                  | Anggota Dewan Pengurus Daerah Kota Bekasi Hizbut Tahrir Indonesia  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitas Politik</li> <li>• Peranserta Politik</li> </ul>  |
| 5. | Ari Rachmayanti                          | 36   | S1                  | Anggota Dewan Pengurus Daerah Kota Bekasi Hizbut Tahrir Indonesia  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitas Politik</li> <li>• Peranserta Politik</li> </ul>  |

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2016)

### **1.6.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian berada di wilayah kota Jakarta dan kota Bekasi. Pada lokasi di Jakarta berada di DPP HTI dan DPD 1 HTI Jakarta. Pada DPP HTI berlokasi di Crown Palace A25, Jl Prof. Soepomo No. 231, Jakarta Selatan dan DPD 1 HTI Jakarta berlokasi di Jl. Hasbi Barat No. 2 Kel. Kebon Pala, Kec. Makasar, Jakarta Timur. Sedangkan pada lokasi penelitian di daerah bekasi terletak di Masjid Al Azhar, Jaka permai dan Kranggan Permai, Jatisampurna. Penelitian dilakukan pada bulan September – November 2016.

### **1.6.3 Peran Peneliti**

Pada penelitian ini penulis melakukan pengamatan dengan cara non partisipan. Penulis bukan anggota atau bagian (internal) dari subjek penelitian, penulis merupakan individu yang berada pada luar (eksternal) organisasi atau luar lingkup subjek yang diteliti. Pada penelitian ini, penulis mengangkat tema organisasi masyarakat keagamaan karena penulis akrab terhadap fenomena ini. Dalam pemilihan subjek Hizbut Tahrir Indonesia, penulis melihat Hizbut Tahrir Indonesia berbeda dengan organisasi masyarakat keagamaan yang penulis ketahui.

Pada proses permulaan observasi atau hubungan dengan Hizbut Tahrir Indonesia, penulis melakukan berbagai tahapan. Pada tahapan pertama ialah memperoleh surat resmi yang dikeluarkan Universitas Negeri Jakarta. Pada tahapan selanjutnya penulis menyambangi kantor DPD 1 Jakarta Hizbut Tahrir Indonesia dan DPD Bekasi Hizbut Tahrir Indonesia, dan DPP Hizbut Tahrir Indonesia.

#### 1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik peneliti lakukan untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang sesuai dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data adalah teknik peneliti untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang sesuai dengan topik penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan menggunakan dua metode,

*face-to-face interview* dan *library research*.

- a. *Interview* (Wawancara): Dalam metode ini, penulis datang ke lokasi penelitian untuk melakukan wawancara langsung dengan responden yang dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbentuk kuesioner sehingga hal ini disebut juga dengan wawancara berstruktur. Dalam buku metode penelitian kualitatif karangan Lexy J. Moleong, metode interview/wawancara adalah tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.<sup>93</sup> Wawancara ini dilakukan dalam rangka upaya memperoleh informasi atau data yang diperlukan dengan bertanya langsung kepada responden tentang pemikiran dan gerakan politik Hizbut Tahrir Indonesia sekaligus menginformasi data yang penulis peroleh dari sumber tertulis. Wawancara penulis lakukan dengan pengurus Hizbut Tahrir Indonesia untuk menggali informasi tambahan tentang pemikiran dan gerakan politik Hizbut Tahrir Indonesia.

---

<sup>93</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2001), hlm 135.

Adapun dalam proses wawancara pada setiap informan ialah:

1. Muhammad Ismail Yusanto (Informan Kunci)

Tahap awal wawancara dengan ustadz Ismail, penulis terlebih dahulu membuat janji temu dengan beliau melalui sms (*short message service*). Penulis mendapatkan nomor kontak ustadz Ismail setelah penulis mengunjungi kantor DPP Hizbut Tahrir Indonesia. Pada kunjungan tersebut, penulis diarahkan untuk bertanya kepada ustadz Ismail terkait skripsi yang penulis akan teliti karena beliau merupakan juru bicara pusat Hizbut Tahrir Indonesia. Pada pembuatan janji temu tersebut kemudian ustadz Ismail menyanggupi dan dijadwalkan pada hari kamis, 3 november 2016 pada pukul 16.00 WIB berlokasi di DPP Hizbut Tahrir Indonesia.

Pada hari kamis 3 november 2016 pukul 15.45 WIB, penulis kemudian tiba di DPP Hizbut Tahrir Indonesia. Proses wawancara kemudian dilakukan sekitar pada pukul 16.20 di ruang kerja juru bicara atau ruang kerja ustadz Ismail. Pada proses awal wawancara tersebut, penulis terlebih dahulu memberitahukan data diri penulis serta alasan dan tujuan kedatangan wawancara dengan beliau. Pada proses wawancara tersebut, penulis menanyakan terkait skripsi penulis yang mengacu pada kuesioner yang penulis terlebih dahulu telah siapkan. Pada tanggapan atau jawaban terkait pertanyaan yang penulis tanyakan, ustadz Ismail menjawab dengan singkat dan normatif. Pada saat selesai wawancara kemudian, ustadz Ismail memberikan beberapa data terkait beberapa hasil wawancara yang telah dilakukannya mengenai tanggapan beliau pada ranah politik termasuk partisipasi politik yang terkait skripsi penulis.

Wawancara kemudian berakhir pada sekitar pukul 17.15. Penulis kemudian mengucapkan terima kasih kepada beliau dan memberikan bingkisan.

## 2. Muhammad Rahmat Kurnia (Informan Kunci)

Pada proses wawancara dengan ustadz Rahmat hal ini dilakukan tidak direncanakan. Wawancara terhadap ustadz Rahmat dilakukan setelah berakhirnya wawancara dengan ustadz Ismail. Pada saat selesai wawancara dengan ustadz Ismail, penulis bertanya kepada ustadz Ismail bahwa penulis ingin melakukan wawancara dengan anggota Hizbut Tahrir Indonesia lainnya yang bisa diwawancarai. Permintaan penulis ini kemudian dikabulkan dan diarahkan untuk bertanya kepada ustadz Rahmat.

Pada wawancara dengan ustadz Rahmat dimulai pada pukul 17.20 pada hari dan lokasi yang sama dengan Ustadz Ismail. Proses wawancara dimulai dengan pengenalan diri penulis dan penyampaian alasan dan tujuan wawancara. Pada proses wawancara tersebut, sama halnya dengan ustadz Ismail, penulis bertanya mengacu pada kuesiner yang penulis telah siapkan. Namun berbeda dengan pertanyaan kepada ustadz Ismail, pertanyaan kepada ustadz Rahmat penulis bedakan terkait struktur organisasi, dimana penulis tidak menanyakannya. Wawancara kemudian berakhir pada pukul 18.00 dikarenakan persiapan shalat maghrib. Pada akhir wawancara penulis kemudian mengucapkan terima kasih dan memberikan bingkisan.

### 3. Miraz Syahrul

Pada tahap awal proses wawancara penulis dengan mas Miraz, diawali dengan janji temu dengan beliau. Penulis mendapatkan kontak beliau setelah penulis menghubungi DPD II HTI Kota Bekasi. Pada saat menghubungi DPD II HTI Kota Bekasi, penulis diberikan beberapa nomor kontak para anggota yang dapat dihubungi. Penulis kemudian menghubungi beberapa kontak dan akhirnya melakukan janji temu dengan mas Miraz dan pak Suryono pada Hari Jumat 14 oktober 2016 setelah ba'da shalat jum'at atau sekitar pukul 13.00 WIB di Masjid Al Azhar Jaka Permai.

Pada proses wawancara dimulai pada sekitar pukul 13.15. Wawancara dimulai dengan pengenalan diri penulis serta alasan dan tujuan melakukan wawancara. Penulis kemudian menanyakan beberapa pertanyaan mengacu pada kuesioner yang penulis telah siapkan. Pada pertanyaan-pertanyaan tersebut, penulis menitik beratkan pada pandangannya mengenai islam, politik, dan aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia. Pada tanggapannya, mas Miraz menjawab dengan singkat dan normatif. Wawancara kemudian berakhir pada pukul 14.20 yang lalu penulis mengucapkan terima kasih dan memberikan bingkisan.

### 4. Suryono Putra

Pada wawancara dengan pak Suryono dilakukan pada waktu dan tempat yang sama dengan mas Miraz. Pada proses wawancara, pak Suryono ditanya setelah berakhirnya sesi tanya-jawab dengan mas Miraz yaitu pada sekitar pukul 13.45. Pada proses wawancara dengan pak Suryono, sama halnya dengan mas Miraz, pertanyaan-

pertanyaan mengacu pada kuesioner yang penulis telah siapkan. Pada pertanyaan-pertanyaan tersebut, penulis menitik beratkan pada pandangannya mengenai islam, politik, dan aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia. Pada tanggapan yang beliau berikan kemudian dilakukan dengan baik dan lebih terbuka. Wawancara kemudian berakhir pada pukul 14.20 yang lalu penulis mengucapkan terima kasih dan memberikan bingkisan.

#### 5. Ari Rachmayanti

Proses awal wawancara dengan mbak Ari diawali pada saat wawancara dengan mas Miraz dan pak Suryono. Pada saat wawancara tersebut, penulis menanyakan kepada mereka apakah dapat membantu penulis untuk mewawancarai anggota wanita Hizbut Tahrir Indonesia. Pada hal tersebut kemudian diarahkan kepada mbak Ari. Wawancara kemudian dijadwalkan oleh mas Miraz yang dilakukan pada hari senin 17 oktober 2016 di rumah mbak Ari.

Pada proses wawancara dimulai pada pukul 09.45 di Masjid Al-Barokah Kranggan Permai. Lokasi wawancara berpindah dari yang awalnya di rumah mbak Ari ke Masjid Al-Barokah. Pada wawancara tersebut, mas Miraz ikut serta dalam proses wawancara. Pada proses tanya-jawab, pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan mengacu pada kuesioner yang penulis telah siapkan. Pada pertanyaan-pertanyaan tersebut, penulis menitik beratkan pada pandangannya mengenai islam, politik, dan aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia. Pada tanggapannya mbak Ari menjawab dengan cukup singkat dan padat.

b. *Library Research*: *Library Research* adalah metode penelusuran terhadap sumber-sumber tertulis tentang suatu pemikiran atau fenomena. Metode ini penulis gunakan untuk menggali pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia yang terdapat dalam buku primer maupun sekunder.

Kemudian, untuk mempermudah penulis dalam mengumpulkan data dan lebih lanjut menganalisisnya, penulis membagi sumber data menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan kepada penulis. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan anggota Hizbut Tahrir Indonesia. Teknik yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan wawancara berstruktur dengan panduan pertanyaan-pertanyaan yang berada dalam kuesioner. Kuesioner digunakan sebagai panduan penulis agar dapat memperoleh data yang diinginkan. Namun seringkali dengan memakai wawancara berstruktur saja tidak cukup hasilnya sehingga digunakan pula teknik wawancara mendalam yang diharapkan dapat menunjang dan meningkatkan mutu dan kualitas data yang diperoleh di lapangan.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah diolah oleh pihak lain. Data ini memberikan gambaran serta pedoman bagi penelitian ini. Data sekunder ini bisa berasal dari berbagai studi literatur, buku-buku, artikel, jurnal, suatu instansi atau lembaga yang berkepentingan, internet dan sebagainya.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini akan disusun dalam lima bab yang dimaksudkan agar mampu memberikan gambaran yang terpadu tentang hubungan hizbut tahrir indonesia dengan partisipasi politik.

Bab pertama bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, permasalahan penelitian, tujuan dan signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konsep/kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Pada latar belakang masalah dijelaskan bagaimana hizbut tahrir indonesia yang merupakan sebuah organisasi masyarakat keagamaan yang berbeda dan unik dibanding organisasi masyarakat keagamaan lain. Pada permasalahan penelitian dijabarkan apa saja pokok yang akan dibahas pada skripsi ini. Dalam tujuan dan signifikansi dijelaskan mengenai tujuan atau manfaat serta signifikasinya. Kerangka konsep/kerangka teori menjabarkan teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis yaitu konsep gerakan sosial, konsep gerakan sosial keagamaan, konsep politik massa (perilaku politik dan mobilisasi politik), dan konsep konstruksi sosial. Pada metodologi penelitian akan dijelaskan subjek penelitian; lokasi penelitian dan waktu penelitian; peran peneliti; dan teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data. Sistematika penulisan akan dijelaskan inti bahasan yang akan dijelaskan setiap bab-bab nya.

Bab kedua memaparkan gambaran umum tentang Hizbut Tahrir Indonesia. Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu yang memaparkan deskripsi Hizbut Tahrir Indonesia. Deskripsi Hizbut Tahrir Indonesia yang pertama menjelaskan sejarah Hizbut Tahrir

dan profil Hizbut Tahrir Indonesia. Pada deskripsi kedua, menjelaskan ideologi dan formulasi islam sebagai dasar gerakan.

Bab ketiga akan memaparkan temuan penelitian Hizbut Tahrir Indonesia dalam arena politik, bab ini memuat aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia, dan peranserta politik Hizbut Tahrir Indonesia pada Pileg dan Pilpres 2014. Aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia berisi pemaparan aktivitas apa saja yang dilakukan hizbut tahrir indonesia dan penjelasan dari segi konsep gerakan sosial. Peranserta politik Hizbut Tahrir Indonesia memaparkan temuan penelitian mengenai aktivitas politik apa saja yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia pada Pileg dan Pilpres 2014.

Bab keempat merupakan analisis. Point-point yang akan dianalisis adalah analisis terhadap ideologi hizbut tahrir indonesia sebagai gerakan sosial keagamaan di Indonesia dengan peranserta politik Hizbut Tahrir Indonesia dengan konsep gerakan sosial keagamaan dan konstruksi sosial. Serta berisi kritikan penulis terhadap peranserta politik Hizbut Tahrir Indonesia.

Bab kelima penutup, yang memuat kesimpulan sebagai penegasan dan jawaban atas permasalahan yang diangkat, kemudian akan diberikan saran-saran dan kata penutup.

## **BAB II**

# **GERAKAN SOSIAL KEAGAMAAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA**

### **2.1 Pengantar**

Sejak abad XIII Hijriyah atau XIX Masehi, telah berdiri barbagai gerakan yang bertujuan untuk membangkitkan umat Islam. Upaya-upaya tersebut sejauh ini belum meraih keberhasilan, sekalipun meninggalkan pengaruh yang cukup berarti bagi generasi yang datang sesudahnya untuk meneruskan. Di Indonesia, gerakan yang membangkitkan umat islam ini dari pengaruh paham sekuler mulai berkembang. Hal ini ditandai saat masuk pada era reformasi. Gerakan-gerakan untuk membangkitkan umat Islam mendapat ruang gerak yang begitu luas, salah satunya yakni dengan menawarkan berbagai formulasi *syari'ah* hingga penegakan *Khilafah Islamiyah/Daulah Islamiyah* (Negara Khilafah Islam) .

Salah satu gerakan itu ialah Hizbut Tahrir. Gerakan ini merupakan gerakan sosial keagamaan transnasional yang bergerak pada politik Islam modern yang memiliki paradigma integralistik dalam memandang hubungan antara agama dan politik.<sup>94</sup> Kecenderungan integralistik memandang Islam sebagai suatu agama yang lengkap dengan aturan-aturan, petunjuk, bimbingan yang mengatur segala aspek kehidupan tiap hari, termasuk kehidupan bermasyarakat dan berpolitik

---

<sup>94</sup>Zainal Abidin, *Loc. Cit.*

## **2.2 Gerakan Sosial Keagamaan Hizbut Tahrir**

### **2.2.1 Sejarah Hizbut Tahrir**

Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds (Baitul Maqdis), Palestina. Gerakan yang menitik beratkan perjuangan membangkitkan umat Islam di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah ini dipelopori oleh Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama alumni Al-Azhar Mesir, dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina.<sup>95</sup>

Asy-Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani dilahirkan di desa Ijzim pada tahun 1909 M atau 1910 M. Beliau tumbuh dan besar di rumah yang sangat memperhatikan ilmu dan agama. Ayah beliau Asy-Syeikh Ibrahim An-Nabhani adalah seorang Syeikh dan sebagai tenaga pengajar ilmu-ilmu syariah di Kementrian Pendidikan Palestina. Sementara ibu beliau juga menguasai beberapa cabang ilmu syariah, yang diperolehnya dari ayahnya, Asy-Syeikh Yusuf An-Nabhani, salah seorang di antara para ulama yang menonjol di Daulah Utsmaniyah. Asy-Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani mulai melakukan mulai melakukan aktivitas untuk tujuan membentuk sebuah partai di kota Al-Quds tahun 1948 M.<sup>96</sup> Beliau terus melakukan kontak dan diskusi hingga mampu meyakinkan sekelompok di antara para ulama terpandang, para hakim terkemuka, serta para tokoh politik dan pemikiran terkenal untuk mendirikan sebuah partai politik yang berasaskan Islam. Penyebaran dan

---

<sup>95</sup> Sejarah Hizbut Tahrir diakses melalui <https://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/> Sabtu 8/Oktober/2016 pukul 09.35.

<sup>96</sup> Muhammad Muhsin Rodhi, *Op. Cit*, hlm 60.

publikasinya kemudian mulai tersebar luas bahkan melebihi kuantitas yang sebenarnya.

Pada tanggal 17 November 1952, Asy-Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani mengajukan permohonan kepada Departemen Dalam Negeri Yordania sesuai Undang-Undang Organisasi al-Utsmani yang berlaku waktu itu.<sup>97</sup> Kemudian, setelah Hizbut Tahrir melengkapi prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Organisasi al-Utsmani, dan mengirimkan permohonan pendirian partai kepada pemerintah sesuai dengan anggaran dasarnya dan mempublikasikan pendiriannya melalui harian ash-Sharih edisi 176 tanggal 14 Maret 1953, maka Hizbut Tahrir menjadi partai sah (legal), mulai hari Sabtu 28 Jumadil Tsani 1372 H./14 Maret 1953 M.<sup>98</sup>

Hizbut Tahrir dalam deklarasi memperkenalkan dirinya pada buku-buku dan pamflet-pamflet yang dikeluarkannya, bahwa Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam.<sup>99</sup> Politik merupakan aktivitasnya, dan Islam adalah ideologinya. Hizbut Tahrir bergerak di tengah-tengah masyarakat serta umat, dan bersama berjuang untuk menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, serta membimbing untuk mendirikan kembali sistem *khilafah* dan menegakkan hukum/*syariat* yang diturunkan Allah swt dalam realitas kehidupan. Dengan demikian, ketika Hizbut Tahrir menetapkan dirinya sebagai sebuah partai politik yang tegak di atas Islam, maka Hizbut Tahrir bukan organisasi kerohanian yang sifatnya

---

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm 91-92.

<sup>98</sup> *Ibid*.

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm 31-32.

kependetaan, bukan lembaga ilmiah, bukan lembaga pendidikan, dan bukan pula lembaga yang hanyamelakukan aktivitas-aktivitas sosial. Juga, aktivitas Hizbut Tahrir tidak hanya memberi nasihat dan bimbingan saja. Hingga saat ini, Hizbut Tahrir memiliki pengikut yang tersebar luas di 40 negara dengan membentuk cabang-cabang seperti di Suriah, Lebanon, Kuwait, Irak, Arab Saudi, Afrika Utara, Tunisia, Sudan, Turki, Pakistan, Malaysia, Inggris, Perancis, Jerman, Australia, termasuk Indonesia, meskipun di beberapa negara tidak mendapat pengakuan resmi.<sup>100</sup>

### **2.2.2 Hizbut Tahrir Indonesia**

Hizbut Tahrir (HT) sebagai gerakan Islam transnasional masuk ke Indonesia pada tahun 1983, dibawa oleh Abdurrahman al-Baghdadi, seorang *mubaligh* (penceramah) sekaligus aktivis Hizbut Tahrir dari Australia yang berasal dari Yordania.<sup>101</sup> Abdurrahman datang ke Bogor untuk mengajar di Pondok Pesantren al-Ghazali, kemudian Masjid Al-Ghifari IPB dijadikan sebagai tempat penyemaian ide-ide HT kepada mahasiswa. Dalam hal tersebut kemudian para mahasiswa memiliki tugas untuk memperkenalkan paham Hizbut Tahrir kepada aktivis mahasiswa lain di perguruan tingginya yang aktif di lembaga dakwah kampus (LDK). LDK yang dihuni oleh sebagian mahasiswa yang telah menerima ideologi islam Hizbut Tahrir, secara kelembagaan berkembang menjadi Forum Silaturrahi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) pada tahun 1986. Muhammad Ismail Yusanto, aktivis Jama'ah Shalahuddin

---

<sup>100</sup> Dedy Slametriyadi, *Op. Cit*, hlm 35.

<sup>101</sup> Sudarno Shobron, *Op. Cit*, hlm 54.

Universitas Gadjah Mada, menjadi salah satu pendiri forum ini, dan forum tersebut menjadi cikal-bakal perkembangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Hizbut Tahrir Indonesia resmi melakukan aktifitasnya di Indonesia secara terbuka sejak tahun 2000, pasca runtuhnya rezim Soeharto. Hizbut Tahrir dalam konteks Indonesia kemudian dikenal dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia kemudian disingkat dengan HTI yang saat itu diketuai oleh Hafidz Abdurrahman. HTI dalam deklarasinya menyebutkan diri mereka adalah sebuah partai politik tapi mereka merupakan organisasi masyarakat yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri dengan Nomor 44/D.III.2/VI/2006.<sup>102</sup>

### Gambar II.1: Legalitas Hizbut Tahrir Indonesia



Sumber: <http://dokumen.tips/download/link/legalitas-hizbut-tahrir-indonesia>

<sup>102</sup>Agung Wijaksono, *Op. Cit*, hlm 3 .

Dilihat pada legalitas tersebut, Hizbut Tahrir Indonesia sebagai sebuah organisasi masyarakat yang legal tentulah kemudian memiliki struktur organisasi. Pada struktur organisasi Hizbut Tahrir Indonesia, saat ini Ketua Umum Nasional atau Ketua DPP HTI ditugaskan pada Rokhmat S Labib. Pada jabatan struktur organisasi yang lain kemudian dijabat oleh Muhammad Rahmat Kurnia sebagai Ketua Lajnah Fa'aliyah DPP HTI. Lalu pada jabatan lainnya bertindak sebagai penanggungjawab kewilayahan nasional disebut Juru Bicara (Jubir), saat ini untuk Indonesia dipegang oleh Muhammad Ismail Yusanto. Dalam urusan muslimah, Hizbut Tahrir Indonesia kemudian menjadi Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia. Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia kemudian memiliki struktur organisasi sendiri yang masih terkait dengan struktur Hizbut Tahrir Indonesia. Pada Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia, Ketua DPP Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia dijabat oleh Ismah Kholil. Sedangkan pada Juru Bicara Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia diamanahkan kepada Iffah Ainur Rochmah.

### **Gambar II.2: DPP Hizbut Tahrir Indonesia**



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2016)

Pada hal keanggotaan, Hizbut Tahrir Indonesia menerima keanggotaan setiap orang Islam, baik laki-laki maupun wanita, tanpa memperhatikan apakah mereka keturunan Arab atau bukan, berkulit putih ataupun hitam.<sup>103</sup> Dalam proses atau tahapan untuk menjadi anggota HTI, seseorang harus melewati tahapan yang relatif panjang. Pertama-tama harus mengikuti *halaqah 'am* (kelompok) yang berlangsung kira-kira selama satu tahun. Setelah mengikuti *halaqah 'am*, masih ada tahapan berikutnya yang harus dilewati, yaitu *tathqif murakaz*. Dalam tahapan ini, Hizbut Tahrir membagi halaqah ke dalam dua jenjang.<sup>104</sup> Jenjang pertama disebut *darisin*, yakni seseorang yang (sebatas) mengkaji secara mendalam ide-ide Hizbut Tahrir Indonesia. Jenjang kedua, *hizbiyyin*. Pada jenjang ini seseorang dinyatakan sebagai anggota Hizbut tahrir. Dalam komitmen calon anggota Hizbut Tahrir Indonesia dinyatakan dalam bentuk *qosam* (sumpah) di hadapan *musyrif* dan *masy'ul* (penanggung jawab).

Pada perkembangannya Hizbut Tahrir Indonesia kini telah menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah pelosok seperti Serui, Kaimana, Merauke, Timika, Sorong, Wamena dan Kepi dekat Asmat di Papua, Kepulauan Sula dan Pulau Buru di Maluku Utara serta Kepulauan Kei di Maluku dan Kepulauan Sangir dekat Mindanao di Sulawesi Utara. Juga di kepulauan Wakatobi dan Ereka Buton Utara di Sulawesi Tenggara, Soroako di Sulawesi Selatan dan Mamuju di Sulawesi Barat. Pada pelosok Kalimantan sudah menjangkau di Manis Mata dan

---

<sup>103</sup>Tentang Kami diakses melalui <https://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/> Sabtu 8/Oktober/2016.

<sup>104</sup>Syamsul Arifin, *Ideologi Dan Praksis Gerakan Kaum Fundamentalists: Pengalaman Hizbut Tahrir Indonesia*, (Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), hlm 165.

sekitarnya di daerah perbatasan Kalimantan Barat dan Tengah. Di Kalimantan Selatan dakwah berkembang hingga ke daerah Tanjung. Di Sumatera, dakwah sudah masuk ke daerah Gayo Lues di Aceh, sebuah wilayah di tengah Propinsi NAD, yang jauh dari manapun. Sedang di Jawa, dakwah sudah menyeluruh di kota dan kabupatennya dan telah berkembang hingga ke daerah pelosok seperti Dayeuh Luhur, kawasan perbukitan di utara kota Banjar Patroman, Jawa Barat dan kepulauan Kangean di Madura.<sup>105</sup>

## **2.3 Formulasi Nilai Islam Hizbut Tahrir**

### **2.3.1 Mabda Islam Hizbut Tahrir**

Hizbut Tahrir menjelaskan ideologi (*mabda*) sebagai *akidah 'aqliyah* (*akidah* rasional/*akidah* hasil olahan pemikiran) yang darinya lahir peraturan hidup yang menyeluruh sebagai sistem kehidupan.<sup>106</sup> Yang dimaksud *akidah* adalah pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan hidup; serta tentang apa yang ada sebelum dan setelah kehidupan, di samping hubungannya dengan sebelum dan sesudah alam kehidupan. Sedangkan peraturan yang lahir dari *akidah* tidak lain berfungsi untuk memecahkan dan mengatasi berbagai problematika hidup manusia, menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan pemecahannya, memelihara *akidah* serta untuk mengemban *mabda*. Penjelasan tentang cara pelaksanaan, pemeliharaan *akidah*, dan penyebaran risalah dakwah inilah yang dinamakan *thariqah*. Sedangkan yang

---

<sup>105</sup> Antara Pusat Dan Daerah diakses melalui <https://hizbut-tahrir.or.id/2012/10/03/antara-pusat-dan-daerah/> Sabtu 8/Oktober/2016.

<sup>106</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Loc. Cit.*

selian itu, yaitu *akidah* dan berbagai pemecahan masalah hidup tercakup dalam *fikrah*.

Jadi *mabda* mencakup dua bagian, yaitu *fikrah* dan *thariqah*.<sup>107</sup> Yang dimaksud dengan pemikiran (*fikrah*) adalah akidah dan hukum-hukum *syara'* yang menjelaskan solusi-solusi atau jawaban atas berbagai problematika kehidupan. Sedang yang dimaksud dengan metode (*thariqah*) adalah cara penerapan hukum-hukum (solusi-solusi) serta cara memelihara akidah.<sup>108</sup>

Pada Hizbut Tahrir, *mabda* berasal dari benak seseorang, baik melalui wahyu Allah (Al Qur'an) atau dari akal/kejeniusan yang nampak pada diri orang. *Mabda* yang muncul dalam benak manusia melalui wahyu Allah adalah *mabda* yang benar. Sedangkan *mabda* yang muncul dalam benak manusia karena kejeniusan yang nampak pada dirinya adalah *mabda* yang salah (*bathil*).

Atas dasar inilah asas suatu *mabda* (ideologi) adalah ide dasar yang menyeluruh mengenai alam semesta, manusia, dan hidup. Sedangkan keberadaan *thariqah* yang membuat *mabda* ini terwujud dan terlaksana dalam kehidupan adalah suatu keharusan dan kebutuhan dasar bagi ide itu sendiri agar *mabda* itu terwujud. Dari sini, satu-satunya *thariqah* yang ditempuh untuk menerapkan peraturan adalah melalui negara.

Ide dasar yang bersifat menyeluruh menjadi asas, karena ide dasar tersebut menjadi *akidah* bagi *mabda*. *Aqidah* itu pula yang menjadi *qaidah fikriyah* (kaedah

---

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> Muhammad Muhsin Rodhi, *Op. Cit.*, hlm 278.

berpikir) sekaligus sebagai kepemimpinan berpikir (*qiyadah fikriyah*).<sup>109</sup> Dengan landasan tersebut ditentukan arah pemikiran manusia dan pandangan hidupnya. Dengan landasan itu juga dapat dibangun seluruh pemikiran dan dapat dilahirkan seluruh pemecahan problematika kehidupan.

Pada pengertian *mabda* (ideologi) Islam Hizbut Tahrir Indonesia, hal ini kemudian sesuai dengan yang dikemukakan Immanuel Kant, ideologi sebagai hasil pemikiran manusia mengenai politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, tidak akan dapat lepas terhadap kepercayaan adanya Yang Maha Ghaib, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan terlepas dari pada pengalaman-pengalaman yang telah dialami manusia pada masa silam dan masa sekarang.<sup>110</sup>

Namun demikian, adanya pemikiran (*fikrah*) dan metode pelaksanaan (*thariqah*) pada suatu *akidah* yang memancarkan peraturan, tidak berarti bahwa *mabda* itu pasti benar. Itu hanya sekadar menunjukkan sebuah *mabda*. Yang menjadi indikasi benar atau salahnya suatu *mabda* adalah *akidah* *mabda* itu sendiri, apakah benar atau salah. Sebab, kedudukan *akidah* adalah sebagai *qaidah fikriyah*, yang menjadi asas bagi setiap pemikiran yang muncul. *Akidah* jugalah yang menentukan pandangan hidup dan yang melahirkan setiap pemecahan problematika hidup serta metode pelaksanaannya (*thariqah*). Jika *qaidah fikriyah*-nya benar, maka *mabda* itu benar. Sebaliknya, jika *qaidah fikriyah*-nya salah, maka *mabda* itu dengan sendirinya salah dari akarnya. *Qaidah fikriyah* yang benar apabila sesuai dengan fitrah manusia

---

<sup>109</sup> Taqiyuddin An-nabhani, *Op. Cit*, hlm 49.

<sup>110</sup> Sukarna, *Op. Cit*, hlm 2.

(kelemahan dan kebutuhan diri manusia pada Yang Maha Pencipta) dan dibangun berlandaskan akal. Sebaliknya, jika bertentangan dengan fitrah manusia atau tidak dibangun berlandaskan akal, maka kaedah itu bathil.

Terkait hal tersebut, dalam pandangannya (Hizbut Tahrir) menjelaskan ideologi (*mabda*) di dunia ini hanya ada tiga ideologi saja, yaitu Kapitalisme, Sosialisme termasuk di antaranya Komunisme, dan ideologi yang ketiga adalah Islam.<sup>111</sup> Islam adalah ideologi, sebab *akidahnya* adalah *akidah* rasional yang darinya dilahirkan sistem kehidupan, yaitu hukum-hukum syara' yang memberikan solusi (jawaban) atas berbagai problematika kehidupan. Komunisme adalah ideologi, sebab *akidahnya* adalah *akidah* rasional yang darinya dilahirkan sistem kehidupan, yaitu berupa pemikiran-pemikiran yang memberikan solusi (jawaban) atas berbagai problematika kehidupan. Kapitalisme adalah ideologi, sebab *akidahnya* adalah *akidah* rasional yang di atasnya dibangun sistem kehidupan, yaitu berupa pemikiran-pemikiran yang memberikan solusi (jawaban) atas berbagai problematika kehidupan.

Hizbut Tahrir memutuskan bahwa ideologi Komunisme dan Kapitalisme keduanya merupakan *mabda* yang gagal.<sup>112</sup> Sebab *akidah* yang menjadi asas kedua ideologi ini tidak dibangun di atas akal, dan tidak sesuai dengan fitrah manusia. Hal ini dikarenakan *mabda* Komunisme dan Kapitalisme keduanya berasal dari benak/akal manusia yang terbatas (*mabda* yang salah/*bathil*), yang tidak mampu menjangkau segala sesuatu yang nyata. Disamping itu pemahaman manusia terhadap

---

<sup>111</sup> Muhammad Muhsin Rodhi, *Op. Cit*, hlm 280.

<sup>112</sup> *Ibid.*

proses lahirnya peraturan selalu menimbulkan perbedaan, perselisihan, dan pertentangan, serta selalu terpengaruh lingkungan tempat ia hidup. Sehingga membuahakan peraturan yang saling bertentangan, yang mendatangkan kesengsaraan bagi manusia.

Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh ustadz Ismail, yaitu:<sup>113</sup>

Pada ideologi lainnya yang sekuleristik tadi lahirlah berbagai bentuk tatanan yang jauh dari nilai-nilai Islam. Yakni tatanan ekonomi yang kapitalistik, perilaku politik yang oportunistik dan machiavellistik, budaya hedonistik yang amoralistik, kehidupan sosial yang egoistik dan individualistik, sikap beragama yang sinkretistik serta sistem pendidikan yang materialistik. Kemudian, bukan kebaikan yang diperoleh oleh rakyat Indonesia yang mayoritas muslim itu, melainkan berbagai problem berkepanjangan yang datang secara bertubi-tubi. Lihatlah, meski Indonesia adalah negeri yang amat kaya dan sudah lebih dari 70 tahun merdeka, tapi sekarang ada lebih dari 100 juta orang terpaksa hidup dalam kemiskinan.

Oleh karenanya Hizbut Tahrir menyatakan satu-satunya *mabda* yang benar ialah *mabda* Islam. *Mabda* yang muncul dalam benak manusia melalui wahyu Allah (Al Qur'an) adalah *mabda* yang benar. Karena bersumber dari *Al-Khaliq*, yaitu Pencipta alam, manusia, dan hidup, yakni Allah SWT. *Mabda* ini pasti kebenarannya (*qath'i*).

Seperti yang disampaikan oleh ustadz Rahmat:<sup>114</sup>

Ideologi islam adalah ideologi yang benar karena bersumber dari Allah

Pada Hizbut Tahrir, *mabda* Islam menerangkan bahwa di balik alam semesta, manusia, dan hidup, terdapat *Al-Khaliq* yang menciptakan segala sesuatu, yaitu Allah SWT. Asas *mabda* ini adalah keyakinan akan adanya Allah SWT. *Akidah* ini yang

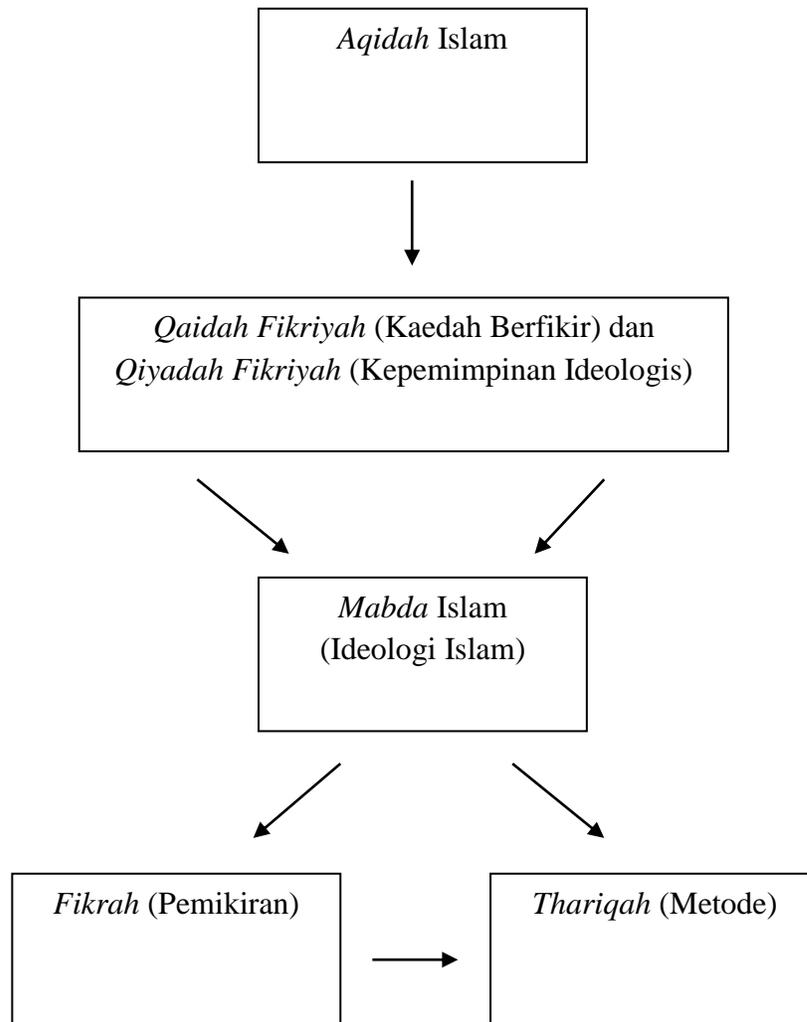
<sup>113</sup> Wawancara Dengan M. Ismail Yusanto Pada Kamis 3/November/2016.

<sup>114</sup> Wawancara Dengan M. Rahmat Kurnia Pada Kamis 3/November/2016.

menentukan aspek rohani, yaitu bahwa manusia, hidup, dan alam semesta, diciptakan oleh *Al-Khaliq*. Dari sini nampak bahwa hubungan antara alam sebagai makhluk, dengan Allah SWT sebagai Pencipta adalah aspek rohani yang ada pada alam.

Adapun dalam *mabda* Islam mereka, maka tujuan-tujuan utama untuk menjaga masyarakat bukan ditentukan oleh manusia, akan tetapi berasal dari perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya. Aturan ini selalu tetap keadaannya, tidak akan pernah berubah dan berkembang. Karena itu, melestarikan eksistensi manusia, menjaga akal, kehormatan, jiwa, kepemilikan individu, agama, keamanan dan negara, merupakan tujuan-tujuan utama yang sudah baku, tidak akan pernah berubah atau berkembang. Untuk menjaganya, dibuatkan sanksi-sanksi yang tegas. Maka, dibuatlah hukum-hukum yang berupa *hudud* (sanksi dari Allah) dan *uqubat* (sanksi pidana) untuk menjaga tujuan-tujuan yang bersifat baku tersebut. Pelaksanaan pemeliharaan tujuan-tujuan ini wajib adanya, sebab termasuk dalam perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya, bukan karena akan menghasilkan nilai-nilai yang sifatnya materi.

Pada *mabda* Islam Hizbut Tahrir Indonesia, dilihat dari prinsip-prinsip *scientific management* ideologi, *mabda* Islam Hizbut Tahrir Indonesia cenderung telah memenuhinya. Selain itu, *mabda* Islam Hizbut Tahrir Indonesia juga cenderung telah memenuhi ciri-ciri ideologi yang sukses. Hal ini terlihat dari setiap aktivitas yang dilakukannya mengacu pada *mabda* Islam, serta *mabda* Islam mereka memberikan solusi, dikemukakan sederhana, memiliki dasar moral, serta menunjukkan adanya kelompok pilihan.

**Skema II.1 : Kerangka Berfikir *Mabda* (Ideologi) Islam Hizbut Tahrir**

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2016)

### 2.3.2 Islam sebagai Landasan Gerakan

Pada segala aktivitasnya pemikiran yang menjadi dasar berdirinya Hizbut Tahrir adalah pemikiran Islam. Pemikiran itu meliputi *akidah* Islam, pemikiran-pemikiran yang dibangun di atasnya, serta hukum-hukum yang lahir darinya. Hizbut Tahrir tidak cukup menjalankan pemikiran Islam yang sifatnya umum (global). Namun, Hizbut Tahrir mengadopsi sejumlah pemikiran yang diperlukannya dalam aktivitas *isti'naf al-hayah al-islamiyah* (mengembalikan kehidupan yang islami), dan mengemban dakwah Islam dengan mendirikan Negara *Khilafah*.<sup>115</sup> Hizbut Tahrir menjelaskan setiap pemikiran yang diadopsinya dalam buku-buku dan pamflet-pamflet yang dikeluarkannya, serta menjelaskan untuk setiap hukum, pendapat, pemikiran dan konsep dalil-dalilnya secara terperinci.

Pada latar belakang pendiriannya kemudian, selain pemikiran Islam yang menjadi dasar pendirian, hal tersebut kemudian dirincikan pada 3 alasan utama/latar belakang berdirinya *harakah* Hizbut Tahrir, yaitu;

#### 2.3.2.1 Memenuhi Seruan Allah swt

Memenuhi seruan Allah swt. ini merupakan sebab pertama yang melatarbelakangi berdirinya Hizbut Tahrir. Sebab, Allah swt. dalam firman-Nya:

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung." (Ali Imran 3 : 104)

---

<sup>115</sup> Muhammad Muhsin Rodhi, *Op. Cit*, hlm 39.

Ayat tersebut memerintahkan kaum muslimin agar di antara mereka terdapat jamaah (kelompok) yang melakukan dua perkara. Pertama, menyeru kepada kebajikan, yakni menyeru kepada Islam. Kedua, menyeru kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkar*.

Dari uraian ayat-ayat tersebut, Hizbut Tahrir berkesimpulan bahwa adanya perintah untuk mendirikan jamaah (kelompok) yang menjalankan dua perkara ini masih sekedar *ath-tholab* (tuntutan/ajakan), namun ada *qarinah* (indikasi) yang menunjukkan bahwa ini bukan sekedar tuntutan biasa, tetapi suatu *tholab jazim* (keharusan).<sup>116</sup> Melihat hal tersebut aktivitas yang telah ditetapkan ayat, harus dijalankan oleh *jamaah* (kelompok) ini merupakan menyeru kepada yang *ma'ruf* serta mencegah dari yang *munkar* merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan kaum muslimin. Pada kegiatan jamaah (kelompok) ini kemudian dikuatkan oleh banyak ayat dan hadits yang menunjukkan wajibnya hal tersebut.

Terkait hal tersebut, ustadz Ismail menyampaikan:<sup>117</sup>

Terdapat banyak ayat dan hadits yang menyerukan dalam kewajiban seorang muslim untuk melaksanakan *amar maruf nahi munkar*, salah satunya, Demi Dzat yang jiwaku ada dalam kekuasaan-Nya. Kamu akan benar-benar menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Atau jika tidak kamu lakukan-sungguh Allah akan segera mengirim atas kalian bencana dari sisi-Nya. Kemudian, kamu sungguh-sungguh berdo'a kepada-Nya. Namun, Allah sudah tidak menerima lagi do'a kalian. Ayat lainnya yaitu yang terdapat pada Ali Imran ayat 104

---

<sup>116</sup> *Ibid*, hlm 32.

<sup>117</sup> Data Wawancara M. Ismail Yusanto Dengan Redaksi Majalah Al Wa'ie.

Hadits ini kemudian menjadi salah satu *qarinah* (indikasi) bahwa *at-tholab* (tuntutan/ajakan) itu merupakan *tholab jazim* (keharusan), dan perintah yang ada adalah wajib.

### **2.3.2.2 Realitas Umat Islam**

Alasan kedua yang melatarbelakangi berdirinya Hizbut Tahrir adalah kemunduran yang menimpa kaum muslimin; adanya dominasi pemikiran-pemikiran kufur, sistem-sistem kufur dan hukum-hukum kufur, serta kekuasaan negara-negara kafir dan pengaruhnya.<sup>118</sup> Dalam sebuah wawancara yang dilakukan dengan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia, ia menjelaskan mengenai bagaimana pemikiran kufur yang menyebabkan kemunduran umat Islam.

Adapun kutipan wawancara dengan beliau, ialah;<sup>119</sup>

Kemunduran dunia Islam diakibatkan oleh neo imperialisme. Nafsu negara adikuasa untuk tetap melanggengkan dominasi mereka atas dunia Islam, termasuk terhadap Indonesia, demi kepentingan ekonomi dan politik mereka tetap bergelora. Neo imperialisme dilakukan untuk mengontrol politik pemerintahan dan menghisap sumberdaya ekonomi negara lain.

Pada analisisnya Hizbut Tahrir kemudian melihat bahwa kemunduran umat Islam sudah terjadi sejak pertengahan abad ke-12 Hijriyah. Pada saat itu umat Islam mengalami kemunduran yang mengerikan dan menyedihkan, yang tidak pantas dialami oleh umat, yang oleh Allah sendiri dikatakan pada ayat-ayatnya sebagai umat terbaik.

---

<sup>118</sup> Muhammad Muhsin Rodhi, *Op. Cit*, hlm 34.

<sup>119</sup> Wawancara Dengan M. Ismail Yusanto Pada Kamis 3/November/2016.

Kemunduran umat Islam ini, ustadz Rahmat selaku Ketua Lajnah Faaliyah kemudian memberikan tanggapannya:<sup>120</sup>

Kemunduran umat terjadi karena lemahnya kaum muslimin dalam memahami dan mengamalkan Islam

Oleh karenanya, Hizbut Tahrir Indonesia kemudian yakin bahwa sebab terjadinya semua itu adalah kembali pada lemahnya kaum muslimin dalam memahami Islam, dan dalam menyampaikannya. Ditambah dengan pengaruh paham-paham kufur dan budaya-budayanya kemudian menambah keterpurukan umat Islam.

### **2.3.2.3 Aktivitas Mendirikan Negara *Khilafah Islamiyah***

Pada sebab ketiga yang melatarbelakangi berdirinya Hizbut Tahrir adalah penghapusan *khilafah Islamiyah* secara resmi, 28 Rajab 1342H./3 Maret 1924M.<sup>121</sup> Karena hal ini kemudian harus ada aktivitas (amal nyata) yang bertujuan mengembalikan Negara *khilafah*, serta menegakkan kembali hukum-hukum yang telah diturunkan Allah di dalam realitas kehidupan ini. *Khilafah* menurut Hizbut Tahrir ialah "Kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia untuk menegakkan hukum-hukum perundang-undangan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia".<sup>122</sup>

---

<sup>120</sup> Wawancara Dengan M. Rahmat Kurnia Pada Kamis 3/November/2016.

<sup>121</sup> Muhammad Muhsin Rodhi, *Loc. Cit.*

<sup>122</sup> *Ibid*, hlm 384.

Pada kutipan wawancara yang dilakukan dengan ustadz Ismail, ia kemudian menjelaskan arti Khilafah yang sebenarnya serta bagaimana pentingnya Khilafah dan Hukum Syara, yaitu;<sup>123</sup>

*Khilafah* adalah “*ri`asatun ‘ammatun li al-muslimin jami’a fi ad-dunya li iqamati ahkam asy-syar’i al-islamiy wa hamli ad-da`wah al-islamiyyah ila al-‘alam*” atau kepemimpinan umum umat Islam di dunia untuk menegakkan syariat Islam dan mengemban dakwah ke seluruh dunia.

Ia kemudian menjelaskan:<sup>124</sup>

Syariah akan menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan akibat sistem sekuler, dan khilafah akan menghentikan neo-imperialisme yang kini tengah menimpa negeri-negeri Islam, termasuk Indonesia, yang dilakukan oleh negara adikuasa. Kejahatan adikuasa hanya mungkin bisa dihentikan oleh kekuatan adikuasa juga. Itulah khalifah.

Wawancara lainnya dengan ustadz Rahmat terkait Khilafah, ia mengatakan;<sup>125</sup>

Khilafah akan mewujudkan persatuan dengan identitas hakiki kita sebagai sebuah umat. Sementara, dengan syariah, kita sebagai muslim akan dapat merealisasikan seluruh pikiran ideal kita tentang misi hidup kita untuk beribadah kepada Allah swt, karena bukan hanya dalam kehidupan pribadi dan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara juga diatur dengan aturan yang ditetapkan Allah swt.

Hizbut Tahrir Indonesia meyakini bahwa semua kaum muslim wajib menjalankan hukum-hukum yang diturunkan Allah swt. Pada seruan-seruan-Nya, diwajibkan bagi kaum Muslim agar terikat dengan seluruh hukum *syara'*, menegakkan hukum-hukum yang telah diturunkan-Nya, serta menerapkan Islam secara menyeluruh dalam semua urusan kehidupan. Oleh karena itu, UUD dan undang-undang yang lain harus berupa hukum *syara'* yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah SWT.

---

<sup>123</sup> Wawancara Dengan M. Ismail Yusanto Pada Kamis 3/November/2016.

<sup>124</sup> Wawancara Dengan M. Ismail Yusanto Pada Kamis 3/November/2016.

<sup>125</sup> Wawancara Dengan M. Rahmat Kurnia Pada Kamis 3/November/2016.

Oleh karena itu, aktivitas mengembalikan Khilafah, dan penegakan kembali hukum-hukum yang telah diturunkan Allah dalam realitas kehidupan merupakan suatu keharusan, tidak ada pilihan, dan apalagi keringanan.<sup>126</sup> Sehingga, mengabaikan kewajiban ini termasuk kemaksiatan yang terbesar, dan pelakunya akan disiksa oleh Allah dengan siksaan yang paling keras.

### **2.3.3 Aktivitas Islam Politik**

Dalam aktivitas yang dilakukan Hizbut Tahrir, ia bergerak melakukan aktivitasnya;

#### **2.3.3.1 Pembinaan *Tsaqofah Murakazzah***

Pembinaan *Tsaqofah murakazzah* (intensif), yaitu melalui kelompok-kelompok kajian (*halaqah-halaqah*).<sup>127</sup> Hizbut Tahrir Indonesia melakukan pembinaan terhadap para pengikut-nya. *Halaqah* dilakukan secara rutin setiap satu minggu sekali atau dua minggu sekali berdasarkan kesepakatan *musyrif* (pembina) dan *mutarabbi* (murid). Pada suatu halaqah biasanya dilakukan oleh kurang-lebih 5-10 orang. Halaqah tersebut terbentuk dapat berdasarkan lokasi tempat tinggal yang berdekatan, berasal dari tempat kerja/universitas yang sama, maupun karena hubungan *musyrif* dan *mutarabbi* yang dekat.

---

<sup>126</sup> Muhammad Muhsin Rodhi, *Op. Cit*, hlm 384.

<sup>127</sup>Tahapan Dakwah Dan Aktivitas Politik Hizbut Tahrir diakses melalui <https://hizbut-tahrir.or.id/2013/08/13/tahapan-dakwah-dan-aktivitas-politik-hizbut-tahrir/> hari minggu, 25/09/2016 pukul 15.28.

*Halaqah* yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia diperlukan waktu bertahun-tahun dalam membentuk suatu pribadi-pribadi islami. Hal ini karena kitab atau buku pembinaan yang harus dikaji cukup banyak. Belum lagi metode pengkajian kitab yang aslinya ditulis dalam bahasa Arab, yang harus dibaca paragraf demi paragraf, kemudian dijelaskan isi dan pengertiannya oleh *musyrif* (pembina halaqah), yang membuat halaqah memang tidak mungkin diselenggarakan secara kilat. Belum lagi waktu untuk menjawab tuntas pertanyaan-pertanyaan dari para peserta halaqah. Dalam *halaqah* tersebut pun walau semua kitab dan buku pembinaan sudah dikaji, hal ini tidak berakhir. Hal tersebut dikarenakan setiap pribadi membutuhkan *halaqah* untuk menjaga agar pribadinya tetap terjaga sesuai islam. *Halaqah* yang tidak akan berakhir juga karena pribadi yang sudah menerima dan memahami kitab dan buku Hizbut Tahrir memiliki kewajiban untuk mendakwahi orang lain dengan membuka *halaqah* baru yang pribadi tersebut menjadi *musyrif*.

Adapun kitab atau buku pembinaan *halaqah* Hizbut Tahrir Indonesia yang dikaji dalam suatu *halaqah*, antara lain:

1. *Nizhamul Islam* (Peraturan Hidup dalam Islam)
2. *Nizhamul Hukmi fil Islam* (Sistem Pemerintahan dalam Islam)
3. *Nizhamul Iqtishadi fil Islam* (Sistem Ekonomi dalam Islam)
4. *Nizhamul Ijtima'iy fil islam* (Sistem Pergaulan dalam islam)
5. *At-Takattul al-Hizbiy* (Pembentukan Partai Politik)
6. *Mafahim Hizbut Tahrir* (Pokok-pokok Pikiran Hizbut Tahrir)
7. *Daulatul Islamiyah* (Negara Islam)
8. *Al-Khilafah* (Sistem Khilafah)
9. *Syakhshiyah Islamiyah* – 3 jilid (Membentuk Kepribadian Islam)

10. *Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir* (Pokok-pokok Pikiran Politik Hizbut Tahrir)
11. *Nadharat Siyasiyah li Hizbit Tahrir* (beberapa Pandangan Politik Hizbut Tahrir)
12. *Kaifa Hudimatil Khilafah* (Persekongkolan Meruntuhkan *Khilafah*)
13. *Siyasatu al-Iqtishadiyah al-Mutsila* (Politik Ekonomi yang Agung)
14. *Al-Amwal fi Daulatil Khilafah* (Sistem Keuangan Negara *Khilafah*)
15. *Nizhamul 'Uqubat fil Islam* (Sistem Sanksi Peradilan dalam Islam)
16. *Ahkamul Bayyinat* (Hukum-hukum Pembuktian)
17. *Muqaddimatu ad-Dustur* (Pengantar Undang-undang Dasar Negara Islam)

Pada wawancara dengan beberapa informan, mereka mengungkapkan pandangannya terkait *Halaqah*, yaitu;

Pak Suryono mengatakan:<sup>128</sup>

*Halaqah* merupakan sebuah kebutuhan yang dibutuhkan oleh *ruhiyah*. Dalam *halaqah* ini dapat menenangkan hati dan menjauhkan dari problem. Hal ini dikarenakan kita dapat saling meningkatkan dalam kesalahan serta kebaikan dan memotivasi dalam melakukan amal.

*Halaqah* bukan hanya pembinaan dari segi ruhiyah saja namun kami dibina secara secara keseluruhan. Kami dibina dalam hal akhlaq dan pemikiran.

*Halaqah* bukan hanya membicarakan agama dan ide Hizbut Tahrir terus, kami juga membicarakan realitas umat di politik, sosial, dan masalah-masalah umat lainnya.

*Halaqah* wajib dilakukan oleh setiap anggota Hizbut Tahrir yang mengakui fikrah Hizbut Tahrir.

Mas Miraz kemudian juga mengemukakan pendapat, yaitu:<sup>129</sup>

*Halaqah* menjadikan setiap individu yang mengikutinya dapat berfikir dan bertindak sesuai dengan Al Quran dan Hadits.

---

<sup>128</sup> Wawancara Dengan Suryono Putra Pada Jumat 14/Oktober/2016.

<sup>129</sup> Wawancara Dengan Miraz Syahrul Pada Jumat 14/Oktober/2016.

Dalam diri ini, *halaqah* bukan lagi sebuah kewajiban yang terpaksa tetapi sudah menjadi sebuah kebutuhan yang sangat dibutuhkan.

Pada *halaqah* kami mengkaji kitab-kitab dan buku-buku yang menjelaskan mulai dari cara beribadah kepada Allah, cara berhubungan dengan manusia, cara berekonomi, peraturan dalam islam, politik, dan lainnya.

Pada kesempatan lainnya, Mbak Ari menyampaikan:<sup>130</sup>

Dalam *halaqah* merupakan sarana dalam mengenal Islam lebih dalam, menyelami keindahannya, serta mengetahui agama yang sempurna dan lengkap aturannya. Dalam *halaqah* kami dapat bertemu dengan wajah-wajah yang meningkatkan keimanan.

*Halaqah* kemudian dapat dijelaskan sebagai sarana dalam rangka membentuk kerangka gerakan dan memperbanyak pengikut serta mewujudkan pribadi-pribadi yang islami, yang mampu memikul tugas dakwah dan siap mengarungi samudera cobaan dengan pergolakan pemikiran, serta perjuangan politik.

### **2.3.3.2 Pembinaan *Tsaqafah Jama'iyah***

Pembinaan *Tsaqafah jama'iyah* bagi umat dengan cara menyampaikan ide-ide dan hukum-hukum Islam yang telah ditetapkan Hizbut Tahrir Indonesia, secara terbuka kepada masyarakat umum.<sup>131</sup> Aktivitas ini dapat dilakukan melalui pengajian-pengajian di masjid, di aula atau di tempat-tempat pertemuan umum lainnya. *Tsaqafah jama'iyah* dilakukan baik dari tingkat Dewan Pimpinan Pusat maupun Dewan Pimpinan Daerah. . *Tsaqafah Jama'iyah* ini dilakukan baik secara spontan maupun terencana. Pada *Tsaqafah Jama'iyah* yang spontan ialah seperti diskusi berkaitan dengan isu yang baru terjadi. Sedangkan *Tsaqafah Jama'iyah* yang terencana yaitu yang sudah direncanakan dan berlangsung secara rutin hal ini seperti

<sup>130</sup> Wawancara Dengan Ari Rachmayanti Pada Senin 17/Oktober/2016.

<sup>131</sup>Tahapan Dakwah Dan Aktivitas Hizbut Tahrir diakses melalui <https://hizbut-tahrir.or.id/2013/08/13/tahapan-dakwah-dan-aktivitas-politik-hizbut-tahrir/> hari minggu, 25/09/2016 pukul 15.28.

dialog shubuh dan *tasqif* (materi tambahan). Pada *Tsaqafah jamaiyah*, hal ini juga mencakup melalui media massa, buku-buku, atau selebaran-selebaran.

Terkait *Tsaqafah jama'iyah*, kemudian terdapat beberapa tanggapan, salah satunya, Ustadz Ismail Yusanto;<sup>132</sup>

Forum seperti tabligh akbar, diskusi publik, seminar, workshop, training, daurah, temu tokoh dan forum lainnya yang diselenggarakan oleh HTI adalah sebagian cara yang ditempuh HTI untuk menyampaikan penjelasan-penjelasan itu secara massal. Sementara secara personal, dilakukan dengan kontak, audiensi atau silaturahmi kepada para tokoh baik dari kalangan ulama, cendekiawan, birokrat, militer dan kepolisian, pers, pengusaha dan lainnya, yang ada di tengah masyarakat. Selain dengan cara langsung, penjelasan juga disampaikan dengan sarana media massa. HTI memiliki buletin Jumat al Islam, majalah al Waie dan tabloid Media Umat.

*Tsaqafah jama'iyah* ini kemudian dapat disimpulkan bertujuan untuk mewujudkan kesadaran umum di tengah masyarakat, agar dapat berinteraksi dengan umat sekaligus menyatukannya dengan Islam. Juga, untuk menggalang kekuatan rakyat sehingga mereka dapat dipimpin untuk menegakkan *daulah khilafah* dan mengembalikan penerapan hukum sesuai dengan yang diturunkan Allah SWT.

### **2.3.3.3 Perang Pemikiran**

Perang pemikiran (*ash-shira' al-fikriy*)<sup>133</sup>, hal ini dilakukan terhadap ideologi-ideologi *kufur*, *akidah-akidah* yang *kufur*, sistem-sistem *kufur* dan pemikiran-pemikiran *kufur*, dan juga terhadap *akidah-akidah* yang rusak, pemikiran-pemikiran yang salah, dan konsep-konsep yang keliru, dengan cara mengungkap kepalsuannya, kekeliruannya dan kontradiksinya dengan Islam, agar umat terselamatkan darinya dan dari pengaruh-pengaruhnya.

---

<sup>132</sup> Wawancara Dengan M. Ismail Yusanto Pada Kamis 3/November/2016.

<sup>133</sup> Muhammad Muhsin Rodhi, *Op. Cit*, hlm 40.

Aktivitas perang pemikiran ini mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Hal ini dikarenakan setiap aktivitas yang dilakukannya ialah pemikiran politik dimana Hizbut Tahrir Indonesia menyebarkan paham-pahamnya dan mengkritik paham-paham ideologi *kufur*, *akidah-akidah yang kufur*, sistem-sistem *kufur* dan pemikiran-pemikiran *kufur*. Aktivitas perang pemikiran ini tergambar dalam aktivitas dalam melakukan saran-saran maupun kritik-kritik kepada pemerintah maupun birokrasi lainnya baik secara langsung dengan menemui maupun dengan penyebaran melalui media elektronik dan cetak yang dimilikinya.

#### **2.3.3.4 Perjuangan Politik**

Perjuangan politik (*al-kifah as-siyasiy*).<sup>134</sup> Perjuangan politik ini tercermin dalam aktivitas-aktivitas berikut:

- a. Berjuang melawan negara-negara kafir penjajah yang memiliki kekuasaan dan pengaruh di negeri-negeri Islam. Berjuang melawan penjajahan dengan segala bentuknya, baik berupa pemikiran, politik, ekonomi maupun militer. Mengungkap persekongkolan di antara mereka agar umat terselamatkan dari dominasinya, serta terbebaskan dari pengaruhnya dalam berbagai bentuknya.
- b. Menentang para penguasa di negeri-negeri Arab dan negeri-negeri Islam. Mengungkap kejahatannya, mengoreksi dan mengkritiknya, atau bahkan mereformasinya, ketika mereka melakukan pemerkosaan atas hak-hak umat, mengabaikan kewajibannya terhadap umat, melalaikan salah satu urusan di

---

<sup>134</sup> *Ibid.*

antara urusan-urusan umat, atau melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum Islam. Dan juga melakukan pembersihan terhadap pemerintahan yang menerapkan hukum-hukum kufur dan sistem-sistem kufur, kemudian menggantikannya dengan pemerintahan Islam.

Terkait perjuangan politik ini, ustadz Ismail menyampaikan;<sup>135</sup>

HTI melakukan berbagai upaya untuk turut serta bersama komponen umat yang lain menyelamatkan negeri ini melalui berbagai kegiatan politik. Kita menyebutnya *dakwah siyasiah* (dakwah politis). Yang utama adalah seruan kita melalui berbagai cara (unjuk rasa, petisi, penulisan di media massa, diskusi, pengiriman delegasi dan sebagainya) untuk menerapkan syariah Islam dan menghentikan sekularisme, karena inilah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan lebih jauh. Kemudian secara konsisten kita juga mengkritisi tiap kebijakan, seperti kenaikan BBM, penandatanganan DCA dengan Singapura dan sebagainya, dan peraturan seperti RUU APP, UU Migas, UU Sumberdaya Air dan sebagainya yang kita nilai bertentangan dengan syariah.

Melihat hal yang diungkapkan oleh ustadz Ismail tersebut diketahui bahwa Hizbut Tahrir Indonesia melakukan perjuangan politik dengan melakukan dakwah politik. Dakwah politik melalui pemikiran politik. Hizbut Tahrir Indonesia akan melakukan perjuangan politik ini pada saat mereka melihat suatu isu atau hak yang tidak sesuai *mabda* Islam mereka dan tidak berpihak terhadap umat Islam maupun masyarakat umum.

---

<sup>135</sup> Wawancara dengan M. Ismail Yusanto pada Kamis 3/November/2016.

### 2.3.3.5 Mengangkat dan Menetapkan Kemaslahatan Umat

Pada aktivitas Kelima, Hizbut Tahrir Indonesia mengangkat dan menetapkan kemaslahatan umat, yaitu dengan cara melayani dan mengatur seluruh urusan umat, sesuai dengan hukum-hukum *syara*. Pada saat ini dimana belum adanya khilafah yang menjalankan hukum *syara*, Hizbut Tahrir Indonesia melakukan aktivitas dengan cara memberikan pandangan atau *fatwa* terkait peristiwa dan problem aktual yang dihadapi umat islam.

Hizbut Tahrir Indonesia memberikan pandangannya yang kemudian memperjuangkannya yang sesuai dengan hukum *syara*. Aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia ini terlihat dalam Hizbut Tahrir Indonesia dalam mengeluarkan pandangannya terkait problem aktual seperti fatwa mengenai pemilihan dalam pemilu dan fatwa penegakkan *syariat* Islam.

Dengan menjalankan hal tersebut, Hizbut Tahrir mengemban Islam secara pemikiran dan politik. Hal ini bertujuan agar Islam menjadi satu-satunya yang diterapkan, menjadi dasar negara, serta menjadi sumber UUD dan sumber undang-undang yang lain dalam negara.<sup>136</sup> Dengan hal tersebut Hizbut Tahrir dalam aktivitasnya berusaha memberikan pemikiran-pemikiran Islam, hukum-hukum Islam dan solusi-solusi Islam untuk dilaksanakan, serta berusaha mewujudkan semuanya di dalam realitas kehidupan, bernegara dan bermasyarakat.

---

<sup>136</sup> *Ibid.*

## 2.4 Penutup

Gerakan Hizbut Tahrir dalam aktivitas menitik beratkan perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah. Dalam segala aktivitasnya pemikiran yang menjadi dasar berdirinya Hizbut Tahrir adalah pemikiran Islam. Pemikiran itu meliputi akidah Islam, pemikiran-pemikiran yang dibangun di atasnya, serta hukum-hukum yang lahir darinya.

Di Indonesia, Hizbut Tahrir (HT) sebagai gerakan Islam transnasional masuk ke Indonesia pada tahun 1983, dibawa oleh Abdurrahman al-Baghdadi. Ia merupakan seorang mubaligh sekaligus aktivis Hizbut Tahrir dari Australia yang berasal dari Yordania. Hizbut Tahrir Indonesia resmi melakukan aktifitasnya di Indonesia secara terbuka sejak tahun 2000, pasca runtuhnya rezim Soeharto.

Hizbut Tahrir menyatakan satu-satunya *mabda* yang benar ialah *mabda* Islam. *Mabda* yang muncul dalam benak manusia melalui wahyu Allah (Al Qur'an) adalah *mabda* yang benar. Karena bersumber dari *Al-Khaliq*, yaitu Pencipta alam, manusia, dan hidup, yakni Allah SWT. *Mabda* ini pasti kebenarannya (*qath'i*). dengan Allah SWT sebagai Pencipta adalah aspek rohani yang ada pada alam. Dalam *mabda* Islam, tujuan-tujuan utama untuk menjaga masyarakat bukan ditentukan oleh manusia, akan tetapi berasal dari perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya.

## **BAB III**

# **PERANSERTA HIZBUT TAHRIR INDONESIA DALAM ARENA POLITIK**

### **3.1 Pengantar**

Hizbut Tahrir Indonesia memperkenalkan dirinya dalam buku-buku dan pamflet-pamflet yang dikeluarkannya, bahwa Hizbut Tahrir Indonesia adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam. Politik merupakan aktivitasnya, dan Islam adalah ideologinya. Hizbut Tahrir bergerak di tengah-tengah umat, dan bersama mereka berjuang untuk menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, serta membimbing mereka untuk mendirikan kembali sistem Khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah dalam realitas kehidupan.

Aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia adalah aktivitas dakwah politik. Di dalam aktivitas dakwah politiknya ini Hizbut Tahrir memberikan pemikiran-pemikiran Islam, hukum-hukum Islam, solusi-solusi Islam untuk diamalkan, dan diwujudkan dalam realitas kehidupan, negara dan masyarakat. Pemikiran Islam sendiri ialah setiap pemikiran yang digali dari Islam yang mencakup pemikiran tentang akidah dan pemikiran tentang *syariat* (sistem hukum). Artinya, bahwa Hizbut Tahrir dalam melakukan aktivitas-aktivitas pemeliharaan urusan-urusan umat hanya dengan pandangan hidup (*way of live*) Islam saja, bukan yang lainnya.

### **3.2 Peranserta Politik Hizbut Tahrir Indonesia pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014**

Samuel P. Huntington dalam bukunya “*Social Economi Change and Political Participation*” yang dijelaskan pada buku “*Swadaya Politik Masyarakat*”, berkeberatan pembedaan konsep partisipasi politik dan mobilisasi politik.<sup>137</sup> Dengan meenyamakan kedua konsep (partisipasi politik dan mobilisasi politik), masyarakat tidak perlu menilai apakah keterlibatan mereka di dalam proses politik adalah memenuhi keperluan mereka sendiri atau melayani kebutuhan elit politik dan penguasa.<sup>138</sup> Dalam hal ini, kedua konsep (partisipasi politik dan mobilisasi politik) tersebut dimaknai sebagai peranserta politik. Peranserta mengandung arti terlibat tanpa perlu memperhatikan motivasi dari keterlibatan tersebut.

#### **3.2.1 Partisipasi Politik Hizbut Tahrir Indonesia**

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson “*Partisipasi Politik di Negara Berkembang*” mengemukakan bahwa terdapat lima bentuk peran partisipatif politik. Bentuk-bentuk peran partisipatif politik tersebut terdiri dari kegiatan pemilihan, kegiatan lobby, kegiatan organisasi, kegiatan *contacting* (mencari koneksi), dan tindakan kekerasan.<sup>139</sup> Lima bentuk peran partisipatif politik yang umum dilakukan masyarakat.

Bentuk partisipasi politik pertama yaitu kegiatan pemilihan. Kegiatan pemilihan yaitu mencakup kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, akan tetapi juga

---

<sup>137</sup> Arbi Sanit, *Op. Cit*, hlm 93.

<sup>138</sup> *Ibid.*

<sup>139</sup> Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Op. Cit*, hlm 17.

sumbangan-sumbangan mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau setiap tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil proses pemilihan.<sup>140</sup> Pada Hizbut Tahrir Indonesia kemudian terkait dengan pemilihan umum terdapat stigma dimana Hizbut Tahrir Indonesia tidak menghendaki kegiatan pemilihan umum. Hal ini seperti terlihat pada artikel “Din Persilakan HTI Golput, Asal Jangan Mengajak Masyarakat”<sup>141</sup>, “HTI Hasut Umat Islam untuk Golput dalam Pilkada Serentak”<sup>142</sup> dan artikel lainnya “Suara Sumbang Hizbut Tahrir Indonesia”<sup>143</sup>.

Menanggapi stigma dimasyarakat, Hizbut Tahrir Indonesia berpandangan terhadap pemilihan umum yaitu orang memilih atau tidak memilih harus berdasar pada argumen yang kokoh, bukan hanya karena suka atau tidak suka, atau sekadar ikut-ikutan. Bagi Hizbut Tahrir Indonesia pemilu hanyalah cara (*uslub*) dan sarana (*wasilah*) untuk meraih atau mencapai sesuatu. Awalnya hukumnya mubah. Selanjutnya tergantung pada tujuan yang hendak dicapai dengan pemilu itu. Bila tujuannya itu Islami, maka pemilu itu boleh dilakukan. Tapi bila pemilu itu untuk tujuan yang tidak Islami atau bertentangan dengan aqidah dan syariah Islam, misalnya untuk memilih wakil rakyat yang akan menyusun peraturan perundangan

---

<sup>140</sup> *Ibid.*

<sup>141</sup>Din Persilakan HTI Golput, Asal Jangan Mengajak Masyarakat diakses melalui <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/15/12/08/nz1eg3365-din-persilakan-hti-golput-asal-jangan-mengajak-masyarakat> 30/Oktober/2016 pukul 09.35.

<sup>142</sup>HTI Hasut Umat Islam Untuk Golput Dalam Pilkada Serentak diakses melalui <http://islamedia.id/hti-hasut-umat-islam-untuk-golput-dalam-pilkada-serentak/> 30/Oktober/2016.

<sup>143</sup>Suara Sumbang Hizbut Tahrir Indonesia diakses melalui [http://www.kompasiana.com/sultansulaiman/suara-sumbang-hizbut-tahrir-indonesia\\_54f7fcfa33311b2618b47f8](http://www.kompasiana.com/sultansulaiman/suara-sumbang-hizbut-tahrir-indonesia_54f7fcfa33311b2618b47f8) 30/Oktober/2016.

(legislasi) yang tidak Islami atau memilih pemimpin yang akan menerapkan peraturan perundangan sekuler, maka memilih dalam pemilu seperti ini tidak boleh dilakukan.

### Gambar III.1: Pemilihan Menurut HTI pada Sindonews.com

The image shows a screenshot of a news article on the website Sindonews.com. The article title is "HTI ingatkan anggotanya salurkan suara ke Parpol Islam" by Rendra Saputra, dated "Minggu, 2 Juni 2013 - 15:28 WIB". Below the title is a photograph of a protest with people holding signs. The article text is partially highlighted with red boxes. The first box contains the main headline and a sub-headline: "Sindonews.com - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyerukan kepada seluruh anggotanya untuk tidak melakukan aksi golput dalam ajang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang." The second box contains a paragraph: "Hal itu disampaikan Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto dalam keterangan persnya di sela-sela kegiatan puncak Muktamar Khilafah HTI, di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (2/6/2013)." The third box contains a quote: "Pernyataan resmi HTI itu nanti dimaknai seperti apa? Itu semuanya tentu berpulang kepada masing-masing anggota. Mungkin ada yang memaknai oh...Ini PBB, PPP, mungkin ini PAN, PKS, itu adalah hak mereka," kata Muhammad Ismail Yusanto.

Sumber: Sindonews.com

Pada kutipan wawancara dengan ustadz Ismail dan ustadz Rahmat, kemudian mereka mengatakan mengenai partisipasi politik pemberian suara yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia;

Ustadz Ismail mengatakan;<sup>144</sup>

Kami tidak pernah menyatakan golput atau menganjurkan golput. HTI memberikan panduan sebagaimana secara ringkas dinyatakan di atas. Berdasar panduan tersebut, umat

<sup>144</sup> Wawancara Dengan M. Ismail Yusanto Pada Kamis 3/November/2016.

bisa bersikap. Dan menjadi hak individu untuk menetapkan sikapnya dalam menghadapi pemilu nanti. Sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang bebas dan rahasia, maka orang lain tidak boleh tahu tentang pilihan sikap politik seperti apa yang (hendak) diambil oleh seseorang.. Kami selalu ingatkan adalah 'haram hukumnya' memilih caleg atau pemimpin yang tidak bermoral. Kami selalu ingatkan kepada kader dan masyarakat agar memilih caleg dan pemimpin yang peduli pada syariat Islam.

Dan ustadz Rahmat juga menyampaikan:<sup>145</sup>

Dalam pemilu HTI menyerukan kepada kader dan umat, bila hendak memilih, pilihlah calon wakil rakyat yang benar-benar hendak berjuang untuk tegaknya syariah dan khilafah, menjadikan parlemen sebagai mimbar dakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan tidak terlibat dalam proses legislasi yang tidak Islami. Dan bila hendak memilih pemimpin, pilihlah yang muslim, laki-laki, beriman dan bertaqwa, dan yang mau menerapkan syariah secara kaffah dalam sistem khilafah.

Pada sebuah artikel, ustadz Ismail juga mengatakan mengenai pandangan dalam pemberian suara dalam pemilu, yaitu:<sup>146</sup>

Undang-undang pemilu sendiri menyebut bahwa memilih itu hak bukan kewajiban. Orang yang punya hak itu kan dia bisa menggunakan atau tidak, namanya juga hak. Jadi, adalah hak juga setiap orang untuk menggunakan hak pilihnya itu dalam segala bentuk yang dia memang pilih. Termasuk ketika dia tidak memilih, itu juga adalah pilihan.

Bentuk partisipasi politik kedua yaitu lobi. Hizbut Tahrir Indonesia yang menjadi temuan penelitian kemudian hal ini bisa dikatakan sama dengan bentuk partisipasi politik ketiga yaitu kegiatan organisasi. Dalam bentuk partisipasi politik kedua dan bentuk partisipasi ketiga dikatakan sama karena pada individu Hizbut Tahrir Indonesia dalam aktivitas politiknya bertindak sebagai bagian dari Hizbut Tahrir Indonesia atau delegasi bukan bertindak secara personal.

---

<sup>145</sup> Wawancara Dengan M. Rahmat Kurnia Pada Kamis 3/November/2016.

<sup>146</sup> Ismail Yusanto Seharusnya Fatwa Haram Terlibat Dalam Sistem Sekuler diakses melalui <https://hizbut-tahrir.or.id/2009/01/27/ismail-yusanto-seharusnya-fatwa-haram-terlibat-dalam-sistem-sekuler/>.

Pada bentuk kegiatan lobi dan kegiatan organisasi berdasar temuan penelitian terhadap informan diketahui partisipasi politik Hizbut Tahrir Indonesia terkait Pileg dan Pilpres 2014 pada bentuk hal-hal tersebut tidak berjalan. Hizbut Tahrir tidak melakukan pertemuan, lobi, atau kegiatan lainnya terkait pembahasan Pileg dan Pilpres 2014 kepada partai politik, pemerintah, dan lainnya.

Hal tersebut seperti disampaikan oleh ustadz Ismail.<sup>147</sup>

Kami tidak terkait dengan kelompok manapun, dan kami tidak memiliki hubungan organisasi dengan salah satu dari mereka

Bentuk partisipasi politik keempat yaitu mencari koneksi (*contacting*). Koneksi atau *contacting* yaitu tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang. Dalam observasi penelitian kemudian hal ini tidak ditemukan pada informan.

Pada bentuk partisipasi politik kelima ialah tindakan kekerasan (*violence*), yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembunuhan politik (*assassination*), revolusi dan pemberontakan. Dalam pandangannya Hizbut Tahrir Indonesia sendiri tidak setuju dan tidak pernah melakukan kekerasan. Hizbut Tahrir Indonesia yakin pada kekuatan intelektual (*fikriyah*) dan politik (*siyasah*) dalam melakukan perubahan masyarakat sebagaimana tampak pada perjalanan dakwah Rasulullah SAW di masa lalu.

---

<sup>147</sup> Wawancara Dengan M. Ismail Yusanto Pada Kamis 3/November/2016.

Hal tersebut seperti yang ditegaskan oleh ustadz Ismail, yaitu;<sup>148</sup>

Kami tidak melakukan cara-cara kekerasan, karena memang syariat tidak membolehkan metode tersebut. Kekerasan dalam dakwah hanya akan menghasilkan siklus kekerasan berikutnya dan tidak akan menghasilkan perubahan. Meski begitu, tidak berarti Hizbut Tahrir tidak menjelaskan dan tidak mengajarkan dan menyerukan jihad yang memang harus dilakukan dengan kekerasan pada kondisi tertentu.

Bentuk partisipasi politik ini kemudian juga dikemukakan oleh Gabriel Almond. Berbeda dengan Samuel P. Huntington dan Joan Nelson yang menjelaskan bentuk partisipasi politik dengan lima bentuk, Gabriel Almond menjelaskan partisipasi dalam dua bentuk, konvensional (pemberian suara; diskusi kelompok; kegiatan kampanye; membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan; komunikasi dengan pejabat politik/administratif; pengajuan petisi) dan non-konvensional (berdemonstrasi; konfrontasi; pemogokan; tindakan kekerasan politik terhadap harta benda, perusakan, pemboman dan pembakaran; tindak kekerasan politik manusia penculikan/pembunuhan; perang gerilya/revolusi). Dalam Hizbut Tahrir Indonesia kedua bentuk ini dapat terlihat.

Seperti yang dikutip pada wawancara dengan ustadz Ismail;<sup>149</sup>

HTI melakukan berbagai upaya untuk turut serta bersama komponen umat yang lain menyelamatkan negeri ini melalui berbagai kegiatan politik. Kita menyebutnya *dakwah siyasiyah* (dakwah politis). Yang utama adalah seruan kita melalui berbagai cara (unjuk rasa, petisi, penulisan di media massa, diskusi, pengiriman delegasi dan sebagainya) untuk menerapkan syariah Islam dan menghentikan sekularisme, karena inilah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan lebih jauh. Kemudian secara konsisten kita juga mengkritisi tiap kebijakan, seperti kenaikan BBM, penandatanganan DCA dengan Singapura dan sebagainya, dan peraturan seperti RUU APP, UU Migas, UU Sumberdaya Air dan sebagainya yang kita nilai bertentangan dengan syariah.

<sup>148</sup> Wawancara Dengan M. Ismail Yusanto Pada Kamis 3/November/2016.

<sup>149</sup> Wawancara Dengan M. Ismail Yusanto Pada Kamis 3/November/2016.

Terkait bentuk partisipasi politik konvensional Hizbut Tahrir Indonesia pada Pileg dan Pilpres 2014 terlihat pada diskusi publik. Pada bentuk diskusi publik, Hizbut Tahrir aktif melakukan kegiatan di berbagai daerah. Diskusi publik yang dilakukan terkait Pileg dan Pilpres 2014, mereka melakukan dengan tema terkait demokrasi dalam pandangan Islam, sistem pemilihan umum yang neo-imperialisme maupun sekulerisme, serta hukum dalam partisipasi pada pemilu. Hal ini dijelaskan pada beberapa artikel: “Diskusi Publik Pemilu 2014 dan Demokrasi Dalam Perspektif Islam”<sup>150</sup>; “Dispub Pemilu dan Masa Depan Umat”<sup>151</sup>; dan “Pemilu 2014 : Tak Ada Perubahan Mendasar, Cuma Ganti Orang”<sup>152</sup>.

Pada bentuk partisipasi politik non-konvensional oleh Gabriel Almond, diketahui hanya terlihat pada bentuk demonstrasi. Seperti dijelaskan pada Artikel “Sambut Pemilu, Mahasiswa Muslim Minta RI Tinggalkan Demokrasi”<sup>153</sup>. Bentuk lainnya tidak terlihat dikarenakan Hizbut Tahrir Indonesia yang tidak setuju dan menyatakan tidak pernah melakukan tindakan/bentuk partisipasi politik yang mengandung unsur kekerasan.

Jika melihat dari tujuan partisipasi politik, partisipasi politik Hizbut Tahrir Indonesia dapat dikategorikan tujuan partisipasi politik kedua dan ketiga menurut

---

<sup>150</sup>Diskusi Publik Pemilu 2014 Dan Demokrasi Dalam Perspektif Islam diakses melalui <https://hizbut-tahrir.or.id/2013/09/07/diskusi-publik-pemilu-2014-dan-demokrasi-dalam-perspektif-islam/>.

<sup>151</sup>Dispub Pemilu Dan Masa Depan Umat diakses melalui <https://hizbut-tahrir.or.id/2009/03/30/htidpc-jati-sampurna-gelar-dispub-pemilu-dan-masa-depan-umat/>.

<sup>152</sup>Pemilu 2014: Tak Ada Perubahan Mendasar, Cuma Ganti Orang diakses melalui <https://hizbut-tahrir.or.id/2014/04/29/tak-ada-perubahan-cuma-ganti-orang/>.

<sup>153</sup>Sambut Pemilu, Mahasiswa Muslim Minta RI Tinggalkan Demokrasi diakses melalui <https://hizbut-tahrir.or.id/2014/03/17/sambut-pemilu-mahasiswa-muslim-minta-ri-tinggalkan-demokrasi/>.

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson.<sup>154</sup> Hal ini dikarenakan partisipasi politik yang dilakukannya terlihat sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan penguasa dengan harapan supaya penguasa mengubah atau memperbaiki kelemahan tersebut. Dapat dilihat pada aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia yang kerap melakukan diskusi, demonstrasi, petisi, protes, dan sebagainya. Salah satunya ialah diskusi publik terkait demokrasi di berbagai daerah seperti Sumatera Utara<sup>155</sup> dan Bekasi<sup>156</sup>; orasi dalam konferensi Islam dan peradaban yang menyatakan pemilu 2014 akan menguatkan kejahatan penguasa dan pengusaha<sup>157</sup>; dan lain sebagainya.

Pada hal lainnya, dalam menganalisis partisipasi politik juga harus dilihat dari alasan atau landasan terbentuknya partisipasi politik. Huntington dan Nelson kemudian menjelaskan mengenai landasan partisipasi politik. Dalam Hizbut Tahrir Indonesia hal ini dikategorikan partisipasi politik berlandaskan kelompok. Landasan kelompok atau komunal ialah landasan partisipasi politik individu-individu berdasar asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa. Dalam konteks Hizbut Tahrir Indonesia kemudian berdasar aqidah Islam.<sup>158</sup>

---

<sup>154</sup> Arbi Sanit, *Op. Cit*, hlm 95.

<sup>155</sup> Di Hadapan 5000 Massa Ketua HTI Jakarta Pemilu 2014 Menguatkan Kejahatan Penguasa diakses melalui <https://hizbut-tahrir.or.id/2014/05/31/di-hadapan-5-000-massa-ketua-hti-jakarta-pemilu-2014-menguatkan-kejahatan-penguasa-pengusaha/>.

<sup>156</sup> HTI DPC Jatisampurna Gelar Dispub Pemilu Dan Masa Depan Umat diakses melalui <https://hizbut-tahrir.or.id/2009/03/30/hti-dpc-jati-sampurna-gelar-dispub-pemilu-dan-masa-depan-umat/>.

<sup>157</sup> Di Hadapan 5000 Massa Ketua HTI Jakarta Pemilu 2014 Menguatkan Kejahatan Penguasa diakses melalui <https://hizbut-tahrir.or.id/2014/05/31/di-hadapan-5-000-massa-ketua-hti-jakarta-pemilu-2014-menguatkan-kejahatan-penguasa-pengusaha/>.

<sup>158</sup> Tentang Kami diakses melalui <https://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/>.

### 3.2.2 Mobilisasi Politik Hizbut Tahrir Indonesia

Mobilisasi politik dapat diartikan suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak (individu/kelompok) kepada pihak lainnya (individu/kelompok) dalam rangka pengikutsertaan partisipasi dalam proses politik yang memiliki tujuan tertentu (tujuan politik). Pada konteks Hizbut Tahrir Indonesia dalam Pileg dan Pilpres 2014, mereka melakukan mobilisasi ini dengan formulasi ideologi Islam. Mobilisasi politik Hizbut Tahrir Indonesia dilakukan dengan berbagai macam pembinaan dan diskusi-diskusi.

Pada mobilisasi politik Hizbut Tahrir Indonesia, hal ini dilakukan dalam dua bentuk utama; Pembinaan *tsaqafah murakkazah* (intensif) dan Pembinaan *tsaqafah jama'iyah*. *Tsaqafah murakkazah* (intensif) merupakan pembinaan melalui kelompok-kelompok kajian (halaqah-halaqah) yang dilakukan secara rutin setiap satu minggu sekali atau dua minggu sekali berdasarkan kesepakatan murabbi (pembina) dan mutarabbi (murid) yang berisi pembinaan ruhiyah, pemikiran-pemikiran Islam, serta hukum-hukum Islam.<sup>159</sup>

Pada konteks Pileg dan Pilpres 2014, kegiatan *tsaqafah murakkazah* kemudian menjadi sumber informasi dan pandangan para kader untuk bersikap terhadap pemilihan umum. Seperti yang diungkapkan pak Suryono dan mas Miraz:

---

<sup>159</sup>Tahapan Dakwah Dan Aktivitas Politik Hizbut Tahrir diakses melalui <https://hizbut-tahrir.or.id/2013/08/13/tahapan-dakwah-dan-aktivitas-politik-hizbut-tahrir/> Minggu 25/September/2016.

Pak Suryono menyampaikan mengenai pandangannya mengenai halaqah, yaitu:<sup>160</sup>

Halaqah bukan hanya membicarakan agama terus, kami juga membicarakan realitas umat di politik, sosial, dan masalah-masalah umat lainnya.

Halaqah membuat kami berfikir dan bersikap secara islami terhadap realitas yang ada.

Mas Miraz kemudian juga menyampaikan pandangannya mengenai halqah, yaitu:<sup>161</sup>

Pada liqo (halaqah) kami diberitahukan bagaimana cara bersikap dan menanggapi terhadap berbagai masalah-masalah yang ada, seperti saat menanggapi kebijakan pemerintah, pemilu, dan lain sebagainya.

Pada *tsaqafah jama'iyah* ialah pembinaan bagi umat dengan cara menyampaikan ide-ide dan hukum-hukum Islam yang telah ditetapkan Hizbut Tahrir, secara terbuka kepada masyarakat umum.<sup>162</sup> Aktivitas ini dapat dilakukan melalui pengajian-pengajian di masjid, di aula atau di tempat-tempat pertemuan umum lainnya. Bisa juga melalui media massa, buku-buku, atau selebaran-selebaran.

*Tsaqafah jama'iyah* yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia terkait Pileg dan Pilpres 2014, mereka melakukan secara umum dengan diskusi dan penyebaran buku dan selebaran. Pada *tsaqafah jama'iyah* dalam bentuk diskusi dilakukan dengan tema-tema terkait demokrasi dalam pandangan Islam, sistem pemilihan umum yang neo-imperialisme maupun sekulerisme, serta hukum dalam partisipasi pada pemilu. Hal ini dijelaskan pada beberapa artikel: “Diskusi Publik “Pemilu 2014 dan Demokrasi Dalam Perspektif Islam””; “Dispub Pemilu dan Masa Depan Umat””; dan

---

<sup>160</sup> Wawancara Dengan Suryono Putra Pada Jumat 14/Oktober/2016.

<sup>161</sup> Wawancara Dengan Miraz Syahrul Pada Jumat 14/Oktober/2016.

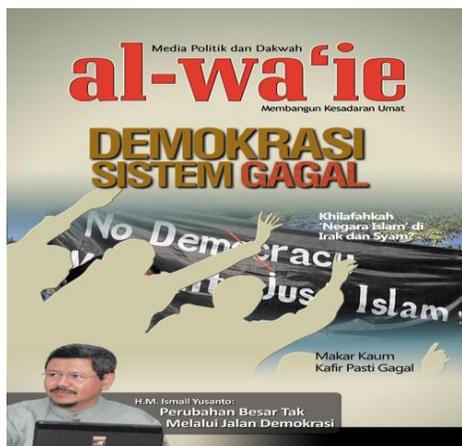
<sup>162</sup>Tahapan Dakwah Dan Aktivitas Politik Hizbut Tahrir <https://hizbut-tahrir.or.id/2013/08/13/tahapan-dakwah-dan-aktivitas-politik-hizbut-tahrir/> Minggu 25/September/2016.

“Pemilu 2014: Tak Ada Perubahan Mendasar, Cuma Ganti Orang”. Sedangkan pada tsaqafah jama’iyah dengan cara penyebaran buku dan selebaran dilakukan dengan media cetak yang dimiliki Hizbut Tahrir Indonesia yaitu buletin Jumat al Islam, majalah al Waie dan tabloid Media Umat.

Seperti yang disampaikan oleh ustadz Ismail, yaitu:<sup>163</sup>

Forum seperti tabligh akbar, diskusi publik, seminar, workshop, training, daurah, temu tokoh dan forum lainnya yang diselenggarakan oleh HTI adalah sebagian cara yang ditempuh HTI untuk menyampaikan penjelasan-penjelasan itu secara massal. Sementara secara personal, dilakukan dengan kontak, audiensi atau silaturahmi kepada para tokoh baik dari kalangan ulama, cendekiawan, birokrat, militer dan kepolisian, pers, pengusaha dan lainnya, yang ada di tengah masyarakat. Selain dengan cara langsung, penjelasan juga disampaikan dengan sarana media massa. HTI memiliki buletin Jumat al Islam, majalah al Waie dan tabloid Media Umat.

**Gambar III.2: Al Waie Februari 2014<sup>164</sup>**



**Gambar III.3: Al Waie April 2014<sup>165</sup>**



Terkait dakwah yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia, ustadz Ismail kemudian menyampaikan bahwa Hizbut Tahrir Indonesia ingin mengajak kaum muslim kembali ke hukum Islam, seperti pada kutipan wawancara yaitu:<sup>166</sup>

<sup>163</sup> Wawancara Dengan M. Ismail Yusanto Pada Kamis 3/November/2016.

<sup>164</sup> Cover Al Waie diakses melalui <https://hizbut-tahrir.or.id/category/alwaie/cover-alwaie/page/3/>.

<sup>165</sup> *Ibid.*

Hizbut Tahrir dengan dakwahnya itu ingin mengajak kaum muslimin kepada pengamalan kembali seluruh hukum-hukum Islam baik dalam masalah aqidah, ibadah, makanan, minuman, pakaian, akhlaq, dakwah, muamalah dan uqubah dengan jalan menegakkan khilafah Islam dan menerapkan syariah Islam secara menyeluruh.

Melihat hal tersebut dapat diketahui bahwa mobilisasi politiknya yang dilakukan baik terkait pileg dan pilpres 2014 juga, Hizbut Tahrir Indonesia bertujuan meyakinkan bahwa sistem demokrasi yang berlangsung tidak menghasilkan suatu perubahan dan tidak berjalan efektif. Mobilisasi politik mereka ini kemudian membuat kecenderungan para anggota akar rumput mereka melakukan “*golput*” atau dalam istilah mereka ialah memilih untuk tidak memilih.<sup>167</sup> Hizbut Tahrir Indonesia kemudian berpandangan, hal ini hanya dapat diperbaiki dengan melakukan suatu perubahan mendasar pada sistem yang ada yaitu menggantinya dengan *khilafah* Islam.

### **3.3 Pandangan Aktivis Hizbut Tahrir Indonesia terhadap Peranserta politik dan Ideologi Islam**

#### **3.3.1 Dakwah Politik Hizbut Tahrir Indonesia sebagai Peranserta Politik**

Katakanlah, ‘Inilah jalan (dakwah)-ku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kalian) kepada (agama) Allah dengan hujjah (bukti) yang nyata. (Yusuf : 108)

Hendaklah ada diantara kalian satu jama’ah (partai) yang menyeru pada alkhair (Islam), dan menyuruh kepada yang ma’ruf (hal-hal yang wajib) dan mencegah dari yang munkar (maksiat). (Ali ‘Imran 104)

---

<sup>166</sup> Wawancara pada Kamis 3/November/2016.

<sup>167</sup> Suara Sumbang Hizbut Tahrir Indonesia diakses melalui [http://www.kompasiana.com/sultansulaiman/suara-sumbang-hizbut-tahrir-indonesia\\_54f7fcfa33311b2618b47f8](http://www.kompasiana.com/sultansulaiman/suara-sumbang-hizbut-tahrir-indonesia_54f7fcfa33311b2618b47f8).

Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama) -Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (Al Hajj : 40)

Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala yang diperintahkan (kepadamu), dan ber-palinglah dari orang-orang musyrik. (Al-Hijr 94)

Hizbut Tahrir Indonesia meyakini keterlibatan setiap individu Muslim dalam sebuah dakwah merupakan kewajiban dari Allah SWT sebagai implementasi dari seruan-Nya yang dijabarkan pada ayat diatas. Berdasarkan ayat diatas, para aktivis dan anggota Hizbut Tahrir Indonesia mereka meyakini dakwah selain sebagai sebuah kewajiban, dakwah juga merupakan pilar utama Islam. Tanpa dakwah, Islam tak akan tegak. Tanpa dakwah Islam tak akan tersebar luas. Tanpa dakwah tak akan tercipta *'izzul Islam wal Muslimin*. Tanpa dakwah manusia seluruhnya tak akan bisa terselamatkan dari azab Allah SWT. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh para informan.

Pak Suryono dalam wawancaranya dengan penulis, ia menyampaikan:<sup>168</sup>

Mengemban dakwah adalah bagian dari ibadah (pengabdian) kita kepada Allah SWT. Itu harus kita lakukan tanpa henti dan tanpa mengenal kata istirahat. Hanya kematianlah yang boleh menghentikan aktivitas ibadah kita, termasuk dakwah kita.

Sama halnya dengan pak Suryono, ustadz Rahmat sebagai Ketua Lajnah Faaliyah dalam wawancara menyampaikan kewajiban dan hakikat dakwah, yaitu<sup>169</sup>:

Karena itu, seorang Muslim dituntut untuk tidak mengenal lelah dalam beribadah kepada Allah Swt., termasuk dalam mengemban dakwah sebagai bagian dari ibadah itu. Dengan itulah, insya Allah, pertolongan Allah akan lebih cepat kita peroleh, dan cita-cita berupa tegaknya syariah Islam secara total dalam naungan Khilafah Islamiyah akan segera terwujud.

---

<sup>168</sup> Wawancara Dengan Suryono Puta Pada Jumat 14/Oktobre/2016.

<sup>169</sup> Wawancara Dengan M. Rahmat Kurnia Pada Kamis 3/November/2016.

Masalahnya, saat ini dakwah cenderung dipahami oleh kebanyakan Muslim sebagai tugas dan kewajiban para ulama, kiai, ustadz dan mubalig saja. Masih sedikit yang memahami bahwa dakwah adalah juga tugas dan kewajiban setiap individu Muslim. Bahkan sejatinya setiap Muslim wajib menjadikan dakwah sebagai fokus utama sekaligus poros hidupnya. Sebab, hanya dengan itulah akan tercipta *'izzul Islam wal Muslimin*.

Para aktivis Hizbut Tahrir Indonesia dalam mengemban dakwahnya bukan sekadar memenuhi seruan Allah SWT dan memenuhi kewajiban, melainkan demi terwujudnya sistem *khilafah* dan diterapkannya kembali hukum-hukum Allah di muka bumi ini. Para aktivis Hizbut Tahrir Indonesia berjuang atau berdakwah untuk melanjutkan kehidupan Islam (*li isti'nafil hayatil islamiyyah*). Artinya, para aktivis Hizbut Tahrir Indonesia dengan dakwahnya itu ingin mengajak kaum muslimin di seluruh dunia kepada pengamalan kembali seluruh hukum-hukum Islam baik dalam masalah aqidah, ibadah, makanan, minuman, pakaian, akhlaq, dakwah, muamalah dan uqubah dengan jalan menegakkan khilafah Islam dan menerapkan syariah Islam secara menyeluruh.

Hal tersebut seperti yang disampaikan ustadz Ismail, yaitu:<sup>170</sup>

Dakwah bagi tegaknya kembali *syariah* dan *khilafah* sebagai manifestasi dari *tauhid* atau keimanan kita kepada Allah SWT, adalah dakwah dengan tujuan politik. Ini tentu hanya bisa dicapai melalui perjuangan politik.

Dakwah semacam ini memang tidak mudah, tapi Insya Allah tujuan itu akan terwujud, karena metode itu adalah jalan dakwah yang ditunjukkan oleh Rasulullah, dan berhasil.

---

<sup>170</sup> Wawancara Dengan M. Ismail Yusanto Pada Kamis 3/November/2016.

Pada dakwahnya, Hizbut Tahrir Indonesia dan aktivisnya kemudian melakukannya dengan dakwah politik. Hal ini dilakukannya dengan *tsaqafah murakazzah*, *tsaqafah jamaiyah*, perang pemikiran, perjuangan politik, dan mengadopsi kepentingan umat yang substansial. Dakwah politik (*da'wah siyasiyah*) sendiri ialah mengemban dakwah Islam melalui jalan politik dan peranserta politik, yaitu dakwah dengan metode melakukan aktivitas politik (*amal siyasi*).<sup>171</sup> Pada dakwah politik adalah segala aktivitas yang terkait dengan pengaturan urusan masyarakat (*ri'ayah syu'un al-ummah*), baik yang terkait dengan kekuasaan (*as-sulthan*) sebagai subyek (*al-hakim*) yang melakukan pengaturan urusan masyarakat secara langsung, maupun yang terkait dengan umat sebagai obyek (*al-mahkum*) yang melakukan pengawasan (*muhasabah*) terhadap aktivitas kekuasaan dalam mengatur urusan masyarakat.<sup>172</sup>

Seperti yang disampaikan oleh ustadz Ismail selaku juru bicara, yaitu:<sup>173</sup>

Dakwah politik hukumnya wajib secara syar'i, karena dakwah politik inilah metode yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw.

Hizbut Tahrir Indonesia, cara-cara (*uslub*) dakwah politik bisa bermacam-macam. Misalnya melakukan perjuangan politik (*al-kifah as-siyasi*) atau peranserta politik, seperti mengkritik penguasa yang menjadi pelayan kepentingan Barat, mengkritik kebijakan penguasa yang menjalankan agenda neoliberalisme, dan sebagainya. Dalam konteks Pileg dan Pilpres 2014, dakwah politik atau peranserta

<sup>171</sup> Hizbut Tahrir Indonesia, *Manhaj Hizb at-Tahrir*, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2009, hlm 14.

<sup>172</sup> Hizbut Tahrir Indonesia, *Mafahim Siyasiyah li Hizb at-Tahrir*, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2005, hlm 5.

<sup>173</sup> Wawancara Dengan M. Ismail Yusanto Pada Kamis 3/November/2016.

politik yang dilakukan para aktivis Hizbut Tahrir Indonesia dengan cara seperti penyebaran pemikiran melalui pembinaan intensif, penyebaran pemikiran melalui pembinaan bagi umat dalam bentuk diskusi publik pemikiran Islam terkait pemilu maupun dengan cara penyebaran buku dan selebaran dalam rangka penyebaran pemikiran Islam terkait pemilu.

Pada pengamplikasian peranserta politik atau dakwah politik ini oleh para informan dilakukan dengan cara-cara (*uslub*) mereka masing-masing sesuai dengan kemampuan mereka namun masih didasarkan pada ideologi Islam. Pada ustadz Ismail sebagai juru bicara DPP Hizbut Tahrir Indonesia ia melakukan peranserta politik pada Pileg dan Pilpres 2014 dengan menjadi pembicara pada diskusi-diskusi publik terkait pemilihan umum yang diadakan di berbagai daerah. Pada peranserta politik lainnya yang dilakukan oleh ustadz Ismail ialah menulis berbagai artikel dan memberikan pendapat pada berbagai majalah dan media baik cetak maupun online. Pada penulisan artikel dan pemberian pendapat melalui media cetak terdapat dalam majalah milik Hizbut Tahrir Indonesia yaitu *Al Wa'ie* pada artikel *Pilihlah Pemimpin Yang Siap Menerapkan Syariah Secara Kaffah* bulan april 2014 dan *Perubahan Besar Tak Melalui Jalan Demokrasi* bulan februari 2014.

Pada peranserta politik, melalui media online, ia lakukan dengan berbagai artikel pada *hizbut-tahrir.or.id*, *detik.com*, *nasional.sindonews.com*, dan media lainnya.

**Gambar III.4: Artikel Persatuan Umat dan Penerapan syariah secara Kaffah Tidak Bisa Diwujudkan Tanpa Khilafah<sup>174</sup>**



**Gambar III.5: Artikel Perubahan Besar Tak Melalui Jalan Demokrasi<sup>175</sup>**



Pada peranserta politik oleh informan lainnya yaitu oleh ustadz Rahmat, sama halnya dengan ustadz Ismail, ustadz Rahmat melakukan dengan cara menjadi pembicara dalam berbagai diskusi publik hal ini mengingat juga posisi ustadz Rahmat sebagai Ketua Lajnah Fa'aliyah DPP HTI. Pada peranserta politiknya ia melakukan juga dengan pemikiran politik seperti yang tertuang pada artikel: "Islam

<sup>174</sup> Persatuan Umat Dan Penerapan Syariah Secara Kaffah Tidak Bisa Diwujudkan Tanpa Khilafah diakses melalui <https://hizbut-tahrir.or.id>.

<sup>175</sup> Perubahan Besar Tak Melalui Jalan Demokrasi diakses melalui <https://hizbut-tahrir.or.id>.



### Gambar III.8: Artikel Islam Bakal Menang Atas Semua Agama<sup>177</sup>

03 January 2014

**Muhammad Rahmat Kurnia: Islam Bakal Menang Atas Semua Agama dan Ideologi**

**Pengantar:**

Sejauh ini, persoalan yang mendera umat Islam di dalam negeri maupun luar negeri makin kompleks; menyangkut persoalan moral, keagamaan, ekonomi, pendidikan, politik, sosial-budaya, hukum pemerintahan dll. Semakin nyata bahwa semua problem multidimensi yang terjadi selama ini adalah akibat dari penerapan ideologi sekular dan pengabaian terhadap penerapan syariah Islam secara totalitas oleh negara.

Di sisi lain, kita layak tetap optimis. Pasalnya, dari hari ke hari kesadaran umat ini untuk kembali pada Islam dan untuk diatur dengan hanya syariah Islam makin menguat dan makin meluas. Pertanyaannya: Sejahter mana? Apa indikasinya? Bagaimana pula tantangan dan peluang penerapan syariah dan Khilafah di tengah-tengah umat ke depan?

Rulah di antara beberapa pertanyaan yang dijawab secara lugas oleh Dr. H. Muhammad Rahmat Kurnia dari Dewan Pimpinan Pusat Hizbut Tahrir Indonesia (DPP-HTI) melalui wawancara dengan redaksi al-waie kali ini. Berikut petkian wawancaranya.

Bagaimana Ustadz melihat problem yang dihadapi umat selama ini?

Saya lihat, umat belum beranjak dari permasalahannya. Berbagai persoalan bahkan bertambah kusut. Misalnya, kemiskinan belum banyak terentaskan. Tidak aneh jika buruh di berbagai daerah turun ke jalan hanya untuk menuntut kenaikan upah minimum. Kesehatan pun tetap sulit bagi kebanyakan masyarakat. Solusi yang diberikan justru asuransi dengan mengharuskan rakyat membayar. Namun, asuransi kesehatan tersebut dinamai Jaminan Kesehatan Nasional. Rakyat awam memahaminya hal tersebut merupakan dana dari Pemerintah, padahal tidak. Pendidikan tidak jelas. Kurikulum terus berubah-ubah. Yang ini belum dijalankan, sudah diganti dengan yang baru. Akhlak justru dirusak oleh Pemerintah sendiri. Pekan Kondom Nasional diselenggarakan secara resmi oleh Kementerian Kesehatan. Bila sebelumnya ada ATM kondom, sekarang kondom dibagi-bagi. Lihat, alat kontrasepsi tersebut sekarang dijual dengan terbuka, diletakkan bersamaan dengan obat batuk, siapa pun bisa membeli. Korupsi makin menggila. Tengok saja, korupsi terjadi di segala lini, mulai dari RW terkait dana beras untuk rakyat miskin (raskin) hingga ketua Mahkamah Konstitusi. Penyesatan oleh negara asing dianggap biasa. Justru yang ditakutkan adalah menaruh duta besar kita dari Australia. Padahal semestinya, duta besar Australia dan AS yang diusir. Masih banyak lagi persoalan lainnya.

Apa sebenarnya akar persoalan dari persoalan-persoalan itu?

Akar persoalannya adalah tidak adanya penerapan hukum Islam. Yang diterapkan malahan sistem sekular demokrasi. Sistem demokrasi meniscayakan hukum dibuat oleh manusia. Halal dan haram tidak dijadikan standar penilaian. Semuanya dilihat dari segi manfaat. Konsekuensinya hukum akan berubah-ubah sesuai dengan kepentingan para pembuatnya dan manfaat materi yang mereka lihat. Tidak mengherankan apabila yang benar menjadi salah dan perkara salah menjadi benar. Hukum pun dapat diperjual-belikan. Dalam politik, muncullah politik transaksional dan politik dagang sapi. Semuanya demi uang. Menjamurlah korupsi dimanamana. Secara imani, Allah SWT menegaskan dalam al-Quran surat Thaaha ayat 124 bahwa barangsiapa berpaling dari Islam maka ia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Karena itu, orang beriman memahaminya bahwa tindakan meninggalkan hukum Islam akan mengundang datangnya problem multidimensi.

### Gambar III.9: Artikel Demokrasi Tak Sejahterakan Masyarakat

Bagaimana pandangan HTI terhadap sistem demokrasi?

Pembicara ke empat Dr. Rahmat Kurnia, M.Si (DPP HTI) menjelaskan kembali secara mendetail tentang definisi Demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ini sangat bertentangan dengan Islam. Sumber hukum yang dipakai dalam sistem Demokrasi adalah suara terbanyak dan faktanya itupun terkadang tidak mewakili suara rakyat. Sementara dalam sistem Islam yang menjadi sumber hukum adalah al qur'an dan sunnah. Sistem Demokrasi pada akhirnya membuat negara menjadi "Corporate State". Maka dalam pemerintahan sistem Islam, hubungan antara Pemimpin (Khalifah) dan masyarakat (Ummat) ada bentuk bai'at dan ada Aqad di dalamnya dalam rangka menegakkan Syariat Allah. Sementara dalam pemerintahan Sekular Demokrasi tidak ada, yang ada hanya sumpah. Dan yang jauh lebih penting adalah sistem Islam mendapat jaminan Ridho dan kesejahteraan dari Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam banyak dalil terpercaya. Sementara tidak ada jaminan kesejahteraan dari Allah SWT bagi negara yang menerapkan sistem Demokrasi Sekular.[]

### Gambar III.10: Artikel Jalan Umat<sup>178</sup>

dengan kita membiarkan kemungkaran. Coba lihat, apabila Jokowi berhasil menjadi presiden, maka gubernurnya non-Muslim. Masa iya DKI Jakarta dipimpin non-Muslim!"

Saya menyampaikan kepada beliau beberapa hal. Pertama: perkara yang akan dicatat oleh Allah SWT dari diri kita bukan hanya apa yang kita lakukan, melainkan juga jejak (atsar) yang kita tinggalkan. Allah SWT menjelaskan di dalam al-Quran (yang artinya): Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan (TQS Yasin [36]: 12). Ini menunjukkan bahwa bukan sekadar aktivitas memilih yang akan dicatat, melainkan juga dampak yang dilakukan penguasa yang kita pilih. Kalau yang dilakukan penguasa itu penerapan hukum sekular maka kita berkontribusi dalam kesalahan tersebut. "Saya adalah penguasa yang dipilih rakyat. Saya mendapat mandat berkuasa dari rakyat." Bukankah itu yang selalu mereka dengung-dengungkan.

Kedua: dalam pemilihan itu bukan hanya sekadar orang yang penting diperhatikan, melainkan juga sistem yang diterapkan. Kita memang tidak boleh menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin. Namun, bukan berarti yang penting asal beragama Islam. Saya katakan kepada beliau, "Nabi Muhammad sudah dikenal orang yang baik, amanah, dan tiada banding sejak belum diangkat menjadi Rasul. Namun, sekalipun orangnya sudah baik, tetap saja Allah SWT menurunkan al-Quran dan hadis kepada beliau. Ini artinya, ada dua hal yang diperlukan: orang dan sistem."

Lalu saya pun melanjutkan, "Secara individu, saya percaya tentu ada orang-orang yang baik. Namun, secara sistem, saat ini sistem yang diterapkan dan harus diikuti adalah sistem sekular, demokrasi kapitalistik."

Ketiga: jika kita diam terhadap kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa maka itu berarti mendiarkan kemungkaran. Namun, apabila justru terus mengingatkan mereka akan kewajiban menerapkan Islam, menentang kezaliman yang mereka lakukan, menunjukkan persekongkolan mereka dengan negara kafir penjajah dalam merampok kekayaan rakyat, dan sebagainya, tidak bisa hal itu dikategorikan membiarkan kemungkaran.

Menanggapi hal tersebut, salah satu tokoh Denpasar Ustadz Anwar mengatakan, "Lha, demokrasi itu kan tidak jauh beda dengan Islam. Bahkan demokrasi berasal dari Islam. Bagaimana dengan hal ini?"

Rupanya kondisi seperti itu terjadi di berbagai daerah. Sekadar contoh, diskusi senada terjadi ketika saya bertemu dengan tokoh-tokoh Priangan dalam acara Temu Tokoh di Bandung, Jawa Barat, masih pada bulan Mei 2014. Pak Anang, salah seorang intelektual Jawa Barat yang juga dosen politik di Unpas mengatakan, "Ada kesan bahwa Islam tidak demokrasi. Padahal tidak demikian. Kita perlu melakukan logika komparasi secara tepat. Sekalipun memang, dalam demokrasi, partai politik merupakan satu-satunya pemberi solusi yang diharapkan. Sekarang, justru partai politik merupakan satu-satunya masalah terpenting yang harus diselesaikan."

Saya menyampaikan kepada beliau bahwa memang ada beberapa hal yang mirip antara demokrasi dan Khilafah dalam Islam, seperti kekuasaan ada di tangan rakyat. Namun, banyak hal mendasar yang berbeda, di antaranya dalam Islam hukum yang diterapkan haruslah hukum Allah SWT, sementara dalam demokrasi justru hukum buatan manusia yang harus dilaksanakan. "Kita tidak dapat mengatakan bahwa mentimum sama dengan semangka hanya karena sama-sama berwarna hijau, berbulu, daunnya menjalar, dan mengandung air," tegas saya.

Tokoh Jawa Barat lain, Pak Norman mengungkapkan, "Di AS itu, demokrasi tidak diterapkan. Di sana yang diterapkan adalah kapitalisme/liberalisme."

<sup>177</sup> Islam Bakal Menang Atas Semua Agama diakses melalui <https://hizbut-tahrir.or.id>.

<sup>178</sup> Jalan Umat diakses melalui <https://hizbut-tahrir.or.id>.

Peranserta politik yang dilakukan oleh informan lainnya yaitu pak Suryono, mas Miraz, dan mbak Ari, mereka lakukan dengan melakukan penyebaran pemikiran yang mereka dapat melalui media online maupun hubungan langsung kepada keluarga dan kerabat. Pada masa Pileg dan Pilpres mereka aktif menyuarakan pemikiran mereka melalui *social media* mereka terkait pemikiran demokrasi dan sikap serta hukum memilih dalam pemilu sesuai dengan nilai Islam. Hal lainnya yaitu penyebaran pemikiran kepada keluarga dan kerabat mereka juga terkait demokrasi dan sikap serta hukum memilih dalam pemilu yang sesuai dengan nilai Islam. Hal ini seperti yang diungkapkan mereka bertiga.

Pak Suryono menyampaikan bahwa peransertanya dilakukan dalam *social media* dan secara langsung, seperti yang disampaikannya, yaitu:<sup>179</sup>

Saya melakukan penyebaran pemikiran politik yang saya pahami melalui facebook maupun saat berbincang dengan teman kerja

Dalam melakukan penyebaran pemikiran politik, saya intens menyebarkan sesuai dengan isu-isu yang sedang hangat di perbincangkan

Sama halnya dengan pak Suryono, mas Miraz juga menyampaikan mengenai peransertanya dalam menyebarkan pemikiran politik:<sup>180</sup>

Saya aktif melakukan postingan di facebook terkait pandangan saya mengenai bagaimana penerapan Islam, isu politik yang hangat, maupun *quotes* Islam

Dulu saat pemilu 2014 berlangsung saya melakukan penyebaran pemikiran terkait pandangan saya langsung kepada keluarga saya dan juga melalui facebook

---

<sup>179</sup> Wawancara Dengan Suryono Putra Pada Jumat 14/Oktober/2016.

<sup>180</sup> Wawancara Dengan Miraz Syahrul Pada Jumat 14/Oktober/2016.

Mbak Ari kemudian juga menyampaikan peranserta yang ia lakukan dalam menyebarkan pemahaman yang ia dapat pada Hizbut Tahrir Indonesia, hal ini seperti pada kutipan wawancara:<sup>181</sup>

Saya menyebarkan paham Hizbut Tahrir terbatas pada keluarga dan kerabat yang menurut saya dapat menerimanya

Melihat dari hal yang dilakukan para aktivis dan anggota Hizbut Tahrir Indonesia tersebut, mereka melakukan peranserta politik dengan cara-cara (*uslub*) yang berbeda. Mereka melakukannya sesuai dengan kemampuan atau kapasitas mereka masing-masing. Semakin mereka memiliki kekuasaan atau kekuatan (*power*) yang lebih maka peranserta politiknya akan lebih luas cakupan dan pengaruhnya.

### **3.3.2 Penerapan Ideologi Islam dalam Gerakan Dakwah Politik**

#### **3.3.2.1 Ideologi Islam sebagai Ideologi yang sesuai Akal dan Fitrah Manusia**

Pada Hizbut Tahrir Indonesia, *mabda* (ideologi) Islam dibangun di atas sebuah akal. Sebab, *mabda* Islam menjadikan akal sebagai asas untuk iman kepada Allah SWT. Ketika akal memperhatikan apa yang ada di alam semesta, manusia dan kehidupan, maka akal memastikan adanya Allah yang telah menciptakan makhluk-makhluk ini, menentukan untuk manusia tentang kesempurnaan mutlak yang sedang dicari oleh fitrahnya. Kesempurnaan mutlak itu tidak ditemukan dalam diri manusia,

---

<sup>181</sup> Wawancara Dengan Ari Rachmayanti Pada Senin 17/Oktober/2016.

alam semesta dan kehidupan. Kemudian akal menunjukkannya, lalu manusia memahaminya dan beriman kepadanya.

Hizbut Tahrir Indonesia, *mabda* Islam dikatakan sesuai akal dan fitrah juga dilihat dari pandangannya terhadap individu dan masyarakat. *Mabda* Islam memperhatikan individu sebagai bagian dari jamaah, bukan individu yang terpisah. Perhatian ini akan melestarikan eksistensi jamaah. Dalam waktu yang bersamaan, ideologi Islam juga memperhatikan keberadaan jamaah yang menjadi wadah yang terdiri dari bagian-bagian tertentu, yaitu individu-individu yang ada dalam jamaah. Perhatian ini dapat melestarikan individu-individu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari jamaah.

Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh ustadz Ismail, yaitu:<sup>182</sup>

Islam sebagaimana yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi-Nya, Muhammad saw. Islam yang benar-benar pernah diterapkan selama 14 abad di seluruh dunia. Memimpin umat manusia, dari Barat hingga Timur, Utara hingga Selatan. Di bawah naungannya, dunia aman, tenteram, adil dan sejahtera. Semua warga negara, baik Muslim, Kristen, Yahudi, dan penganut agama lain bisa hidup berdampingan dengan damai selama berabad-abad lamanya. Yang telah terbukti membawa kerahmatan bagi seluruh alam. Inilah Islam yang dirindukan oleh umat manusia untuk kembali memimpin dunia. Membebaskan umat manusia dari perbudakan dan penjajahan oleh sesama manusia. Menebarkan kebaikan, keadilan dan kemakmuran di seluruh penjuru dunia. Islam yang hidup sebagai peradaban di tengah umat manusia, yang diterapkan, dipertahankan dan diemban di bawah naungan Khilafah Rasyidah.

Pada prakteknya kemudian, para aktivis dan anggota Hizbut Tahrir Indonesia dalam melakukan aktivitasnya mengacu pada *mabda* Islam yang berasal dari Al Quran dan Hadits. Para aktivis dan anggota Hizbut Tahrir Indonesia menolak semua pandangan atau ideologi yang tidak sesuai dengan *mabda* Islam seperti demokrasi, liberal, sekuler, komunisme, kapitalisme, dan lainnnya. Praktek sesuai *mabda* Islam

---

<sup>182</sup> Wawancara Dengan M. Ismail Yusanto Pada Kamis 3/November/2016.

ini dilakukan para aktivis dan anggota baik dalam aktivitas ritual keagamaan maupun aktivitas sosialnya.

Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh ustadz Ismail terkait *mabda* Islam yang merupakan ideologi yang benar dan dijalankan oleh aktivis serta anggota Hizbut Tahrir Indonesia, Adapun ia menyampaikan:<sup>183</sup>

Hizbut Tahrir menyatakan satu-satunya *mabda* yang benar ialah *mabda* Islam. *Mabda* yang muncul dalam benak manusia melalui wahyu Allah (Al Qur'an) adalah *mabda* yang benar. Karena bersumber dari *Al-Khaliq*

Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT melalui Alquran sebagai rahmat bagi semesta alam. Dan kerahmatan itu akan bisa dirasakan bila, dan hanya bila, *aqidah* Islam diyakini dan dipegang erat, serta syariahnya diterapkan secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karenanya Hizbut Tahrir menjalankan *aqidah* islam secara kaffah pada seluruh aktivitasnya.

Pada Hizbut Tahrir, Kehidupan yang di dalamnya diterapkan syariat Islam dalam seluruh sendi kehidupan, baik kehidupan pribadi, keluarga maupun kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang menyangkut aspek ibadah, makanan, minuman, pakaian, akhlak maupun muamalat.

Oleh karenanya, para aktivis Hizbut Tahrir Indonesia percaya bahwa *mabda* Islam satu-satunya ideologi yang *shahih* (benar) di dunia ini. Sebab *mabda* Islam adalah ideologi yang datang dari Allah SWT. *Akidahnya* dibangun di atas akal dan sesuai dengan fitrah. Realitas *akidah* Islam menunjukkan eksistensinya sebagai ideologi universal. *Akidah* Islam tegak untuk memberikan solusi (jawaban) atas seluruh problematika manusia dari sisi manusia. *Akidah* Islam akan memberikan solusi terhadap potensi kehidupan manusia, yang berupa naluri-naluri dan kebutuhan-kebutuhan jasmani. *Akidah* Islam mengaturnya dan mengatur pemuasannya dengan

---

<sup>183</sup> Hasil Wawancara Ustadz Ismail Dengan Majalah Al Waie.

aturan yang benar dan harmonis, tidak mengekangnya dan tidak pula mengumbarnya, tidak mengutamakan satu naluri dan mengabaikan naluri yang lainnya. *Mabda* Islam adalah ideologi yang sempurna, yang mengatur seluruh urusan manusia. Adapun *mabda* selain Islam, di antara *mabda-mabda* (ideologi-ideologi) yang ada di dunia adalah *mabda* batil dan rusak, sebab ideologi-ideologi itu adalah buatan manusia, disamping akidahnya tidak dibangun di atas akal dan juga bertentangan dengan fitrah manusia.

### 3.3.2.2 Ideologi dan Khilafah Islamiyah

Pada Hizbut Tahrir Indonesia, Islam dipandang sebagai agama yang diturunkan Allah SWT sebagai rahmat bagi semesta alam. Dan kerahmatan itu akan bisa dirasakan bila, dan hanya bila, *aqidah* Islam diyakini dan dipegang erat, serta syariahnya diterapkan secara menyeluruh (*kaffah*) dalam seluruh aspek kehidupan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hizbut Tahrir Indonesia kemudian dalam mewujudkan *mabda* Islam yang rahmat bagi alam semesta, satu-satunya *thariqah* yang ditempuh untuk menerapkan peraturan adalah melalui negara. Negara dengan segenap kewenangannya adalah institusi yang mutlak diperlukan, selain individu dan kelompok, untuk penerapan *syariah* secara menyeluruh (*kaffah*) agar terwujud *rahmatan lil alamin* berupa keadilan, kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, kesucian dan sebagainya.

Hizbut Tahrir Indonesia meyakini Islam telah menetapkan sekaligus membatasi bentuk pemerintahan hanya dengan sistem *khilafah*. Artinya, sistem *khilafah* ini satu-

satunya sistem pemerintahan bagi *daulah* Islam (negara Islam). *Khilafah* merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam, dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia

Oleh karena itu, Hizbut Tahrir Indonesia memandang wajib bagi seluruh umat Islam mewujudkan negara seperti itu. Bila negara sudah terwujud, maka wajib bagi umat Islam untuk mempertahankan keberadaan negara itu. Bahkan sejatinya dalam ideologi Islam, berdirinya sebuah negara tidak lain adalah untuk melaksanakan syariah, bukan untuk yang lain. Ayat seperti *fahkum baynakum atau fahkum baynahum bima anzalallah* : terapkankah hukum di antara kalian atau diantara mereka dengan apa yang telah diturunkan Allah, ditambah dengan kecaman bahwa siapa saja yang tidak menerapkan hukum dengan apa yang diturunkan Allah (*wa man lam yahkum bima anzallah*) sebagai *fasik*, *dzalim* bahkan *kafir*, semua itu menunjukkan adanya kewajiban untuk menerapkan syariah Islam

Hizbut Tahrir Indonesia dan para aktivisnya juga mempercayai bahwa hanya melalui *khilafah* sajalah *syariah* Islam dapat diterapkan secara utuh. Dan saat itulah kerahmatan Islam yang dijanjikan akan bisa dirasakan oleh seluruh manusia, muslim atau non muslim. Hal ini kemudian yang saat ini sedang diwujudkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia.

Pada segala aktivitasnya mulai dari tahap pembinaan, perang pemikiran, perjuangan politik, mengangkat dan menetapkan kemaslahatan umat merupakan upaya mereka dalam menegakkan ideologi islam melalui *khilafah islamiyah*. Upaya tersebut dilakukan oleh para aktivis dan anggota Hizbut Tahrir Indonesia karena

diyakini dapat membangkitkan islam. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh ustadz Ismail sebagai juru bicara dan ustadz Rahmat sebagai Ketua Lajnah Faaliyah.

Terkait hal tersebut, ustadz Ismail menyampaikan bahwa:<sup>184</sup>

*Syariah* akan menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan akibat sistem sekuler, dan khilafah akan menghentikan neo-imperialisme yang kini tengah menimpa negeri-negeri Islam, termasuk Indonesia, yang dilakukan oleh negara adikuasa. Kejahatan adikuasa hanya mungkin bisa dihentikan oleh kekuatan adikuasa juga. Itulah *khilafah*.

Sama halnya dengan ustadz Ismail, ustadz Rahmat memberikan pandangannya terkait khilafah dalam rangka membangkitkan umat Islam:<sup>185</sup>

*Khilafah* akan mewujudkan persatuan dengan identitas hakiki kita sebagai sebuah umat. Sementara, dengan syariah, kita sebagai muslim akan dapat merealisasikan seluruh pikiran ideal kita tentang misi hidup kita untuk beribadah kepada Allah swt, karena bukan hanya dalam kehidupan pribadi dan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara juga diatur dengan aturan yang ditetapkan Allah swt.

Pada buku *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, mengangkat seorang *khilafah* (pemimpin umat Islam) dan menegakkan *khilafah Islamiyah* (negara Islam) supaya menegakkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam adalah kewajiban atas seluruh kaum muslim merupakan perkara yang telah ditetapkan berdasarkan *nash-nash* (riwayat) *syara'* yang *shahih* (sumber terpercaya) yang tidak ada *syubhat* (keraguan) padanya. Kewajiban aktivitas ini statusnya diatas kewajiban menegakkan hukum Islam dan menjaga kesatuan kaum muslim yang telah diwajibkan oleh Allah swt. Hanya saja, status kewajiban ini adalah *fardlu kifayah* (wajib jika belum ada yang melakukan). Dimana, ketika ada sebagian kaum Muslim yang telah berhasil menegakkannya, maka kewajiban itu benar-benar telahwujud dan telah gugur dari

---

<sup>184</sup> Wawancara Dengan M. Ismail Yusanto Pada Kamis 3/November/2016.

<sup>185</sup> Wawancara Dengan M. Rahmat Kurnia Pada Kamis 3/November/2016.

sebagian orang Islam yang lain. Dan ketika sebagian kaum Muslim yang beraktivitas itu masih tidak sanggup menegakkannya meskipun mereka telah beraktivitas untuk menegakkannya, maka kewajiban itu tetap menjadi kewajiban atas seluruh orang Islam dan tidak bisa gugur dari orang Islam manapun selama kaum Muslim hidup tanpa mempunyai seorang khalifah

Oleh karena hal tersebut, Hizbut Tahrir Indonesia memandang karena belum tegaknya *khilafah Islamiyah* maka itu merupakan sebuah kewajiban yang mereka harus emban. Setiap aktivis dan anggota Hizbut Tahrir Indonesia kemudian meyakini mereka harus menegakkan *khilafah Islamiyah* agar hukum-hukum Islam dapat ditegakan. Para aktivis dan anggota Hizbut Tahrir Indonesia juga berpandangan jika mereka tidak menegakkan *khilafah Islamiyah* mereka merupakan orang fasik bahkan kafir.

Seperti yang disampaikan oleh ustadz Ismail, yaitu:<sup>186</sup>

Menjadikan *syariah* sebagai hukum positif dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi sesuatu yang harus (*a must*) atau wajib dilakukan. Bahkan sejatinya dalam pandangan Islam, berdirinya sebuah negara tidak lain adalah untuk melaksanakan *syariah*, bukan untuk yang lain. Ayat seperti *fahkum baynakum atau fahkum baynahum bima anzalallah* – terapkanlah hukum di antara kalian atau diantara mereka dengan apa yang telah diturunkan Allah, ditambah dengan kecaman bahwa siapa saja yang tidak menerapkan hukum dengan apa yang diturunkan Allah (*wa man lam yahkum bima anzallah*) sebagai fasik, dzalim bahkan kafir, semua itu menunjukkan adanya kewajiban untuk menerapkan *syariah* Islam.

Pada penerapan *syariah* dan *khilafah* tentu kemudian memerlukan kekuatan, yakni kekuatan politik. Kekuatan politik adalah kekuatan masyarakat didukung oleh *ahlul quwwah* (orang-orang yang berpengaruh dan memiliki kekuatan baik dana,

---

<sup>186</sup> Wawancara Dengan M. Ismail Yusanto Pada Kamis 3/November/2016.

sarana, politik, termasuk tentu kekuatan militer dan lainnya) yang sama-sama telah memiliki kesadaran politik Islam menuntut perubahan kearah Islam. Jadi, kekuatan utama adalah umat yang sadar itu. Maka disinilah pentingnya penyadaran umat harus terus menerus dilakukan. Umat yang tidak sadar justru akan menghalangi tegaknya syariah dan khilafah seperti yang kita lihat sekarang. Dan penyadaran umat tersebut dilakukan dengan Hizbut Tahrir Indonesia dengan dakwah secara politik.

Seperti yang disampaikan oleh ustadz Ismail terkait dakwah politik, yaitu:<sup>187</sup>

Dakwah bagi tegaknya kembali syariah dan khilafah sebagai manifestasi dari tauhid atau keimanan kita kepada Allah SWT, adalah dakwah dengan tujuan politik. Ini tentu hanya bisa dicapai melalui perjuangan politik. Dan perjuangan politik semacam itu hanya mungkin dilakukan oleh sebuah kelompok atau jamaah atau partai politik. Kelompok sosial atau kelompok yang non politik tidak mungkin akan mencapai tujuan politik karena memang tidak bertujuan politik. Partai politik non Islam juga tidak bisa diharapkan untuk tercapainya tujuan dakwah tadi, karena tidak mungkin partai politik sekuler memperjuangkan tujuan politik Islam. Di sinilah pentingnya keberadaan sebuah partai politik (Islam). Oleh karena itu partai atau jamaah atau kelompok yang bersifat politik diperlukan untuk perjuangan atau dakwah politis tadi.

Oleh karena hal itu, Hizbut Tahrir Indonesia dalam upaya mereka dalam menegakkan ideologi Islam dilakukan dengan cara dakwah politik. Dakwah politik yang merupakan kewajiban yang harus mereka emban. Serta, dakwah politik yang bertujuan untuk tegaknya kembali syariah dan khilafah sebagai manifestasi dari tauhid atau keimanan kita kepada Allah SWT.

---

<sup>187</sup> Wawancara Dengan M. Ismail Yusanto Pada Kamis 3/November/2016.

### 3.4 Penutup

Pada peranserta politik yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia di Pileg dan Pilpres 2014, mereka kecenderungan hanya aktif pada mobilisasi politik sedangkan pada partisipasi politik kurang terlihat. Pada konteks Hizbut Tahrir Indonesia dalam Pileg dan Pilpres 2014, mereka melakukan mobilisasi ini dengan formulasi ideologi Islam. Mobilisasi politik Hizbut Tahrir Indonesia dilakukan dengan berbagai macam pembinaan dan diskusi-diskusi.

Pada partisipasi politik dalam Pileg dan Pilpres 2014, jika melihat bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington, kehadiran Hizbut Tahrir Indonesia dalam bentuk-bentuk tersebut tidak terlihat. Bentuk partisipasi politik pemberian suara, kecenderungan para kader memilih untuk tidak memilih/memberikan suara. Bentuk *lobbying*, *contacting*, dan organisasi, Hizbut Tahrir Indonesia dan para aktivisnya tidak melakukan hubungan dengan organisasi lainnya. Dan bentuk kekerasan, Hizbut Tahrir Indonesia tidak melakukan karena tidak sesuai dengan pemikiran mereka.

**BAB IV**

**KONSTRUKSI IDEOLOGI ISLAM DALAM PERANSERTA POLITIK DAN  
KRITIK TERHADAP PERANSERTA POLITIK HIZBUT TAHRIR  
INDONESIA**

**4.1 Pengantar**

*Mabda* (ideologi) Islam pada Hizbut Tahrir Indonesia merupakan sebuah nilai atau pedoman yang dijadikan para aktivis dan anggotanya sebagai pedoman hidup (*way of live*). Pada *mabda* (ideologi) Islam hal ini kemudian dapat dikaji secara sosiologis menggunakan teori konstruksi sosial untuk melihat bagaimana ideologi Islam menjadi pedoman hidup (*way of live*) bagi para aktivis dan anggotanya. Pada pengkajian ideologi Islam menggunakan teori konstruksi sosial dijelaskan dengan tiga momentum dialektis, yaitu eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. Pada ketiga momentum tersebut berperan masing-masing dalam pembentukan ideologi Islam menjadi pedoman hidup (*way of live*).

Selain pengkajian *mabda* (ideologi) Islam secara sosiologis dengan teori konstruksi sosial, *mabda* (ideologi) Islam ini dapat dikaji secara sosiologis untuk mengetahui tipe gerakan sosial yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Pengkajian ini dilakukan untuk mengetahui apakah tipe gerakan sosial yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia menurut para ahli. Pengkajian ini untuk mengetahui tipe gerakan sosial berdasar sasaran, basis ideologi, maupun tujuan.

Pada Bab IV ini selain mengkaji *mabda* (ideologi) Islam dengan teori konstruksi sosial dan tipe gerakan sosial, kemudian juga berisi kritikan oleh penulis terkait peranserta politik yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Kritikan terhadap peranserta politik Hizbut Tahrir Indonesia dimaksudkan untuk menjelaskan secara menyeluruh terkait Hizbut Tahrir Indonesia. Kritikan terkait politik kritiknya dan ketidak konsistenan pada peranserta politiknya.

## **4.2 Konstruksi Ideologi Islam dalam Peranserta Politik Hizbut Tahrir Indonesia**

### **4.2.1 Eksternalisasi: Peranserta Politik sebagai Sosialisasi Ideologi Islam Hizbut Tahrir Indonesia**

Pada Hizbut Tahrir Indonesia, peranserta politik merupakan momentum eksternalisasi ideologi Islam Hizbut Tahrir Indonesia. Eksternalisasi adalah suatu pencurahan kedirian manusia secara terus-menerus ke dalam dunia (masyarakat), baik dalam aktivitas fisis maupun mentalnya. Dalam peranserta politik sebagai momentum eksternalisasi ini, terdapat dua tahap yang dilalui yaitu; pertama, pemilihan dan menginterpretasi nilai-nilai Islam dengan teks-teks kitab suci maupun kitab rujukan; kedua, sosialisasi ideologi Islam Hizbut Tahrir Indonesia melalui peranserta politik.

Pertama, pemilihan dan menginterpretasi nilai-nilai Islam (ideologi Islam) dengan teks-teks kitab suci maupun kitab rujukan. Dalam merespon berbagai fenomena sosial-keagamaan, para aktivis atau elit Hizbut Tahrir Indonesia berargumentasi dengan dasar-dasar teks-teks dan kitab rujukan para pendahulunya

yang dapat menguatkan pendapatnya. Pada hal tersebut sebelumnya dilakukan penginterpretasi pada teks-teks dan kitab rujukan. Pada penginterpretasian ini dilakukan dengan cara penafsiran terhadap teks-teks kitab suci maupun kitab rujukan. Hal ini dikarenakan teks-teks yang tertulis dalam kitab suci atau kitab-kitab rujukan adalah teks-teks kehidupan yang abstrak, yang dalam kenyataannya masih membutuhkan penafsiran, dan penafsiran tersebut kemudian tidak bersifat tunggal, namun bersifat plural. Setelah itu kemudian dilakukan pemilihan nilai-nilai Islam yang sesuai untuk menguatkan menguatkan pendapat atau gagasan yang dilakukannya.

Konteks ini, para aktivis Hizbut Tahrir Indonesia memposisikan teks-teks tersebut sebagai posisi utama (sentral) dan sebagai instrumen pandangan hidup (*way of live*) mereka, termasuk dalam bertindak dan melaksanakan aktivitas ibadahnya. Hizbut Tahrir Indonesia seperti yang sudah dijelaskan terkait momentum eksternalisasi kemudian melakukan pemilihan dan interpretasi nilai-nilai Islam (ideologi Islam) dengan teks-teks kitab suci maupun kitab rujukan. Hal ini terlihat bagaimana Hizbut Tahrir Indonesia dalam menggunakan ayat-ayat atau nilai-nilai islam (ideologi Islam) terkait menyeru seruan Allah swt, penegakkan syariah, dan penegakkan khilafah. Hal ini juga terlihat pada 17 kitab rujukan yang digunakan Hizbut Tahrir Indonesia sebagai pedoman hidup.

Pemilihan dan peninterpretasian nilai-nilai Islam (ideologi Islam), seperti yang disampaikan oleh ustadz Ismail selaku juru bicara DPP Hizbut Tahrir Indonesia, yaitu:<sup>188</sup>

Terdapat banyak ayat dan hadits yang menyerukan dalam kewajiban seorang muslim untuk melaksanakan *amar maruf nahi munkar*, salah satunya, Demi Dzat yang jiwaku ada dalam kekuasaan-Nya. Kamu akan benar-benar menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Atau jika tidak kamu lakukan-sungguh Allah akan segera mengirim atas kalian bencana dari sisi-Nya. Kemudian, kamu sungguh-sungguh berdo'a kepada-Nya. Namun, Allah sudah tidak menerima lagi do'a kalian. Ayat lainnya yaitu yang terdapat pada Ali Imran ayat 104

Menjadikan syariah sebagai hukum positif dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi sesuatu yang harus (*a must*) atau wajib dilakukan. Bahkan sejatinya dalam pandangan Islam, berdirinya sebuah negara tidak lain adalah untuk melaksanakan syariah, bukan untuk yang lain. Ayat seperti *fahkum baynakum atau fahkum baynahum bima anzalallah* – terapkankah hukum di antara kalian atau diantara mereka dengan apa yang telah diturunkan Allah, ditambah dengan kecaman bahwa siapa saja yang tidak menerapkan hukum dengan apa yang diturunkan Allah (*wa man lam yahkum bima anzallah*) sebagai fasik, dzalim bahkan kafir, semua itu menunjukkan adanya kewajiban untuk menerapkan syariah Islam.

Pada tahap kedua momentum eksternalisasi ialah sosialisasi ideologi Islam Hizbut Tahrir Indonesia melalui peranserta politik. Sosialisasi ini sendiri yaitu proses yang dipakai mendidik generasi baru untuk hidup sesuai dengan program-program kelembagaan masyarakat tersebut.<sup>189</sup> Tahap kedua sosialisasi ideologi Islam melalui peranserta politik, dilakukan secara kontinue (berkelanjutan) baik kepada para anggota Hizbut Tahrir Indonesia maupun masyarakat umum.

Hal tersebut dilakukan dengan *Tsaqafah Murakazzah* dan *Tsaqafah Jamaiyah*. *Tsaqafah Murakazzah* (intensif) merupakan pembinaan melalui kelompok-kelompok kajian (halaqah-halaqah) yang dilakukan secara rutin setiap satu minggu sekali atau

<sup>188</sup> Data Wawancara Ustadz Ismail Dengan Redaksi Majalah Al Wa'ie.

<sup>189</sup> Peter L. Berger, *Op. Cit*, 1991, hlm 19.

dua minggu sekali berdasarkan kesepakatan murabbi (pembina) dan mutarabbi (murid) yang berisi pembinaan ruhiyah, pemikiran-pemikiran Islam, serta hukum-hukum Islam.<sup>190</sup> *Tsaqafah jama'iyah* ialah pembinaan bagi umat dengan cara menyampaikan ide-ide dan hukum-hukum Islam yang telah ditetapkan Hizbut Tahrir, secara terbuka kepada masyarakat umum.<sup>191</sup> Aktivitas ini dapat dilakukan melalui pengajian-pengajian di masjid, di aula atau di tempat-tempat pertemuan umum lainnya. Bisa juga melalui media massa, buku-buku, atau selebaran-selebaran.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh ustadz Ismail dalam wawancara: Seperti yang disampaikan oleh ustadz Ismail, yaitu:<sup>192</sup>

Forum seperti tabligh akbar, diskusi publik, seminar, workshop, training, daurah, temu tokoh dan forum lainnya yang diselenggarakan oleh HTI adalah sebagian cara yang ditempuh HTI untuk menyampaikan penjelasan-penjelasan itu secara massal. Sementara secara personal, dilakukan dengan kontak, audiensi atau silaturahmi kepada para tokoh baik dari kalangan ulama, cendekiawan, birokrat, militer dan kepolisian, pers, pengusaha dan lainnya, yang ada di tengah masyarakat. Selain dengan cara langsung, penjelasan juga disampaikan dengan sarana media massa. HTI memiliki buletin Jumat al Islam, majalah al Waie dan tabloid Media Umat.

Pada konteks pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014, momentum eksternalisasi terlihat bagaimana Hizbut Tahrir Indonesia dalam melakukan interpretasi dan pemilihan nilai-nilai Islam (ideologi Islam) yang terkait hukum memilih dalam pemilu dan *khilafah Islamiyah* serta proses sosialisasinya. Hizbut Tahrir Indonesia berpadangan bahwa pemilu hanyalah cara (*uslub*) dan sarana

---

<sup>190</sup> Tahapan Dakwah Dan Aktivitas Politik Hizbut Tahrir diakses melalui <https://hizbut-tahrir.or.id/2013/08/13/tahapan-dakwah-dan-aktivitas-politik-hizbut-tahrir/> Minggu 25/September/2016.

<sup>191</sup> Tahapan Dakwah Dan Aktivitas Politik Hizbut Tahrir diakses melalui <https://hizbut-tahrir.or.id/2013/08/13/tahapan-dakwah-dan-aktivitas-politik-hizbut-tahrir/> Minggu 25/September/2016.

<sup>192</sup> Wawancara Dengan M. Ismail Yusanto Pada Kamis 3/November/2016.

(*wasilah*) untuk meraih atau mencapai sesuatu. Awalnya hukumnya mubah. Selanjutnya tergantung pada tujuan yang hendak dicapai dengan pemilu itu. Bila tujuannya itu Islami, maka pemilu itu boleh dilakukan. Tapi bila pemilu itu untuk tujuan yang tidak Islami atau memilih pemimpin yang akan menerapkan peraturan perundangan sekuler, maka memilih dalam pemilu seperti ini tidak boleh dilakukan. Sedangkan pada nilai islam terkait *khilafah Islamiyah*, Hizbut Tahrir Indonesia merujuk pada teks-teks seperti *fahkum baynakum atau fahkum baynahum bima anzalallah* – terapkankah hukum di antara kalian atau diantara mereka dengan apa yang telah diturunkan Allah, meyakini bahwa wajibnya menegakkan hukum Islam (syariat Islam) yang dilakukan dengan cara *khilafah Islamiyah*. Pandangan-pandangan terkait hukum memilih dalam pemilu dan *khilafah Islamiyah* kemudian Hizbut Tahrir Indonesia lakukan dengan sosialisasi atau peranserta politiknya dalam pembinaan maupun diskusi-diskusi yang dilakukannya.

#### **4.2.2 Obyektivasi: Hizbut Tahrir Indonesia sebagai Institusionalisasi Ideologi Islam**

Obyektivasi merupakan hasil yang dicapai dari momentum eksternalisasi. Setelah melakukan eksternalisasi, nilai-nilai Islam (ideologi Islam) mulai terobyektivasi oleh para anggota. Obyektivasi juga diartikan sebagai interaksi dengan dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami institusionalisasi. Institusionalisasi ini dapat dijelaskan menjadi dua hal.

Pertama, bahwa elit agama (aktivis) dan institusi sosial adalah dua wujud (entitas) yang berbeda. Dalam perspektif elit agama, institusi dan dunia luar (socio-kultural) adalah wujud yang berhadapan dengannya dalam momentum objektivasi. Lebih lanjut, perilaku elit agama (aktivis) yang sesuai dengan institusinya dan di luarnya dianggap sebagai dua wujud yang berlainan dengan tuntutan elit agama (sebagai realitas obyektif).

Kedua, institusionalisasi adalah proses membangun kesadaran menjadi tindakan. Dalam proses institusionalisasi tersebut, nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup dalam melakukan penafsiran terhadap tindakan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan, sehingga apa yang disadari adalah apa yang dilakukan. Pada tahap ini elit agama yang melakukan suatu tindakan tertentu tidak hanya berdasarkan atas apa yang dilakukan oleh para pendahulunya belaka, namun mereka memahami betul argumen, tujuan, dan manfaat dari tindakan tersebut.

Pada momentum objektivasi ideologi Islam Hizbut Tahrir Indonesia, para elit agama (aktivis) merefleksikan atau menginterpretasikan nilai-nilai islam (ideologi Islam) yang akan dibudayakan dan nilai-nilai Islam (ideologi Islam) yang akan disosialisasikan kepada anggota dan masyarakat. Pada hal ini kemudian dilakukan penerapan pembiasaan. Jika pada penerapan pembiasaan hal ini berhasil, maka ideologi Islam akan terobyektivasi (institusionalisasi) pada Hizbut Tahrir Indonesia. Dan karena sudah menjadi budaya, para aktivis maupun anggota, wajib taat terhadap budaya atau ideologi Islam Hizbut Tahrir Indonesia tersebut. Pada Hizbut Tahrir

Indonesia, ideologi Islam yang sudah terealisasi dan terobyektivasi di aktivis dan anggotanya ialah dakwah perjuangan *syariah* serta *khilafah islamiyah*.

#### **4.2.3 Internalisasi: Ideologi Islam Hizbut Tahrir Indonesia sebagai Identitas Diri**

Momentum internalisasi dalam Hizbut Tahrir Indonesia ialah pembiasaan atau mendarah dagingkan, menjadikan sesuatu yang asing menjadi sesuatu yang dikenal dan dipahami sebagai bagian dari diri sendiri sehingga realitas obyektif dapat dipahami sebagai realitas subyektif. Proses pembiasaan atau mendarah dagingkan, yaitu proses ketika tindakan rasional telah menjadi bagian dari pedoman hidup (*way of live*) atau kehidupan sehari-hari (*everyday life*) karena telah diinterpretasikan. Dalam tahapan ini tidak perlu lagi banyak penafsiran terhadap tindakan, karena tindakan tersebut sudah menjadi bagian dari sistem kesadarannya. Dengan demikian, ketika tindakan tersebut telah menjadi sesuatu yang kebiasaan atau mendarah daging, maka ia telah menjadi tindakan yang mekanis, yang otomatis dilakukan.

Momentum internalisasi ini akan membentuk pola pikir atau sistem kesadaran individu, sebab individu secara tidak langsung akan menirukan sesuatu yang disosialisasikan. Kemudian dilakukan atau diimplementasikan secara berkelanjutan (kontinue) sehingga menjadi kebiasaan. Hal ini karena individu menginterpretasi nilai-nilai dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya. Internalisasi kemudian dikatakan berhasil ketika nilai-nilai sudah terwujud secara nyata dalam berbagai perilaku sosial sehari-hari dari individu.

Momentum internalisasi ini bergantung dari obyektivasi yang dilakukan. Penerapan pembiasaan nilai-nilai dakwah perjuangan syariah serta *khilafah islamiyah* yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan (kontinue) dapat dinyatakan terobyektivasi (institusionalisasi) dengan baik. Hal ini kemudian berpengaruh pada momentum internalisasi. Karena Ketika obyektivasi terus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan (kontinue) serta sudah berjalan lama maka membentuk identitas diri para anggota sesuai dengan yang disosialisasikan dan diharapkan.

Pada Hizbut Tahrir Indonesia, momentum internalisasi terlihat melalui aktivitas pembinaan atau *halaqah/tsaqafah murakazah* yang membentuk identitas diri para aktivis dan anggotanya yang bersumber dari ideologi Islam Hizbut Tahrir Indonesia. Identitas diri yang menjadi kebiasaan dan mendarah daging dalam aktivis dan anggota Hizbut Tahrir Indonesia terlihat pada identitas islam politiknya. Yaitu identitas islam politik yang dilakukan dengan dakwah dan perjuangan *syariah* serta *khilafah islamiyah*. Seperti yang disampaikan oleh para informan, yaitu:

Ustadz Rahmat sebagai Ketua Lajnah Faalayah dalam wawancara menyampaikan kewajiban dan hakikat dakwah, yaitu :<sup>193</sup>

Karena itu, seorang Muslim dituntut untuk tidak mengenal lelah dalam beribadah kepada Allah Swt., termasuk dalam mengemban dakwah sebagai bagian dari ibadah itu. Dengan itulah, insya Allah, pertolongan Allah akan lebih cepat kita peroleh, dan cita-cita berupa tegaknya syariah Islam secara total dalam naungan *Khilafah Islamiyah* akan segera terwujud.

Hal tersebut juga seperti disampaikan oleh ustadz Ismail, yaitu:<sup>194</sup>

---

<sup>193</sup> Wawancara Dengan M. Rahmat Kurnia Pada Kamis 3/November/2016.

Dakwah bagi tegaknya kembali *syariah* dan *khilafah* sebagai manifestasi dari *tauhid* atau keimanan kita kepada Allah SWT, adalah dakwah dengan tujuan politik. Ini tentu hanya bisa dicapai melalui perjuangan politik.

Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam. Politik merupakan kegiatannya, dan Islam adalah ideologinya

Dari hasil wawancara diatas terlihat bagaimana Identitas diri Islam politik sebagai identitas aktivis dan anggota Hizbut Tahrir Indonesia telah menjadi kebiasaan dan mendarah daging. Identitas diri Hizbut Tahrir Indonesia terutama pada nilai dakwah dan perjuangan *syariah* serta *khilafah islamiyah* sebagai identitas aktivis dan anggota Hizbut Tahrir Indonesia.

Pada Hizbut Tahrir Indonesia kemudian penginternalisasian ideologi Islam berupa nilai dakwah dan perjuangan *syariah* serta *khilafah islamiyah* sebagai identitas islam politik, hal ini menjadikan alasan seseorang (aktivis dan anggota) berperilaku. Pada konteks ini ialah peranserta politiknya (partisipasi politik dan mobilisasi politik) berupa unjuk rasa, petisi, diskusi publik, seminar,temu tokoh, pembinaan intensif, pembinaan umum, dan lainnya yang tidak terlepas atau mengandung unsur dakwah dan perjuangan *syariah* serta *khilafah islamiyah*.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh ustadz Ismail terkait pertanyaan ide *syariah* serta *khilafah islamiyah* yang identik dengan Hizbut Tahrir Indonesia, yaitu:<sup>195</sup>

.....Mungkin karena HT-lah yang selama ini dikenal paling getol menyuarakan soal ini sehingga ide syariah dan khilafah seolah identik dengan HT..... di banyak forum kita sering sekali menjumpai peserta atau tokoh yang dengan penuh antusias mengucapkan terima kasih atas usaha keras HT yang gencar menyuarakan ide syariah dan khilafah sehingga akhirnya mereka menyadari arti pentingnya kewajiban itu.

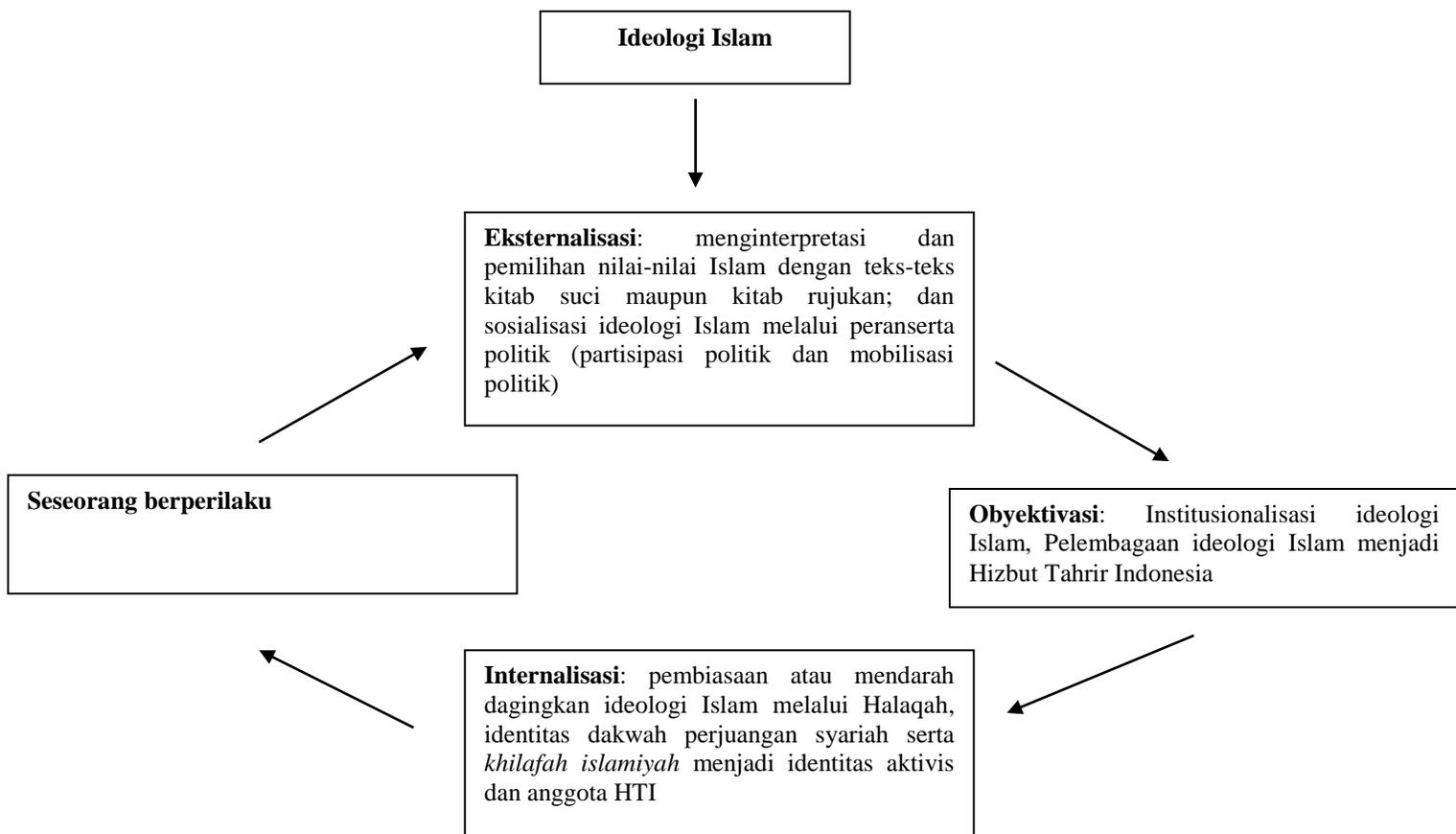
---

<sup>194</sup> Wawancara Dengan M. Ismail Yusanto Pada Kamis 3/November/2016.

<sup>195</sup> Wawancara Dengan M. Ismail Yusanto Pada Kamis 3/November/2016.

Pada momentum internalisasi yang kemudian menjadikan seseorang berperilaku, hal ini kemudian akan menjadi sebuah proses dialektis. Hal tersebut akan menjadi momentum eksternalisasi kembali dan obyektivasi kembali. Proses dialektis ini kemudian akan terus kembali berulang, eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. Hal tersebut selama nilai-nilai yang diajarkan tidak berubah.

**Skema IV.1**  
**Konstruksi Sosial Ideologi Islam Hizbut Tahrir Indonesia**



Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2016)

### 4.3 Ideologi Islam dalam Tipe Gerakan Sosial Hizbut Tahrir Indonesia

Pada peranserta politik Hizbut Tahrir Indonesia, hal ini lebih lanjut dapat dijelaskan secara sosiologis dengan konsep gerakan sosial. Hal ini dikarenakan Hizbut Tahrir Indonesia yang merupakan sebuah gerakan sosial yaitu gerakan sosial lama. Ini terlihat dari bentuk aktivitas dan tujuan Hizbut Tahrir Indonesia.

Pada gerakan sosial dijelaskan terdiri dari tiga aspek, yakni: pengorganisasian (*organized*); pertimbangan (*deliberate*); dan daya tahan (*enduring*). Hal-hal tersebut senada dengan aktivitas atau peranserta politik yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia. Pada aspek pengorganisasian, Hizbut Tahrir Indonesia melakukan aktivitas yang terorganisir. Hizbut Tahrir Indonesia memiliki struktur organisasi, anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART), dan juga agenda/aktivitas yang terstruktur atau terorganisir seperti yang telah dijelaskan pada lima aktivitasnya; pembinaan *tsaqofah murakazah*; pembinaan *tsaqofah jamaiyah*; perang pemikiran; perjuangan politik; serta mengangkat dan menetapkan kemaslahatan umat.

Pada aspek pertimbangan, Hizbut Tahrir Indonesia melakukan pertimbangan menyangkut segala aktivitas dan keputusan yang dilakukannya. Hizbut Tahrir Indonesia melakukan musyawarah dan pertimbangan sebelum melakukan atau menetapkan aktivitas dan keputusannya. Aspek pertimbangan yang mengacu pada Al Qur'an dan Hadits sebagai pedoman utamanya serta kitab-kitab rujukan Hizbut Tahrir yang lainnya.

Pada aspek daya tahan, hal ini terlihat dari gerakan Hizbut Tahrir yang sudah bertahan dalam waktu yang cukup lama dari tahun 1950an, serta gerakan Hizbut

Tahrir Indonesia yang sudah bertahan dari sekitar 1980an. Hizbut Tahrir Indonesia terus menjalankan aktivitas peranserta politiknya. Aspek daya tahan kemudian juga terlihat dimana ideologi Islam dan aktivitasnya yang terus bertahan sampai saat ini walau mengalami tentangan dan hambatan.

Hizbut Tahrir Indonesia dalam ranah ilmu sosiologis atau gerakan sosial, hal ini dapat pula dilakukan dengan analisis tipe gerakan sosial Hizbut Tahrir Indonesia oleh para ahli. Pada pengkategorisasian tipe gerakan sosial menurut Macionis dan Locher yang berdasarkan dimensi sasaran perubahan dan dimensi jumlah besarnya perubahan, penulis mengkategorikan Hizbut Tahrir Indonesia sebagai *Revolutionary Social Movement* (Gerakan Sosial Revolusi). Hal ini dapat dikarenakan gerakan Hizbut Tahrir yang berjuang secara ekstrim untuk transformasi dasar pada sistem pemerintahan saat ini yang menjalankan demokrasi menjadi sistem pemerintahan *khilafah*. Hal tersebut seperti yang berada pada salah satu latar belakang gerakan Hizbut Tahrir Indonesia yaitu aktivitas mendirikan negara *khilafah islamiyah*.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh ustadz Ismail:<sup>196</sup>

Hizbut Tahrir berjuang atau berdakwah untuk melanjutkan kehidupan Islam (*li isti'nafil hayatil islamiyyah*). Artinya, Hizbut Tahrir dengan dakwahnya itu ingin mengajak kaum muslimin di seluruh dunia kepada pengamalan kembali seluruh hukum-hukum Islam baik dalam masalah aqidah, ibadah, makanan, minuman, pakaian, *akhlaq*, *dakwah*, *muamalah* dan *uqubah* dengan jalan menegakkan khilafah Islam dan menerapkan syariah Islam secara menyeluruh.

Senada dengan tipe gerakan sosial Macionis dan Locher, penulis mengkategorikan tipe gerakan Hizbut Tahrir Indonesia menurut Zanden dan Spencer kedalam tipe *revolutionary movement* (Gerakan Revolusi). Zanden dalam

---

<sup>196</sup> Wawancara Dengan M. Ismail Yusanto Pada Kamis 3/November/2016.

pengelompokkan gerakan sosial berdasarkan pada basis tujuan ideologi. Pada gerakan revolusi, Zanden menjelaskan gerakan ini ditujukan untuk mengganti nilai-nilai yang ada. Hal ini serupa dengan Hizbut Tahrir Indonesia yang ingin menggantikan nilai-nilai *kufur* (sekularisme, neo imperialisme, kapitalisme, demokrasi) menjadi nilai islam atau syara.

Sedangkan gerakan revolusi menurut Spencer, tipe ini dilihat dari tujuan perubahan sosial. Adapun gerakan revolusi yaitu tipe gerakan dramatis yang berusaha menggulingkan otoritas yang sudah mapan, apabila diperlukan bisa menggunakan kekerasan. Pada Hizbut Tahrir Indonesia, dilihat dari tujuan gerakan yang ingin mendirikan negara khilafah islamiyah dan mengubah sistem negara, hal ini dapat dikategorikan menjadi tipe gerakan revolusi walaupun hal ini belum terealisasi.

Penjelasan menurut Macionis dan Locher, Zanden, Spencer, ini kemudian seperti yang disampaikan oleh ustadz Rahmat, yaitu:<sup>197</sup>

Akar persoalannya adalah tidak adanya penerapan hukum Islam. Yang diterapkan malahan sistem sekular demokrasi. Sistem demokrasi meniscayakan hukum dibuat oleh manusia. Halal dan haram tidak dijadikan standar penilaian. Semuanya dilihat dari segi manfaat. Konsekuensinya hukum akan berubah-ubah sesuai dengan kepentingan para pembuatnya dan manfaat materi yang mereka lihat. Ubah substansi politik dari sekularisme, pemisahan Islam dari kehidupan dan kedaulatan di tangan manusia (rakyat) menjadi penerapan *syariah* Islam dalam segala aspek kehidupan (kedaulatan ada di tangan hukum *syara*).

Dari tipe-tipe gerakan sosial oleh para ahli tersebut kemudian diketahui bahwa gerakan sosial Hizbut Tahrir Indonesia ditemukan kesamaan yaitu sebagai gerakan sosial yang ingin merubah atau menggantikan nilai dan sistem yang sudah ada menjadi nilai dan sistem yang baru. Hizbut Tahrir Indonesia berusaha untuk merubah

---

<sup>197</sup> Wawancara Dengan M. Rahmat Kurnia Pada Kamis 3/November/2016.

atau menggantikan nilai-nilai kufur (sekularisme, neo imperialisme, kapitalisme, demokrasi) yang saat ini dijalankan di Indonesia menjadi nilai-nilai Islam dan sistem *syariah* serta *khilafah Islamiyah*. Dari hal tersebut, kemudian diketahui bahwa ideologi Islam Hizbut Tahrir Indonesia ini berperan dalam tipe gerakan sosial yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia yang revolusioner.

**Tabel IV.1**  
**Tipe Gerakan Sosial Hizbut Tahrir Indonesia**

| Machionis dan Locher  | Zanden  | Spencer   |
|---|---|---|
| Tipe Berdasarkan Sasaran Perubahan dan Tingkat Perubahan  | Tipe Berdasarkan Basis Tujuan Ideologi  | Tipe Berdasarkan Tujuan Perubahan   |
| <b>Gerakan Sosial Revolusi:</b><br>Melakukan transformasi mendasar pada sistem pemerintahan saat ini yang menjalankan demokrasi menjadi sistem pemerintahan <i>khilafah</i> | <b>Gerakan Revolusi:</b><br>Basis Tujuan ingin menggantikan nilai-nilai kufur (sekularisme, neo imperialisme, kapitalisme, demokrasi) menjadi nilai atau ideologi Islam atau <i>syara</i> . | <b>Gerakan Revolusi:</b><br>Tujuan gerakan yang ingin mendirikan negara khilafah islamiyah dan mengubah sistem negara, hal ini dapat dikategorikan menjadi tipe gerakan revolusi walaupun hal ini belum terealisasi |

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2016)

#### **4.4 Kritik Peranserta Politik Hizbut Tahrir Indonesia**

##### **4.4.1 Politik Kritik Hizbut Tahrir Indonesia**

Pada peranserta politik yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia ialah peranserta politik yang mengacu pada *mabda* (ideologi) Islam. Peranserta politik ini berupa pemikiran-pemikiran Islam, hukum-hukum Islam, serta solusi-solusi Islam terkait kebijakan, masalah, atau fenomena yang berada di masyarakat. Peranserta politik yang bertujuan untuk diamalkan dan diwujudkan dalam realitas kehidupan, negara, dan masyarakat.

Hizbut Tahrir Indonesia melakukan peranserta politiknya cenderung hanya dengan berupa sumbangan pemikiran-pemikiran yang bersifat kritikan. Peranserta politik tanpa ikut turun langsung pada arena politik praktis (legislatif dan eksekutif) untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan. Hizbut Tahrir Indonesia, peranserta politiknya yang berupa pemikiran politik dilakukan dengan cara mengkritisi setiap kebijakan dan fenomena-fenomena yang berada di masyarakat. Hal tersebut terlihat dimana Hizbut Tahrir Indonesia konsisten dalam mengkritisi setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah serta menyalahkan pemerintah atas segala masalah yang terjadi. Pengkritisian ini terutama fenomena-fenomena yang berhubungan dengan syariat Islam dan kemaslahatan umat Islam.

Pada kaitannya dengan peranserta politik yang berupa kritikan tersebut, , terlihat pada wawancara dengan ustadz Ismail, yaitu,<sup>198</sup>

Hizbut Tahrir Indonesia dalam melakukan pertemuan dengan pemerintah maupun lainnya merupakan bagian dari aktivitas politik Hizbut Tahrir Indonesia. Pada contohnya pertemuan yang Hizbut Tahrir Indonesia pernah lakukan yaitu kasus RUU Antierorisme, RUU Ormas, UU Pornografi, Penolakan terhadap acara Miss World dan masih banyak lagi. Pada hal ini bukan hanya dilakukan oleh DPP tetapi juga DPD pada setiap daerah. Dalam pertemuan-pertemuan ini juga tidak hanya dilakukan oleh para lelaki saja namun para perempuan juga ikut terlibat dibawah Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia

.....Kemudian secara konsisten kita juga mengkritisi tiap kebijakan, seperti kenaikan BBM, penandatanganan DCA dengan Singapura dan sebagainya, dan peraturan seperti RUU APP, UU Migas, UU Sumberdaya Air dan sebagainya yang kita nilai bertentangan dengan syariah.

Terkait dengan fenomena pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014, Hizbut Tahrir Indonesia juga hanya melakukan pemikiran-pemikiran yang bersifat kritikan Mereka mengkritik bagaimana pemilu yang bertujuan untuk mencari wakil rakyat dan presiden hanya akan menimbulkan masalah-masalah baru. Serta kritikan bahwa pemilu tidak akan merubah atau menyelesaikan masalah-masalah yang sebelumnya ada. Hal ini terlihat pada hasil wawancara dengan penulis dan dari berbagai artikel al-waie, yaitu:

Pemilu nyatanya tidak memberikan perbaikan dan perubahan yang hakiki. Pemilu yang terjadi hanya memberikan pergantian rezim, sementara sistemnya tetap tidak berubah. Sebab Pemilu di manapun memang didesain hanya untuk rotasi dan pergantian orang atau rezim, bukan untuk perubahan sistem dan ideologi.

Pemilu mahal juga membawa konsekuensi, yaitu bagaimana secepatnya kembali modal. Karena itu, begitu terpilih, adeg (anggota legislatif) dan para pejabat pun berubah pelupa; lupa kepada rakyat, lupa pada janji kampanye, lupa moral bahkan berpura-pura lupa dosa. Cara korupsi, manipulasi dan cara-cara kotor lainnya dilakukan. Hal itu ditambah dengan memperbesar pendapatan legal atas nama tunjangan, peningkatan gaji, fasilitas, insentif, dsb.

---

<sup>198</sup> Wawancara Dengan M. Ismail Yusanto Pada Kamis 3/November/2016.

Ustadz Rahmat terkait pemilu menyampaikan:<sup>199</sup>

Masyarakat disugahi dua pasangan calon presiden/wakil presiden. Karena hanya dua pasang, persaingan menjadi sangat tajam. Kampanye positif dan negatif yang dilakukan oleh tim sukses keduanya pun tak terelakkan. ....demokrasi kemudian memecah belah umat Islam....siapapun pemenang pilpres tidaklah mengubah banyak wajah Indonesia karena selama demokrasi dan ekonomi liberal diterapkan.

Wawancara lainnya, salah satu aktivis HTI juga menyampaikan:

Jika kita mau jujur melihat realitas maka antara pemilihan kepala daerah yang dipilih melalui Pemilukada langsung dan dipilih oleh DPRD sama-sama menghasilkan politisi korup. Diantara dua sistem tersebut sama-sama berujung yang berkuasa adalah pemilik modal. Juga sama-sama menghalalkan selingkuh antara penguasa dan pengusaha. Walhasil dua-duanya sama-sama semakin memperkokoh negara atau pemerintahan korporasi. Negara atau pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan para kapitalis dan abai pada kepentingan rakyat. Jadi sistem pemilu dalam demokrasi pasti menghasilkan politisi korup.

Pada peranserta politik berupa pemikiran-pemikiran yang bersifat kritikan tersebut dinilai seharusnya diikuti dengan ikut berperan aktifnya Hizbut Tahrir Indonesia pada arena politik praktis. Hal ini karena pemikiran-pemikiran yang hanya dikeluarkan tanpa diikuti dengan pelaksanaan maka hanya akan menjadi hal yang *utopis*. Seharusnya juga dengan melakukan pemikiran-pemikiran kritiknya, Hizbut Tahrir Indonesia wajib ikut membantu dalam pelaksanaannya, bukan hanya menjadi pengamat dan pengkritisi saja jika terjadi kesalahan.

---

<sup>199</sup> Wawancara Dengan M. Rahmat Kurnia Pada Kamis 3/November/2016.

#### **4.4.2 Sistem Demokrasi vs Sistem Khilafah Islamiyah: Ketidak Konsistenan Hizbut Tahrir Indonesia**

Pada negara Indonesia, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem demokrasi. Demokrasi sendiri menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau *government by the people*.<sup>200</sup> Atau dapat dikatakan suatu bentuk pemerintahan yang mengatur bahwa kekuasaan itu berada di tangan rakyat. Yang berasal dari kata Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa. Pada Indonesia, demokrasi yang dianut ialah demokrasi berdasarkan Pancasila. Tetapi yang tidak dapat disangkal bahwa terdapat beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional yang cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Terkait hal tersebut, Hizbut Tahrir Indonesia kemudian meyakini bahwa ideologi dan sistem selain Islam adalah ideologi *batil* dan rusak, sebab ideologi-ideologi itu adalah buatan manusia, disamping akidahnya tidak dibangun di atas akal dan juga bertentangan dengan fitrah manusia. Hizbut Tahrir Indonesia, meyakini ideologi Islam satu-satunya ideologi yang *shahih* (benar) di dunia ini. Sebab Ideologi Islam adalah ideologi yang datang dari Allah SWT.

Pada Hizbut Tahrir Indonesia, sebagai sebuah gerakan sosial yang berada di Indonesia kendati bersikap bermusuhan pada sistem yang ada, tidak dapat dipungkiri mereka sendiri bergerak di lingkungan sistem tersebut.<sup>201</sup> Hizbut Tahrir Indonesia bersikap bermusuhan pada sistem yang ada dan diterapkan di Indonesia yaitu sistem

---

<sup>200</sup> Miriam Budiardjo, *Op. Cit*, hlm 105.

<sup>201</sup> Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, *Gerakan Keagamaan Dan Pemikiran*, (Jakarta: Al Ishlahy, 1993), hlm 92.

Demokrasi. Hal ini karena bagi Hizbut Tahrir Indonesia satu-satunya yang benar ialah sistem yang berasal dari Islam yaitu sistem Khilafah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh para informan.

Ustadz Ismail dan ustadz Rahmat sebagai perwakilan dari DPP Hizbut Tahrir Indonesia menyampaikan sikap Hizbut Tahrir Indonesia terhadap sistem demokrasi yang ada, yaitu:

Ustadz Ismail menyampaikan:<sup>202</sup>

Demokrasi itu intinya ‘kan kedaulatan di tangan rakyat. Yang dimaksud kedaulatan di situ adalah *yamlikul iradah* atau yang “memiliki kehendak paling tinggi”, kemana seluruh rakyat dan seluruh elemen negara tunduk. Hizbut Tahrir menolak gagasan bahwa kedaulatan itu di tangan rakyat, karena jelas sekali Islam mengajarkan kedaulatan itu di tangan Allah, di tangan syariat. Kehendak yang paling tinggi itu di tangan syariat. Ke sanalah rakyat dan seluruh elemen negara itu wajib tunduk.

Inti dari paham demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat. Bahwa di dalamnya ada musyawarah, ada partisipasi rakyat, dan lainya itu sesungguhnya sekadar asesoris dari gagasan utama tentang kedaulatan rakyat. Berdasar itu, sebagaimana di jelaskan di muka, kita kemudian mengatakan demokrasi itu secara mendasar tidak kompatibel dengan Islam. Kalau demokrasi itu dimaknai sebagai kedaulatan rakyat, karena memang ini yang menjadi inti dari ide demokrasi, dan makna dari kedaulatan itu adalah hak membuat hukum ada pada wakil rakyat dimana akal manusia sebagai sumber hukumnya, maka kita katakan bahwa demokrasi itu sama sekali tidak compatible dengan Islam. Karena Islam jelas-jelas mengatakan bahwa kedaulatan atau hak membuat hukum ada di tangan Allah (*syariah*).

Dan ustadz Rahmat sebagai ketua Lajnah Faaliyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia juga menyampaikan:<sup>203</sup>

Dalam demokrasi yang berkuasa adalah uang. Lihat saja, kedaulatan rakyat yang digembar-gemborkan adalah khayalan. Yang ada adalah kedaulatan segelintir elit politik, bahkan kedaulatan uang. Persamaan politik (*political equality*) hanyalah slogan. Hanya orang yang beruang saja yang dapat berkuasa. Rakyat baru disapa ketika Pemilu atau Pilkukada. Yang mereka butuhkan dari rakyat hanyalah coblosan/contrengan.

Selama ini memang kekuasaan ada di tangan rakyat dan rakyat mendelegasikannya kepada penguasa/wakil rakyat dengan cek kosong atau kontrak sesuai sekularisme. Ini

---

<sup>202</sup> Wawancara Dengan M. Ismail Yusanto Pada Kamis 3/November/2016.

<sup>203</sup> Wawancara Dengan M. Rahmat Kurnia Pada Kamis 3/November/2016.

harus diubah menjadi kekuasaan ada di tangan rakyat dan rakyat mendelegasikannya kepada penguasa/wakil rakyat dengan isi ‘menerapkan Kitabullah dan sunnah Rasul saw.’

Pada pernyataan tersebut kemudian terlihat bagaimana Hizbut Tahrir Indonesia yang menolak atau tidak setuju dengan sistem demokrasi. Ketidaksetujuan Hizbut Tahrir Indonesia tersebut dikarenakan demokrasi bermakna sebagai kedaulatan di tangan rakyat. Hizbut Tahrir Indonesia meyakini seharusnya kedaulatan atau hak membuat hukum ada di tangan Allah SWT (*syariah*) melalui sistem *Khilafah Islamiyah*.

Namun dalam peranserta politik yang dilakukannya ternyata sikap ketidaksetujuan Hizbut Tahrir Indonesia pada sistem demokrasi dinilai tidak konsisten. Hal ini terlihat pada peranserta politik unjuk rasa, petisi, diskusi publik, kritik terhadap pemerintah yang dilakukannya. Dimana peranserta politik yang dilakukannya tersebut adalah hasil dari sistem demokrasi dan hanya bisa dilakukan pada sistem demokrasi.

Ketidakkonsistenan sikap Hizbut Tahrir Indonesia terhadap demokrasi kemudian terlihat pada hasil wawancara, yaitu:<sup>204</sup>

Berbicara tentang kekuasaan di tangan rakyat, sebagaimana dikatakan sistem demokrasi, Hizbut Tahrir tentu juga setuju. Tapi, Hizbut Tahrir tidak setuju bila dikatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Jadi, Hizbut Tahrir itu memisahkan antara kekuasaan dengan kedaulatan. Kekuasaan memang di tangan rakyat, tapi kedaulatan harus di tangan syariat.

HTI melakukan berbagai upaya untuk turut serta bersama komponen umat yang lain menyelamatkan negeri ini melalui berbagai kegiatan politik. Kita menyebutnya *dakwah siyasiyah* (dakwah politis). Yang utama adalah seruan kita melalui berbagai cara (unjuk rasa, petisi, penulisan di media massa, diskusi, pengiriman delegasi dan sebagainya)....

---

<sup>204</sup> Wawancara Dengan M. Ismail Yusanto Pada Kamis 3/November/2016.

Ketidakkonsistenan sikap Hizbut Tahrir Indonesia ini juga terlihat pada studi kasus penelitian terkait memilih pada pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014.

Adapun ustadz Ismail menyampaikan, yaitu:<sup>205</sup>

Pemilu mendatang adalah bagian dari sistem demokrasi untuk memilih anggota legislatif dan presiden. Dipahami bahwa pada dasarnya pemilu legislatif sebagai bentuk *wakâlah* hukumnya *mubah*. Tapi tetap dengan catatan: untuk apa pemilu tersebut diselenggarakan? Bila dalam kerangka dan untuk tegaknya *syariah* dan kepemimpinan Islam, hukumnya boleh, dan demikian sebaliknya. Proses politik yang diselenggarakan untuk kokohnya kerangka sistem politik sekuler itu tidaklah sesuai dengan Islam, karena Islam mewajibkan tegaknya sistem Islam, yakni *khilafah* di mana di dalamnya diterapkan syariah Islam secara *kaffah*.

Dari hal tersebut terlihat dimana ketidakkonsistenan sikap mengenai memilih dalam sistem demokrasi. Hizbut Tahrir Indonesia menetapkan beberapa syarat dan ketentuan pada pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014. Jika memilih bertujuan untuk tegaknya syariah dan kepemimpinan Islam, hukumnya boleh, dan demikian sebaliknya. Memilih juga harus yang sesuai syariat Islam dimana Syarat tersebut adalah laki-laki, muslim, dewasa (*baligh*), merdeka, berakal, adil dan mampu.

---

<sup>205</sup> Wawancara Dengan M. Ismail Yusanto Pada Kamis 3/November/2016.

#### 4.5 Penutup

Teori konstruksi sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh Berger dan Luckman. Mereka menjelaskan, agama sebagai bagian dari kebudayaan merupakan konstruksi manusia.<sup>206</sup> Hal ini berarti, bahwa terdapat proses dialektika antara masyarakat dengan agama sebagai bagian dari budaya. Baik momentum eksternalisasi, obyektivasi maupun internalisasi tersebut akan selalu berproses secara dialektik dalam masyarakat.

Pada momentum eksternalisasi, terdapat dua tahap yang dilalui yaitu; pertama, pemilihan dan menginterpretasi nilai-nilai Islam dengan teks-teks kitab suci maupun kitab rujukan; kedua, sosialisasi ideologi Islam Hizbut Tahrir Indonesia melalui peranserta politik. Pada momentum obyektivasi ideologi Islam Hizbut Tahrir Indonesia, para elit agama (aktivis) merefleksikan atau menginterpretasikan nilai-nilai islam (ideologi Islam) yang akan dibudayakan dan nilai-nilai Islam (ideologi Islam) yang akan disosialisasikan kepada anggota dan masyarakat. Jika pada penerapan pembiasaan hal ini berhasil, maka ideologi Islam akan terobyektivasi (institusionalisasi) pada Hizbut Tahrir Indonesia. Sedangkan momentum internalisasi dalam Hizbut Tahrir Indonesia ialah pembiasaan atau mendarah dagingkan, menjadikan sesuatu yang asing menjadi sesuatu yang dikenal dan dipahami sebagai bagian dari diri sendiri sehingga realitas obyektif dapat dipahami sebagai realitas subyektif. Proses pembiasaan atau mendarah dagingkan, yaitu proses ketika tindakan

---

<sup>206</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Loc. Cit.*

rasional telah menjadi bagian dari pedoman hidup (*way of live*) atau kehidupan sehari-hari (*everyday life*).

Pada penjelasan tipe-tipe gerakan sosial oleh para ahli tersebut kemudian diketahui bahwa gerakan sosial Hizbut Tahrir Indonesia ditemukan kesamaan yaitu sebagai gerakan sosial yang ingin merubah atau menggantikan nilai dan sistem yang sudah ada menjadi nilai dan sistem yang baru. Hizbut Tahrir Indonesia berusaha untuk merubah atau menggantikan nilai-nilai kufur (sekularisme, neo imperialisme, kapitalisme, demokrasi) yang saat ini dijalankan di Indonesia menjadi nilai-nilai Islam dan sistem *syariah* serta *khilafah Islamiyah*.

Pada kritik penulis terhadap peranserta politik Hizbut Tahrir Indonesia terdapat dua hal. Pertama, peranserta politiknya cenderung hanya dengan berupa sumbangan pemikiran-pemikiran yang bersifat kritikan. Peranserta politik tanpa ikut turun langsung pada arena politik praktis (legislatif dan eksekutif) untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan. Kedua, ketidak konsistenan. Peranserta politik yang dilakukannya ternyata sikap ketidaksetujuan Hizbut Tahrir Indonesia pada sistem demokrasi dinilai tidak konsisten. Hal ini terlihat pada peranserta politik unjuk rasa, petisi, diskusi publik, kritik terhadap pemerintah yang dilakukannya. Dimana peranserta politik yang dilakukannya tersebut adalah hasil dari sistem demokrasi dan hanya bisa dilakukan pada sistem demokrasi. Ketidakkonsistenan sikap Hizbut Tahrir Indonesia ini juga terlihat pada pandangan terkait memilih dalam pemilihan umum, dimana jika memilih bertujuan untuk tegaknya *syariah* dan kepemimpinan Islam, hukumnya boleh, dan demikian sebaliknya.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Hizbut Tahrir Indonesia merupakan sebuah gerakan sosial karena memenuhi aspek pengorganisasian (*organized*); pertimbangan (*deliberate*); dan daya tahan (*enduring*) dalam aktivitasnya. Pada penjelasan tipe-tipe gerakan sosial oleh para ahli tersebut kemudian diketahui bahwa gerakan sosial Hizbut Tahrir Indonesia ditemukan kesamaan yaitu sebagai gerakan revolusi. Gerakan sosial yang ingin merubah atau menggantikan nilai dan sistem yang sudah ada menjadi nilai dan sistem yang baru. Hizbut Tahrir Indonesia berusaha untuk merubah atau menggantikan nilai-nilai kufur (sekularisme, neo imperialisme, kapitalisme, demokrasi) yang saat ini dijalankan di Indonesia menjadi nilai-nilai Islam dan sistem *syariah* serta *khilafah Islamiyah*.

Peranserta politik yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia di Pileg dan Pilpres 2014, mereka kecenderungan hanya aktif pada mobilisasi politik sedangkan pada partisipasi politik kurang terlihat. Pada konteks Hizbut Tahrir Indonesia dalam Pileg dan Pilpres 2014, mereka melakukan mobilisasi ini dengan formulasi ideologi Islam. Mobilisasi politik Hizbut Tahrir Indonesia dilakukan dengan berbagai macam pembinaan dan diskusi-diskusi. Pada partisipasi politik dalam Pileg dan Pilpres 2014.

Ideologi Islam Hizbut Tahrir Indonesia dalam kajian teori konstruksi sosial, hal ini kemudian dijelaskan dengan tiga momentum dialektis, eksternalisasi, obyektivasi,

dan internalisasi. Dalam momentum eksternalisasi ini, terdapat dua tahap yang dilalui yaitu; pertama, pemilihan dan menginterpretasi nilai-nilai Islam dengan teks-teks kitab suci maupun kitab rujukan; kedua, sosialisasi ideologi Islam Hizbut Tahrir Indonesia melalui peranserta politik. Pada momentum obyektivasi ideologi Islam Hizbut Tahrir Indonesia, para elit agama (aktivis) merefleksikan atau menginterpretasikan nilai-nilai islam (ideologi Islam) yang akan dibudayakan dan nilai-nilai Islam (ideologi Islam) yang akan disosialisasikan kepada anggota dan masyarakat. Jika pada penerapan pembiasaan hal ini berhasil, maka ideologi Islam akan terobyektivasi (institusionalisasi) pada Hizbut Tahrir Indonesia. Sedangkan momentum internalisasi dalam Hizbut Tahrir Indonesia ialah pembiasaan atau mendarah dagingkan, menjadikan sesuatu yang asing menjadi sesuatu yang dikenal dan dipahami sebagai bagian dari diri sendiri sehingga realitas obyektif dapat dipahami sebagai realitas subyektif. Proses pembiasaan atau mendarah dagingkan, yaitu proses ketika tindakan rasional telah menjadi bagian dari pedoman hidup (*way of live*) atau kehidupan sehari-hari (*everyday life*).

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian Peran Ideologi dalam Peranserta Politik Hizbut Tahrir Indonesia (Studi Kasus Peranserta Politik Hizbut Tahrir Indonesia pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014), penulis mengajukan saran:

1. Kepada Hizbut Tahrir, khususnya HTI, meskipun penulis mengapresiasi terhadap segala upaya membebaskan dunia Islam dari dominasi Barat dan ide agar kembali kepada kehidupan Islami dalam segala aspek, namun tentunya dapat menawarkan konsep yang tidak hanya idealistik, namun juga realistik. Sekiranya perlu merumuskan kembali peranserta politiknya dengan bentuk dan kemasan yang sesuai realitas-realitas politik yang ada sekarang ini, misalnya peranserta politik yang bukan hanya untuk mengkritisi negara, tetapi juga peranserta politik untuk menyatukan umat Islam serta masyarakat Indonesia.
2. Kepada mahasiswa Jurusan Sosiologi agar terus mengkaji secara kritis pemikiran-pemikiran yang ditawarkan berbagai gerakan sosial, sehingga dapat menjadi bahan diskusi di tingkat akademik, kemudian dapat dilakukan pengembangan-pengembangan agar menjadi teori yang relevan dengan perkembangan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Peraturan Hidup Dalam Islam*; Penerjemah, Abu Amin, dkk; Penyunting, Tim HTI-Press. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2013.
- Arifin, Syamsul. *Ideologi Dan Praksis Gerakan Kaum Fundamentalists: Pengalaman Hizbut Tahrir Indonesia*. Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2005.
- Berger, Peter Ludwig. *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1991.
- Berger, Peter L. dan Thomas Luckman. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES, 2011.
- Budiardjo, Mirriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Dillon, Michele. *Handbook Of The Sociology Of Religion*. New York: Cambridge University Press, 2003.
- Faisal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- Hamilton, Malcolm. *The Sociology Of Religion*. London: Routledge, 2001.
- Huntington, Samuel P. and Joan Nelson. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Kris, Nugroho. *Ikhtiar Teoritik Mengkaji Peran Partai Dalam Mobilisasi Politik Elektoral*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2011.
- Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY. *Gerakan Keagamaan Dan Pemikiran*. Jakarta: Al Ishlahy, 1993.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya, 2001.
- Rodhi, Muhammad Muhsin. *Tsaqofah Dan Metode Hizbut Tahrir Dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah*. Baghdad: Departemen Pendidikan Tinggi dan Kajian Keilmuan Universitas Islam Baghdad, 2008.
- Sanit, Arbi. *Swadaya Politik Masyarakat; Telaah Tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politik, Pertumbuhan Hukum, Dan Hak Asasi*. Jakarta: CV. Rajawali, 1985.
- Sitepu, Anthonius. *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sukmana, Oman. *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing, 2016.
- Sukarna. *Ideologi Suatu Studi Ilmu Politik*. Bandung: Penerbit Alumni, 1981.
- Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Takwin, Bagus. *Akar-Akar Ideologi*. Yogyakarta: Jalasutra, 2003.

**SKRIPSI**

Abidin, Zainal. “Gerakan Politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sebagai Organisasi Islam Ekstra Parlemerter Di Indonesia Pasca Reformasi.” dalam *Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah. Fakultas Syari’ah*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2010.

<http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-zainalabid-4570>

Slametriyadi, Dedy. “Analisis Terhadap Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir” dalam.” dalam *Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah. Fakultas Syari’ah*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2008.

<http://library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=19234>

**JURNAL ILMIAH**

Chusniyah, Tutut. Model Sikap Terhadap Penegakan Khilafah-Syariah Di Indonesia. dalam *Jurnal Insan*, Vol 14, No 2, 2012.

<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-artikel%201-14-2.pdf>

Hakim, Rakhmat Nur. Gerakan Islam Politik Fundamental: Kasus Hizbut Tahrir Indonesia di Surabaya. dalam *Jurnal Review Politik*, Vol 4, No 2, 2014.

<http://jurnalpolitik.uinsby.ac.id/index.php/jurnalpolitik/article/download/44/43>

Jonkennedi. Gerakan Hizbut Tahrir Dan Realitas Politik Islam Kontemporer Di Indonesia. dalam *Jurnal Komunika*, Vol 6, No 1, 2012.

<http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/komunika/article/view/348>

Shobron, Sudarno. Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia. dalam *Jurnal Profetika*, Vol 15, No 1, 2014.

<http://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/1966>

Wijaksono, Agung. Gerakan Politik Islam Hizbut Tahrir Di Indonesia Pada Era Pasca Reformasi. dalam *Jurnal Jom FISIP*, Vol 1, No 2, 2014.

<http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/issue/view/297/showToc>

**SUMBER INTERNET**

<http://kbbi.web.id/agama>

<https://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/>

<https://hizbut-tahrir.or.id/2013/08/13/tahapan-dakwah-dan-aktivitas-politik-hizbut-tahrir>

<https://hizbut-tahrir.or.id/2009/08/27/dakwah-islam-pemikiran-politik-dan-tanpa-kekerasan/>

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/15/12/08/nz1eg3365-din-persilakan-hti-golput-asal-jangan-mengajak-masyarakat>

<http://islamedia.id/hti-hasut-umat-islam-untuk-golput-dalam-pilkada-serentak/>

<https://hizbut-tahrir.or.id/2016/03/01/demo-tolak-lgbt-disambut-baik-warga-bandar-lampung/>

<https://hizbut-tahrir.or.id/2013/09/24/miss-world-kemungkaran-yang-wajib-ditolak/>

<https://hizbut-tahrir.or.id/2012/03/21/dua-unjuk-rasa-di-jember-tolak-kenaikan-harga-bbm/>

<https://hizbut-tahrir.or.id/2016/10/16/ribuan-umat-islam-riau-padati-jalan-cut-nyak-dhien-pekanbaru-demo-penjarakan-ahok/>

**SUMBER LAIN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

## GLOSARIUM

- Khilafah Islamiyah : Pemerintahan Islam/Negara Islam
- Daulah Islamiyah : Negara Islam
- Mabda : Ideologi
- Fikrah : Pemikiran
- Tariqah : Metode
- Syara : Hukum
- Al- Khaliq : Tuhan/Pencipta
- Halaqah : Lingkaran/Kelompok
- Aqidah Aqliyah : Aqidah Rasional/Aqidah Berdasar Pemikiran
- Kufur : Tidak Sesuai Nilai Islam
- Bathil : Salah
- Qaidah Fikriyah : Kaedah Berfikir
- Qiyadah Fikriyah : Kepemimpinan Berfikir
- Tsaqofah Murakazah : Pembinaan Intensif
- Tsaqofah Jamaiyah : Pembinaan Umu
- Ash Shira Al Fikriy : Perang Pemikiran
- Al Kifah As Siyasiy : Perjuangan Politik
- Musyrif : Pembina
- Mutarabbi : Murid

### **PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Apa itu Hizbut Tahrir ?
2. Sejarah Hizbut Tahrir di Indonesia ?
3. Visi dan Misi Hizbut Tahrir ?
4. Bagaimana struktur organisasi Hizbut Tahrir Indonesia ?
5. Perbedaan Hizbut Tahrir dengan Organisasi Masyarakat Keagamaan lain ?
6. Seberapa pentingkah Al Qur'an dan Hadits (Islam) dalam aktivitas ?
7. Ideologi, Fikrah, atau Pemikiran yang berada di Hizbut Tahrir ?
8. Dalam aspek politik, fikrah atau pemikiran apa yang digunakan atau diterapkan pada Hizbut Tahrir ?
9. Aktivitas apa saja yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir ? (Politik, Sosial, Ekonomi) (Jangka panjang atau pendek)
10. Seberapa pentingkah anggota atau kader dalam Hizbut Tahrir ?
11. Apa saja peran anggota atau kader dalam mencapai tujuan/visi misi Hizbut Tahrir ?
12. Tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap anggota Hizbut Tahrir ?
13. Bagaimana sikap organisasi Hizbut Tahrir terhadap anggota maupun masyarakat umum ?
14. Apa itu Islam ?
15. Apa itu Dakwah ?
16. Apa itu Politik ?
17. Sejak kapan anda bergabung dengan Hizbut Tahrir ?
18. Alasan apa yang menyebabkan anda bergabung dengan Hizbut Tahrir ?
19. Apakah tujuan anda dalam bergabung dengan Hizbut Tahrir ?
20. Aktivitas apa yang anda lakukan di Hizbut Tahrir ?
21. Kontribusi apa yang telah anda lakukan pada Hizbut Tahrir ? Pemikiran, Dawah, Perekrutan Anggota ?
22. Manfaat apa yang didapatkan dalam bergabung dengan Hizbut Tahrir ?

23. Seberapa pentingkah politik dalam suatu kehidupan bermasyarakat dan/atau bernegara ?
24. Faktor apa saja yang mempengaruhi anda dalam berperilaku/berpartisipasi politik ?
25. Seberapa penting/besar peran Hizbut Tahrir dalam dalam kehidupan anda ?
26. Aktivitas/Partisipasi politik apa saja yang pernah anda lakukan ?
27. Apakah anda pernah melakukan lobbying atau contacting dengan pemerintah atau partai politik ?
28. Apakah anda pernah melakukan suatu tindakan radikal/kekerasan/pengrusakan dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah ?
29. Apakah anda melakukan penyebaran pemikiran politik anda kepada orang lain ?
30. Kondisi ideal Indonesia ? (Politik, Sosial, Ekonomi)

### HASIL WAWANCARA

1. Nama : Muhammad Ismail Yusanto  
 Jabatan : Juru Bicara DPP HTI  
 Waktu wawancara : Kamis, 3 November 2016, pukul 16.20 WIB

| No | Hasil Wawancara  | Taksonomi      |
|----|--|----------------|
| 1  | <p>Pada ideologi lainnya yang sekuleristik tadi lahirlah berbagai bentuk tatanan yang jauh dari nilai-nilai Islam. Yakni tatanan ekonomi yang kapitalistik, perilaku politik yang oportunistik dan machiavellistik, budaya hedonistik yang amoralistik, kehidupan sosial yang egoistik dan individualistik, sikap beragama yang sinkretistik serta sistem pendidikan yang materialistik. Kemudian, bukan kebaikan yang diperoleh oleh rakyat Indonesia yang mayoritas muslim itu, melainkan berbagai problem berkepanjangan yang datang secara bertubi-tubi. Lihatlah, meski Indonesia adalah negeri yang amat kaya dan sudah lebih dari 70 tahun merdeka, tapi sekarang ada lebih dari 100 juta orang terpaksa hidup dalam kemiskinan.</p> <p>Islam sebagaimana yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi-Nya, Muhammad saw. Islam yang benar-benar pernah diterapkan selama 14 abad di seluruh dunia. Memimpin umat manusia, dari Barat hingga Timur, Utara hingga Selatan. Di bawah naungannya, dunia aman, tenteram, adil dan sejahtera. Semua warga negara, baik Muslim, Kristen, Yahudi, dan penganut agama lain bisa hidup berdampingan dengan damai selama berabad-abad lamanya. Yang telah terbukti membawa kerahmatan bagi seluruh alam. Inilah Islam yang dirindukan oleh umat manusia untuk kembali memimpin dunia. Membebaskan umat manusia dari perbudakan dan penjajahan oleh sesama manusia. Menebarkan kebaikan, keadilan dan kemakmuran di seluruh penjuru dunia. Islam yang hidup sebagai peradaban di tengah umat manusia, yang diterapkan, dipertahankan dan diemban di bawah naungan Khilafah Rasyidah.</p> <p>Hizbut Tahrir menyatakan satu-satunya <i>mabda</i> yang benar ialah <i>mabda</i> Islam. <i>Mabda</i> yang muncul dalam benak manusia melalui wahyu Allah (Al Qur'an) adalah <i>mabda</i> yang benar. Karena bersumber dari <i>Al-Khaliq</i>.</p> <p>Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT melalui Alquran sebagai rahmat bagi semesta alam. Dan kerahmatan itu akan bisa dirasakan bila, dan hanya bila, aqidah Islam diyakini dan dipegang erat, serta syariahnya diterapkan secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karenanya Hizbut Tahrir menjalankan aqidah islam secara kaffah pada seluruh aktivitasnya.</p> | Ideologi Islam |

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
|   | <p>Pada Hizbut Tahrir, Kehidupan yang di dalamnya diterapkan syariat Islam dalam seluruh sendi kehidupan, baik kehidupan pribadi, keluarga maupun kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang menyangkut aspek ibadah, makanan, minuman, pakaian, akhlak maupun muamalat.</p>  |                      |
| 2 | <p>Kemunduran dunia Islam diakibatkan oleh neo imperialisme. Nafsu negara adikuasa untuk tetap melanggengkan dominasi mereka atas dunia Islam, termasuk terhadap Indonesia, demi kepentingan ekonomi dan politik mereka tetap bergelora. Neo imperialisme dilakukan untuk mengontrol politik pemerintahan dan menghisap sumberdaya ekonomi negara lain</p>  | Realitas Umat Islam  |
| 3 | <p><i>Khilafah</i> adalah “<i>ri`asatun ‘ammatus li al-muslimin jami`a fi ad-dunya li iqamati ahkam asy-syar`i al-islamiy wa hamli ad-da`wah al-islamiyyah ila al-‘alam</i>” atau kepemimpinan umum umat Islam di dunia untuk menegakkan syariat Islam dan mengemban dakwah ke seluruh dunia.</p> <p>Syariah akan menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan akibat sistem sekuler, dan khilafah akan menghentikan neo-imperialisme yang kini tengah menimpa negeri-negeri Islam, termasuk Indonesia, yang dilakukan oleh negara adikuasa. Kejahatan adikuasa hanya mungkin bisa dihentikan oleh kekuatan adikuasa juga. Itulah khalifah.</p> <p>Menjadikan syariah sebagai hukum positif dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi sesuatu yang harus (<i>a must</i>) atau wajib dilakukan. Bahkan sejatinya dalam pandangan Islam, berdirinya sebuah negara tidak lain adalah untuk melaksanakan syariah, bukan untuk yang lain. Ayat seperti <i>fahkum baynakum atau fahkum baynahum bima anzalallah</i> – terapkankah hukum di antara kalian atau diantara mereka dengan apa yang telah diturunkan Allah, ditambah dengan kecaman bahwa siapa saja yang tidak menerapkan hukum dengan apa yang diturunkan Allah (<i>wa man lam yahkum bima anzallah</i>) sebagai fasik, dzalim bahkan kafir, semua itu menunjukkan adanya kewajiban untuk menerapkan syariah Islam.</p> | Khilafah dan Syariah |
| 4 | <p>Terdapat banyak ayat dan hadits yang menyerukan dalam kewajiban seorang muslim untuk melaksanakan <i>amar maruf nahi munkar</i>, salah satunya, Demi Dzat yang jiwaku ada dalam kekuasaan-Nya. Kamu akan benar-benar menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Atau jika tidak kamu lakukan-sungguh Allah akan segera mengirim atas kalian bencana dari sisi-Nya. Kemudian, kamu sungguh-sungguh berdo'a kepada-Nya. Namun, Allah sudah tidak menerima lagi do'a kalian. Ayat lainnya yaitu yang terdapat pada Ali Imran ayat 104</p> <p>Forum seperti tabligh akbar, diskusi publik, seminar, workshop, training, daurah, temu tokoh dan forum lainnya yang diselenggarakan oleh HTI adalah sebagian cara yang ditempuh HTI untuk menyampaikan penjelasan-penjelasan itu secara massal.</p>   | Aktivitas Politik    |

|   |   |        |
|---|---|--------|
|   | <p>Sementara secara personal, dilakukan dengan kontak, audiensi atau silaturahmi kepada para tokoh baik dari kalangan ulama, cendekiawan, birokrat, militer dan kepolisian, pers, pengusaha dan lainnya, yang ada di tengah masyarakat. Selain dengan cara langsung, penjelasan juga disampaikan dengan sarana media massa. HTI memiliki buletin Jumat al Islam, majalah al Waie dan tabloid Media Umat.</p> <p>HTI melakukan berbagai upaya untuk turut serta bersama komponen umat yang lain menyelamatkan negeri ini melalui berbagai kegiatan politik. Kita menyebutnya <i>dakwah siyasiyah</i> (dakwah politis). Yang utama adalah seruan kita melalui berbagai cara (unjuk rasa, petisi, penulisan di media massa, diskusi, pengiriman delegasi dan sebagainya) untuk menerapkan syariah Islam dan menghentikan sekularisme, karena inilah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan lebih jauh. Kemudian secara konsisten kita juga mengkritisi tiap kebijakan, seperti kenaikan BBM, penandatanganan DCA dengan Singapura dan sebagainya, dan peraturan seperti RUU APP, UU Migas, UU Sumberdaya Air dan sebagainya yang kita nilai bertentangan dengan syariah.</p> <p>Kami tidak melakukan cara-cara kekerasan, karena memang syariat tidak membolehkan metode tersebut. Kekerasan dalam dakwah hanya akan menghasilkan siklus kekerasan berikutnya dan tidak akan menghasilkan perubahan. Meski begitu, tidak berarti Hizbut Tahrir tidak menjelaskan dan tidak mengajarkan dan menyerukan jihad yang memang harus dilakukan dengan kekerasan pada kondisi tertentu.</p> <p>Hizbut Tahrir dengan dakwahnya itu ingin mengajak kaum muslimin kepada pengamalan kembali seluruh hukum-hukum Islam baik dalam masalah aqidah, ibadah, makanan, minuman, pakaian, akhlaq, dakwah, muamalah dan uqubah dengan jalan menegakkan khilafah Islam dan menerapkan syariah Islam secara menyeluruh</p> <p>Dakwah bagi tegaknya kembali <i>syariah</i> dan <i>khilafah</i> sebagai manifestasi dari <i>tauhid</i> atau keimanan kita kepada Allah SWT, adalah dakwah dengan tujuan politik. Ini tentu hanya bisa dicapai melalui perjuangan politik.</p> <p>Dakwah semacam ini memang tidak mudah, tapi Insya Allah tujuan itu akan terwujud, karena metode itu adalah jalan dakwah yang ditunjukkan oleh Rasulullah, dan berhasil.</p> <p>Dakwah politik hukumnya wajib secara syar'i, karena dakwah politik inilah metode yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw.</p> |        |
| 5 | <p>Kami tidak pernah menyatakan golput atau menganjurkan golput. HTI memberikan panduan sebagaimana secara ringkas dinyatakan di atas. Berdasar panduan tersebut, umat bisa bersikap. Dan</p>   | Pemilu |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>menjadi hak individu untuk menetapkan sikapnya dalam menghadapi pemilu nanti. Sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang bebas dan rahasia, maka orang lain tidak boleh tahu tentang pilihan sikap politik seperti apa yang (hendak) diambil oleh seseorang.. Kami selalu ingatkan adalah 'haram hukumnya' memilih caleg atau pemimpin yang tidak bermoral. Kami selalu ingatkan kepada kader dan masyarakat agar memilih caleg dan pemimpin yang peduli pada syariat Islam.</p> <p>Undang-undang pemilu sendiri menyebut bahwa memilih itu hak bukan kewajiban. Orang yang punya hak itu kan dia bisa menggunakan atau tidak, namanya juga hak. Jadi, adalah hak juga setiap orang untuk menggunakan hak pilihnya itu dalam segala bentuk yang dia memang pilih. Termasuk ketika dia tidak memilih, itu juga adalah pilihan</p> |  |
|--|--|--|

2. Nama : Muhammad Rahmat Kurnia  
 Jabatan : Ketua Lajnah Faalayah DPP HTI  
 Waktu wawancara : Kamis, 3 November 2016, pukul 17.20 WIB

| No | Hasil Wawancara  | Taksonomi            |
|----|--|----------------------|
| 1  | Ideologi islam adalah ideologi yang benar karena bersumber dari Allah  | Ideologi Islam       |
| 2  | Kemunduran umat terjadi karena lemahnya kaum muslimin dalam memahami dan mengamalkan Islam   | Realitas Umat Islam  |
| 3  | Khilafah akan mewujudkan persatuan dengan identitas hakiki kita sebagai sebuah umat. Sementara, dengan syariah, kita sebagai muslim akan dapat merealisasikan seluruh pikiran ideal kita tentang misi hidup kita untuk beribadah kepada Allah swt, karena bukan hanya dalam kehidupan pribadi dan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara juga diatur dengan aturan yang ditetapkan Allah swt.   | Khilafah dan Syariah |
| 4  | Dalam pemilu HTI menyerukan kepada kader dan umat, bila hendak memilih, pilihlah calon wakil rakyat yang benar-benar hendak berjuang untuk tegaknya syariah dan khilafah, menjadikan parlemen sebagai mimbar dakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan tidak terlibat dalam proses legislasi yang tidak Islami. Dan bila hendak memilih pemimpin, pilihlah yang muslim, laki-laki, beriman dan bertaqwa, dan yang mau menerapkan syariah secara kaffah dalam sistem khilafah | Pemilu               |
| 5  | Karena itu, seorang Muslim dituntut untuk tidak mengenal lelah dalam beribadah kepada Allah Swt., termasuk dalam mengemban dakwah sebagai bagian dari ibadah itu. Dengan itulah, insya Allah, pertolongan Allah akan lebih cepat kita peroleh, dan cita-cita berupa tegaknya syariah Islam secara total dalam naungan Khilafah Islamiyah akan segera terwujud  | Aktivitas Politik    |

3. Nama : Miraz Syahrul  
 Jabatan : Anggota DPD HTI Kota Bekasi  
 Waktu wawancara : Jumat, 14 Oktober 2016, pukul 13.00 WIB

| No | Hasil Wawancara   | Taksonomi           |
|----|---|---------------------|
| 1  | <p>Halaqah menjadikan setiap individu yang mengikutinya dapat berfikir dan bertindak sesuai dengan Al Quran dan Hadits.</p> <p>Dalam diri ini, halaqah bukan lagi sebuah kewajiban yang terpaksa tetapi sudah menjadi sebuah kebutuhan yang sangat dibutuhkan.</p> <p>Pada halaqah kami mengkaji kitab-kitab dan buku-buku yang menjelaskan mulai dari cara beribadah kepada Allah, cara berhubungan dengan manusia, cara berekonomi, peraturan dalam islam, politik, dan lainnya.</p> <p>Pada liqo (halaqah) kami diberitahukan bagaimana cara bersikap dan menanggapi terhadap berbagai masalah-masalah yang ada, seperti saat menanggapi kebijakan pemerintah, pemilu, dan lain sebagainya</p> | Halaqah (Pembinaan) |
| 2  | <p>Saya aktif melakukan postingan di facebook terkait pandangan saya mengenai bagaimana penerapan Islam, isu politik yang hangat, maupun <i>quotes</i> Islam”</p> <p>Dulu saat pemilu 2014 berlangsung saya melakukan penyebaran pemikiran terkait pandangan saya langsung kepada keluarga saya dan juga melalui facebook.</p>  | Aktivitas Politik   |

4. Nama : Suryono Putra  
 Jabatan : Anggota DPD HTI Kota Bekasi  
 Waktu wawancara : Jumat, 14 Oktober 2016, pukul 13.00 WIB

| No | Hasil Wawancara  | Taksonomi           |
|----|--|---------------------|
| 1  | <p><i>Halaqah</i> merupakan sebuah kebutuhan yang dibutuhkan oleh <i>ruhiyah</i>. Dalam <i>halaqah</i> ini dapat menenangkan hati dan menjauhkan dari problem. Hal ini dikarenakan kita dapat saling meningkatkan dalam kesalahan serta kebaikan dan memotivasi dalam melakukan amal.</p> <p><i>Halaqah</i> bukan hanya pembinaan dari segi ruhiyah saja namun kami dibina secara secara keseluruhan. Kami dibina dalam hal akhlaq dan pemikiran.</p> <p><i>Halaqah</i> bukan hanya membicarakan agama dan ide Hizbut Tahrir terus, kami juga membicarakan realitas umat di politik, sosial, dan masalah-masalah umat lainnya.</p> <p><i>Halaqah</i> wajib dilakukan oleh setiap anggota Hizbut Tahrir yang mengakui fikrah Hizbut Tahrir.</p> <p>Halaqah membuat kami berfikir dan bersikap secara islami terhadap realitas yang ada.</p> | Halaqah (Pembinaan) |
| 2  | <p>Mengemban dakwah adalah bagian dari ibadah (pengabdian) kita kepada Allah Swt. Itu harus kita lakukan tanpa henti dan tanpa mengenal kata istirahat. Hanya kematianlah yang boleh menghentikan aktivitas ibadah kita, termasuk dakwah kita.</p> <p>Saya melakukan penyebaran pemikiran politik yang saya pahami melalui facebook maupun saat berbincang dengan teman kerja.</p> <p>Dalam melakukan penyebaran pemikiran politik, saya intens menyebarkan sesuai dengan isu-isu yang sedang hangat di perbincangkan</p>  | Aktivitas Politik   |

5. Nama : Ari Rachmayanti  
 Jabatan : Anggota DPD HTI Kota Bekasi  
 Waktu wawancara : Senin, 17 Oktober 2016, pukul 09.45 WIB

| No | Hasil Wawancara  | Taksonomi           |
|----|--|---------------------|
| 1  | Dalam <i>halaqah</i> merupakan sarana dalam mengenal Islam lebih dalam, menyelami keindahannya, serta mengetahui agama yang sempurna dan lengkap aturannya. Dalam halaqah kami dapat bertemu dengan wajah-wajah yang meningkatkan keimanan | Halaqah (Pembinaan) |
| 2  | Saya menyebarkan paham Hizbut Tahrir terbatas pada keluarga dan kerabat yang menurut saya dapat menerimanya  | Aktivitas Politik   |

### INSTRUMEN PENELITIAN

| Bab | Komponen Data                                    | Teknik Primer |    |     |     | Teknik Sekunder |       |     |              |
|-----|--|---------------|----|-----|-----|-----------------|-------|-----|--------------|
|     |  | P             | WM | WSL | Bio | Kel/RT<br>RW    | Koran | BPS | Buku<br>/M-K |
| I   | PENDAHULUAN                                      |               |    |     |     |                 |       |     |              |
|     | 1.1 Latar Belakang                               | V             |    |     |     |                 |       |     | V            |
|     | 1.2 Permasalahan Penelitian                      | V             |    |     |     |                 |       |     |              |
|     | 1.3 Tujuan dan Signifikasi Penelitian            | V             |    |     |     |                 |       |     |              |
|     | 1.4 Tinjauan Pustaka                             |               |    |     |     |                 |       |     | V            |
|     | 1.5 Kerangka Konsep                              |               |    |     |     |                 |       |     | V            |
|     | 1.5.1 Konsep Gerakan Sosial                      |               |    |     |     |                 |       |     | V            |
|     | 1.5.2 Konsep Gerakan Sosial Keagamaan            |               |    |     |     |                 |       |     | V            |
|     | 1.5.2.1 Organisasi Agama dan Aktivitas Gerakan   |               |    |     |     |                 |       |     | V            |
|     | 1.5.2.2 Organisasi dan Ideologi                  |               |    |     |     |                 |       |     | V            |
|     | 1.5.3 Konsep Ideologi                            |               |    |     |     |                 |       |     | V            |
|     | 1.5.4 Konsep Peranserta Politik                  |               |    |     |     |                 |       |     | V            |
|     | 1.5.3.1 Partisipasi Politik                      |               |    |     |     |                 |       |     | V            |
|     | 1.5.3.2 Mobilisasi Politik                       |               |    |     |     |                 |       |     | V            |
|     | 1.5.4 Teori Konstruksi Sosial                    |               |    |     |     |                 |       |     | V            |
|     | 1.6 Metodologi Penelitian                        | V             |    |     |     |                 |       |     |              |
|     | 1.6.1 Subjek Penelitian                          | V             | V  |     | V   |                 |       |     |              |
|     | 1.6.2 Lokasi dan Waktu Penelitian                | V             |    |     |     |                 |       |     |              |
|     | 1.6.3 Peran Peneliti                             | V             | V  | V   |     |                 |       |     |              |
|     | 1.6.4 Teknik Pengumpulan Data                    | V             | V  | V   |     |                 |       |     | V            |
|     | 1.7 Sitematika Penulisan                         |               |    |     |     |                 |       |     | V            |
| II  | GERAKAN SOSIAL KEAGAMAAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA |               |    |     |     |                 |       |     |              |

|     |  |  |   |   |  |  |  |  |   |
|-----|--|--|---|---|--|--|--|--|---|
|     | 2.1 Pengantar  |  |   |   |  |  |  |  | V |
|     | 2.2 Gerakan Sosial Keagamaan Hizbut Tahrir Indonesia   |  |   |   |  |  |  |  | V |
|     | 2.2.1 Sejarah Hizbut Tahrir  |  | V | V |  |  |  |  | V |
|     | 2.2.2 Hizbut Tahrir Indonesia  |  | V | V |  |  |  |  | V |
|     | 2.3 Formulasi Nilai Islam Hizbut Tahrir  |  | V | V |  |  |  |  | V |
|     | 2.3.1 Mabda Islam  |  | V | V |  |  |  |  | V |
|     | 2.3.2 Islam sebagai Landasan Gerakan   |  | V | V |  |  |  |  | V |
|     | 2.3.3 Aktivitas Islam Politik  |  | V | V |  |  |  |  | V |
|     | 2.4 Penutup  |  |   |   |  |  |  |  | V |
| III | PERANSERTA HIZBUT TAHRIR INDONESIA DALAM ARENA POLITIK                                       |  |   |   |  |  |  |  |   |
|     | 3.1 Pengantar  |  |   |   |  |  |  |  | V |
|     | 3.2 Peranserta Politik Hizbut Tahrir Indonesia pada Pileg dan Pilpres 2014                   |  | V | V |  |  |  |  | V |
|     | 3.3.1 Partisipasi Politik  |  | V | V |  |  |  |  | V |
|     | 3.3.2 Mobilisasi Politik   |  | V | V |  |  |  |  | V |
|     | 3.3 Pandangan Aktivis Hizbut Tahrir Indonesia terhadap Peranserta Politik dan Ideologi Islam |  | V | V |  |  |  |  | V |
|     | 3.3.1 Dakwah Politik Hizbut Tahrir Indonesia sebagai Peranserta Politik                      |  | V | V |  |  |  |  | V |
|     | 3.3.2 Penerapan Ideologi Islam dalam Khilafah Islamiyah                                      |  | V | V |  |  |  |  | V |
|     | 3.3.2.1 Ideologi Islam sebagai Ideologi yang sesuai Akal dan Fitrah Manusia                  |  | V | V |  |  |  |  | V |
|     | 3.3.2.1 Ideologi dan Khilafah  |  | V | V |  |  |  |  | V |

|    |   |  |   |   |  |  |  |  |   |
|----|---|--|---|---|--|--|--|--|---|
|    | Islamiyah   |  |   |   |  |  |  |  |   |
|    | 3.4 Penutup   |  |   |   |  |  |  |  | V |
| IV | KONSTRUKSI IDEOLOGI ISLAM DALAM PERANSERTA POLITIK DAN KRITIK TERHADAP PERANSERTA POLITIK HIZBUT TAHRIR INDONESIA |  |   |   |  |  |  |  |   |
|    | 4.1 Pengantar   |  | V |   |  |  |  |  |   |
|    | 4.2 Konstruksi Ideologi Islam dalam Peranserta Politik Hizbut Tahrir Indonesia                                    |  |   | V |  |  |  |  | V |
|    | 4.2.1 Eksternalisasi: Peranserta Politik sebagai Sosialisasi Ideologi Islam Hizbut Tahrir Indonesia               |  | V | V |  |  |  |  | V |
|    | 4.2.2 Obyektivasi: Hizbut Tahrir Indonesia sebagai Institusionalisasi Ideologi Islam                              |  | V | V |  |  |  |  | V |
|    | 4.2.3 Internalisasi: Ideologi Islam Hizbut Tahrir Indonesia sebagai Identitas Diri                                |  | V | V |  |  |  |  | V |
|    | 4.3 Ideologi Islam dalam Tipe Gerakan Sosial Hizbut Tahrir Indonesia  |  | V | V |  |  |  |  | V |
|    | 4.4 Kritik Peranserta Politik Hizbut Tahrir Indonesia   |  |   | V |  |  |  |  | V |
|    | 4.4.1 Politik Kritik Hizbut Tahrir Indonesia  |  |   | V |  |  |  |  | V |
|    | 4.4.2 Sistem Demokrasi vs Sistem Khilafah Islamiyah: Ketidakkonsistenan Hizbut Tahrir Indonesia                   |  |   | V |  |  |  |  | V |
|    | 4.4 Penutup   |  |   |   |  |  |  |  | V |
| V  | KESIMPULAN DAN SARAN  |  |   |   |  |  |  |  |   |
|    | 5.1 Kesimpulan  |  | V | V |  |  |  |  | V |
|    | 5.2 Saran   |  |   |   |  |  |  |  |   |

### RIWAYAT HIDUP



Abdurrahman Mujahid Rabbani atau yang akrab disapa mujahid maupun rahman, lahir di Bekasi, 15 Januari 1994. Merupakan anak ketiga dari lima bersaudara. Anak dari pasangan Asep Didi Kurnia dan Rosmala Septina ini

mengawali pendidikannya di bangku sekolah dasar di SDIT Iqra Pondok Gede tahun 2002-2007. Melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama di SMPN 192 Jakarta tahun 2007-2009. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Atas di SMAN 113 Jakarta tahun 2009-2012.

Setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas, peneliti melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Jakarta angkatan 2012 dengan mengambil disiplin ilmu sosiologi pada Prodi Sosiologi Pembangunan. Pada masa perkuliahan, peneliti mengikuti setiap kegiatan perkuliahan pokok dan juga penelitian-penelitian. Kegiatan perkuliahan pokok peneliti ikuti antara lain; penelitian Sosiologi Desa di Pulau Pramuka dan Pulau Panggang; KKL di Desa Kunjir, Lampung; KKN di Desa Gunungsari, Kecamatan Mandalawangi, Pandeglang; dan PKL di Kementerian Perdagangan.

Adapun penelitian yang pernah peneliti ikuti antara lain. Penelitian sosiologi desa dengan judul penelitian "*Strategi Bertahan Hidup Perempuan Sebagai Kepala Keluarga*"; sosiologi kota dengan penelitian "*;*"; mata kuliah MPS dengan judul "*Pengaruh Terpaan Iklan terhadap Daya Beli Konsumen KFC di Jakarta*"; mata kuliah perencanaan pembangunan desa dan kota dengan judul penelitian "*Analisis Pemberdayaan Pemuda Produktif Kabupaten Bekasi*"; mata kuliah evaluasi

pembangunan dengan judul *“Evaluasi Manajemen Pembangunan Kawasan Pondok Gede. Kelurahan Jati Waringin, Kecamatan Pondok Gede”*; KKL dengan penelitian pendidikan dan pembangunan; dan juga penelitian PKL dengan judul penelitian *“Direktorat Pemberdayaan Konsumen Terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia”*